

Oleh:  
**UNDRI  
FEMMY**



# KURIKULUM MUATAN LOKAL

DI KABUPATEN REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SEJARAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNS) PADANG

PADANG  
2015

**Baso Jang Te**

**Baso Jang Te**

Bahasa dan Aksara Rejang  
Bahasa dan Aksara Rejang Kelas I smpn

## DAFTAR ISI

|                |                                                                                  |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | <b>KATA PENGANTAR</b>                                                            | iii |
|                | <b>KATA SAMBUTAN</b>                                                             | vi  |
|                | <b>DAFTAR ISI</b>                                                                | ix  |
|                | <b>DAFTAR TABEL</b>                                                              | xi  |
|                | <b>DAFTAR FOTO</b>                                                               | xii |
|                | <b>DAFTAR PETA</b>                                                               | xii |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                               |     |
|                | 1.1. Latar Belakang Masalah                                                      | 1   |
|                | 1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah                                            | 5   |
|                | 1.3. Tujuan Penelitian                                                           | 6   |
|                | 1.4. Kontribusi Penelitian                                                       | 6   |
|                | 1.5. Kerangka Analisis                                                           | 7   |
|                | 1.6. Penelitian Terdahulu                                                        | 15  |
|                | 1.7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber                                          | 16  |
|                | 1.8. Struktur Isi Buku                                                           | 19  |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>                                           |     |
|                | 2.1 Letak dan Kondisi Geografis                                                  | 21  |
|                | 2.2 Sejarah Pemerintahan dan Masyarakat                                          | 23  |
|                | 2.3 Demografi                                                                    | 32  |
|                | 2.4 Mata Pencaharian Penduduk                                                    | 33  |
|                | 2.5 Pendidikan                                                                   | 34  |
| <b>BAB III</b> | <b>KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL<br/>DI KABUPATEN REJANG LEBONG</b>           |     |
|                | 3.1. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal<br>oleh Pemerintah Pusat                   | 39  |
|                | 3.2. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal oleh<br>Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong | 67  |
|                | 3.3. Aksara <i>Ka Ga Nga</i> Sebagai Isi Kurikulum                               | 73  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Buku ini mengkaji tentang kurikulum muatan lokal, khususnya proses penyusunan, pelaksanaan pembelajaran dan faktor yang mendorong dan menghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perspektif sejarah. Di bumi Rafflesia tersebut, kurikulum muatan lokal sudah diterapkan sejak tahun 2009. Penerapan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal di daerah ini pun agak terlambat, bila ditinjau dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan kurikulum muatan lokal itu sendiri. Penguatan atas penerapan proses pembelajaran kurikulum ini yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987 dan pelaksanaannya dijabarkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.<sup>1</sup> Hampir duapuluh dua tahun lamanya kurikulum muatan lokal tidak diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1987 yakni dikeluarkannya payung hukum pelaksanaan penerapan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal tersebut.

Keinginan masyarakat Rejang Lebong untuk menerapkan kurikulum muatan lokal sudah ada sejak dikeluarkannya payung hukum tersebut, namun terbentur dalam persoalan bahan yang akan diajarkan dalam materi kurikulum muatan lokal serta

---

<sup>1</sup> Selanjutnya penerapan muatan dipertegas oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993. Sekarang muatan lokal telah disempurnakan dan diperkuat melalui UU.No.20 Tahun 2003 dan PP.No.19 Tahun 2005. Kemudian Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang berbunyi: Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan dan ciri khas satuan pendidikan.

sumberdaya manusia atau guru yang akan mengajarkan kurikulum muatan lokal itu sendiri. Berfondasikan kepada perihal tersebut pihak pemerintah daerah Kabupaten Rejang tidak memaksakan kurikulum muatan lokal diajarkan kepada anak didik. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan bahwa pemaksaan terhadap kurikulum muatan lokal ini akan berakibat tidak berjalannya proses belajar mengajar itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Taylor dan Vinjevold dalam Pusat Kurikulum (2007) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kurikulum di sebabkan oleh rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurang penguasaan terhadap topik yang diajarkan, dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen atau bahan kurikulum yang akan diajarkan itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong meminta kepada BMA (Badan Musyawarah Adat),<sup>2</sup> untuk membuat buku pegangan bagi guru tentang adat istiadat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Langkah awalnya oleh BMA membuat buku pegangan bagi guru tentang sejarah dan budaya masyarakat Rejang Lebong, namun karena terkendala oleh waktu dan kesibukan para anggota BMA maka buku tersebut tidak selesai dilaksanakan. Namun atas inisiatif Jalaluddin, seorang tokoh masyarakat dan ahli dalam aksara *Ka Ga Nga* kemudian menulis buku *Muatan Lokal Untuk Sekolah Dasar (SD) Ka Ga Nga Tulisan Tradisional Daerah Bengkulu* yang dicetak dan diterbitkan di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian diikuti dengan buku *Baso Jang Te : Bahasa dan Aksara Rejang*. Buku ini dicetak oleh PT. Tiga Serangkai di Jakarta. Sampai sekarang ini buku-buku tersebut menjadi bahan ajar dalam proses pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai sebuah lembaga mitra pemerintah daerah dalam pelestarian bidang kebudayaan, tahun 2007 BMA Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan buku tentang hukum adat Rejang. Buku tersebut kemudian menjadi salah satu bahan acuan bagi guru yang mengajarkan tentang muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong dan sebagai acuan dalam bermasyarakat di daerah tersebut. Adapun judul buku tersebut

---

<sup>2</sup> BMA (Badan Musyawarah Adat) adalah sebuah lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan.

adalah *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*.<sup>3</sup> Buku tersebut berisi tentang himpunan hukum adat Rejang sebagai pedoman pelaksanaan hukum adat Rejang.

Penerapan kurikulum muatan lokal sejak tahun 2009 di Kabupaten Rejang Lebong tersebut pun tidak terlepas dari pengaruh penerapan undang-undang otonomi daerah,<sup>4</sup> yang memberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing salah satunya bahan kurikulum muatan lokal serta desakan dari Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. Melalui rapat para anggota BMA akhir tahun 2008 direkomendasikan untuk penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong. Muatan lokal dimaksudkan untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah, serta mengembangkan potensi sekolah sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif.

Di Kabupaten Rejang Lebong proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di laksanakan di tingkat SD (Sekolah Dasar)/ MI (Madrasah Ibtidaiyah), yakni Aksara *Ka Ga Nga*, termasuk bahasa dan budaya Rejang, baca tulis Al-Qur'an, tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama)/MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan SMA (Sekolah Menengah Atas)/MA (Madrasah Aliyah) disesuaikan dengan kondisi sekolah, umumnya adalah bahasa Inggris, keterampilan seni dan budaya Rejang yakni aksara *Ka Ga Nga*. Namun, muatan lokal yang wajib diajarkan yakni budaya dan bahasa Rejang termasuk didalamnya aksara *Ka Ga Nga* dan *Baso Jang Te*- bahasa dan aksara Rejang itu sendiri. Penguatan akan hal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2009 pasal 41 ayat (4a) bahwa kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Rejang Lebong yakni budaya dan bahasa Rejang.

Pengenalan budaya dan bahasa Rejang kepada anak didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya yakni budaya dan bahasa

---

<sup>3</sup> Mengenai isi buku ini lebih lanjut lihat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Curup : Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, 2007.

<sup>4</sup> Lebih lanjut lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Rejang sebagai bagian dari perihal lingkungan mereka. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program muatan lokal dalam kurikulum dilandasi kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam kebudayaan. Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, tata cara, tata karma pergaulan, bahasa, dan pola kehidupan yang diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal ini tentunya perlu dilestarikan dan dikembangkan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan ciri khas dan jati dirinya. Upaya menjaga ciri khas Indonesia harus dimulai sedini mungkin pada usia pra sekolah kemudian diidentifikasi pada pendidikan secara formal pada melalui pendidikan di sekolah-sekolah.

Di Kabupaten Rejang Lebong sendiri dalam proses pengembangan kurikulum muatan lokal ditangani oleh sekolah dan komite sekolah. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan pendapat Pusat Kurikulum (2007) bahwa proses Pengembangan kurikulum muatan lokal pengembangannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah, dan ini membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Dengan demikian di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan muatan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional muatan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu sekolah dan komite sekolah.

Uniknya, dalam proses penyusunan dan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong telah mengikutsertakan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, terutama dalam menyiapkan bahan materi kurikulum muatan lokal. Disamping itu juga telah memasukkan materi aksara *Ka Ga Nga* dalam kurikulum muatan lokal, sebagai sebuah aksara tradisional masyarakat Bengkulu. Sebuah aksara yang ada ditingkat lokal dan dikenal secara nasional dan

internasional.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Kartodirdjo (1982) mengatakan seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengerti dengan lebih baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal. Dengan demikian pelajaran muatan lokal dalam jangka panjang akan memperjelas identitas dan jati diri setiap daerah dengan segala kearifan lokalnya, hal ini tentu sangat diperlukan dalam rangka otonomi daerah. Dalam arti, daerah memang membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas yang berbeda dengan daerah lain, tetapi masih dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muatan lokal juga berkenaan dengan pemajuan kebudayaan bukan diarahkan pada kebudayaan saja, tetapi juga pada manusianya. Manusia sebagai pemilik dan pendukung kebudayaan perlu dilakukan pembinaan. Yang dimaksud pembinaan ialah upaya peningkatan kemampuan kecerdasan, kepribadian, kreatifitas dan keterampilan pemilik dan pendukung kebudayaan bangsa. Upaya pembinaan dapat dilakukan antara lain melalui lembaga-lembaga.

Buku ini sesungguhnya ingin menelusuri serta memusatkan kajian tentang kurikulum muatan lokal, khususnya proses penyusunan, pelaksanaan pembelajaran dan faktor yang mendorong dan menghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perspektif sejarah. Sehubungan dengan itu buku ini diberi judul : *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*.

## **1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Rangkaian pertanyaan berikut ini dapat membantu mengarahkan pokok-pokok persoalan secara lebih jelas. Adapun pertanyaan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Aksara Ka Ga Nga ini telah dikenal luas tidak saja ditingkat nasional dan juga internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran peneliti asing yang meneliti aksara ini antara lain Jaspan, M.A, *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*. Canberra :The Australian National University Canberra, 1964.

1. Bagaimana kebijakan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ?.
2. Bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ?.
3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ?.

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Daerah tersebut sampai sekarang ini masih menerapkan kurikulum muatan lokal. Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1987 sampai 2013. Tahun 1987 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun tersebut dikeluarkannya payung hukum penerepan kurikulum muatan lokal yakni dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987 dan pelaksanaannya dijabarkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987. Sedangkan tahun 2013 diambil sebagai batasan akhirnya, karena proses sosial masih berlangsung sampai sekarang. Menurut Irwan Abdullah (2006), sebab proses sosial masih berlangsung dalam sebuah masyarakat, maka kajian ini tidak akan pernah berhenti dikaji, baik dari segi substansi isi maupun waktu.

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan kebijakan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Menjelaskan proses penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **1. 4. Kontribusi Penelitian**

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian ini bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan kurikulum muatan lokal. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan sumbangan bagi salah-satu aspek pendidikan dari penulisan sejarah lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi yang komprehensif tentang kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Secara terapan, penelitian ini juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah-satu varian dari kehidupan sosial budaya, serta memahami lebih jauh tentang persoalan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Pada gilirannya, penelitian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan khususnya dalam kebijakan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **1. 5. Kerangka Analisis**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perspektif sejarah. Oleh karena itu, pembahasan akan menekankan pada berbagai persoalan proses pembelajaran, kurikulum dan muatan lokal. Untuk kepentingan hal tersebut, maka perlu dijelaskan konsep proses pembelajaran, kurikulum, dan muatan lokal.

##### **1. 5.1. Proses Pembelajaran**

Menurut Sobandi (2012 : 376) proses pembelajaran merupakan implementasi dari kurikulum ideal (biasanya dalam bentuk dokumen) menjadi kurikulum riil. Oleh

karena itu, proses pembelajaran merupakan rancangan tahapan sistematis sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan Knirk dan Gustafson (Sagala, 2003 : 64) bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahapan rancangan, pelaksanaan dan evaluasi. Pendapat senada dikemukakan Hamalik (1999: 57) yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan sebuah interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta lingkungannya sebagai sumber belajar. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Surya (2003:11) bahwa pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 (2003 : 6) yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dalam hal ini kurikulum muatan lokal yang diajarkan dalam proses pembelajaran kepada siswa dan siswi di sekolah akan dapat memperkenalkan siswa siswi terhadap lingkungannya. Hal ini tidak terlepas dari persoalan bahwa pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih mengakrabkan dengan lingkungannya. pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

### **1. 5.2. Kurikulum**

Menurut Ismawati (2012 : 1) secara tradisional kurikulum berarti sejumlah pelajaran yang harus ditempuh siswa di sekolah atau kursus. Kurikulum juga diartikan sebagai rencana pelajaran yang sengaja disusun untuk mencapai sejumlah tujuan

pendidikan. Kemudian secara modern, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa tetapi kurikulum diartikan secara lebih luas yakni keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik yang berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Kemudian lebih lanjut, menurut Ismawati (2012 :3) ada lima model definisi kurikulum yang pernah dikemukakan hingga saat ini yakni (1) kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun, (2) kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para guru di dalam melaksanakan pelajaran untuk murid-muridnya, (3) kurikulum adalah usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri penting dari rencana pendidikan dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di sekolah, (4) kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar, alat-alat pelajaran, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan dalam pendidikan, (5) kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

Dalam proses belajar mengajar kedudukan kurikulum sangat penting, yakni kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum bagi siswa, kurikulum bagi guru, kurikulum bagi kepala sekolah, kurikulum bagi orang tua murid, kurikulum bagi sekolah di atasnya, dan kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah.

Kurikulum muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat

relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal. Adapun ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut:

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk: (1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, (2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah, (3) Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat), (4) Meningkatkan kemampuan berwirausaha, dan (5) Lingkup isi/jenis muatan lokal, Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

### **1. 5.3. Kurikulum Muatan Lokal**

Dalam hal ini, beragam pandangan telah dikemukakan sejumlah pakar. Namun, dalam bagian ini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang telah diajukan. Tirtarahajda dan La Sula, sebagaimana di kutip Wasliman (2007) mengungkapkan

bahwa kurikulum muatan lokal adalah “...suatu program pendidikan yang isi dan media dan strategi penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah”<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan isi adalah materi pelajaran yang dipilih dan lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari oleh murid di bawah bimbingan guru guna mencapai tujuan muatan lokal. Media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Jadi isi program dan media penyampaian muatan lokal diambil dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Mulyasa (2009) kemudian menjelaskan bahwa kurikulum muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pendapat ini tampaknya menganggap bahwa kurikulum muatan lokal hanya bisa diakomodasi melalui kegiatan yang terpisah dengan mata pelajaran.<sup>7</sup>

Muatan lokal diorientasikan untuk menjembatani kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan tujuan pendidikan nasional. Dapat pula dikemukakan, mata pelajaran ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (*life skill*).

Dengan demikian, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan

---

<sup>6</sup>Tim Wasliman, *Modul Problematika Pendidikan Dasar*. Bandung: PPs Pendidikan Dasar UPI, 2007 : 3.

<sup>7</sup> Mengenai hal ini lebih lanjut lihat E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009 : 256.

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2006) menjelaskan mata pelajaran muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Lebih jelas lagi agar peserta didik dapat: (a) Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya. (b) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. (c) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Dapat pula dikemukakan, melalui penerapan kurikulum muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan bekal tersebut diharapkan siswa mampu mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya. Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Substansi kurikulum muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi pembentukan sikap yang mencerminkan pengejawantahan nilai-nilai sosio-kultural merupakan bagian penting yang harus diberikan tempat dalam penerapan kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal.

Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan: a) mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; b) membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; c) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta; d) menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan muatan lokal adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sosial dan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Secara khusus tujuan muatan lokal adalah: (a) Peserta didik belajar dengan lebih mudah tentang lingkungan dan kebudayaan di daerahnya serta bahan-bahan yang bersifat aplikatif dan terintegrasi dengan kehidupan nyata. (b) Peserta didik dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar setempat untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. (c) Peserta didik lebih mengenal dan akrab dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya yang terdapat di daerahnya masing-masing. (d) Peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang menunjang pembangunan daerahnya. (e) Peserta didik dapat mengembangkan materi muatan lokal yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi di daerahnya sehingga dapat hidup mandiri, menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (f) Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang

---

<sup>8</sup>Tim Wasliman, *Modul Problematika Pendidikan Dasar*. Bandung : PPs Pendidikan Dasar UPI, 2007: 211; lihat pula Khaeruddin dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007: 7 ; Lihat Pula Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah*. Edisi I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 : 94.

di temukandi sekitarnya. (g) Peserta didik menjadi motivasi untuk ikut melestarikan budaya dan lingkungannya serta terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.<sup>9</sup>

Ruang lingkup muatan lokal antara lain (1) Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Kedaaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya, (2) Lingkup isi atau jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa inggris, kesenian daerah, ketrampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai cirri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Secara umum pengertian muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara khusus muatan lokal adalah program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu.

Berdasarkan pengertian muatan lokal tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu sebagai berikut : (a) Muatan Lokal merupakan suatu program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran. Implikasinya adalah muatan lokal harus disusun secara sistematis, logis, dan terencana yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang dan saling mempengaruhi. Komponen tersebut, antara lain tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan sistem penilaian, dan (b) Muatan Lokal berisi materi atau bahan pelajaran yang bersifat lokal. Implikasinya adalah pengembangan materi atau bahan pelajaran tersebut harus dikaitkan dengan kondisi, potensi, karakteristik, keunggulan dan kebutuhan daerah serta

---

<sup>9</sup> Mengenai hal ini lebih lanjut lihat Esti Ismawati, *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar*. Yogyakarta : Yayasan Obak, 2012 : 10.

lingkungan (alam, sosial, dan budaya) yang dituangkan dalam bentuk mata pelajaran dengan alokasi waktu tersendiri.

### 1. 6. Penelitian Terdahulu

Persoalan mengenai Kabupaten Rejang Lebong telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Namun kajian tentang kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti. Dari beberapa sumber yang pernah menyinggung masalah Kabupaten Rejang Lebong dan dikaitkannya dengan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong yakni Undri dan kawan-kawan (2012) menjelaskan bahwa salah satu bahan kurikulum muatan lokal yang diajarkan di sekolah di Kabupaten Rejang Lebong yakni aksara *Ka-Ga-Nga*. Pengajaran aksara *Ka-Ga-Nga* tersebut diajarkan pada siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Karya Botifar dan kawan-kawan (2009) menjelaskan tentang kurikulum muatan lokal Bahasa Rejang berbasis pendekatan komunikatif di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karya tersebut mengidentifikasi kebutuhan kurikulum bahasa Rejang menurut siswa, guru, dan ahli bahasa Rejang, menyusun kurikulum bahasa Rejang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dan mengetahui uji ahli bahasa Rejang terhadap kurikulum bahasa Rejang. Berdasarkan identifikasi kebutuhan menurut siswa, guru, dan ahli bahasa Rejang disusun kurikulum bahasa Rejang yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip, landasan, tujuan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum ini berjumlah delapan standar kompetensi yaitu: (a) pemahaman kosakata dalam teks percakapan, (b) penyampaian informasi dengan pelafalan yang tepat, (c) pemahaman ragam teks percakapan, (d) pengungkapan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan *Ka Ga Nga*, (e) pengapresiasian dongeng rakyat Rejang, (f) pengekspresian pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita, (g) pembacaan teks bacaan sastra melalui membaca nyaring, dan (h) pengekspresian pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pantun dan cerita.

Karya Safri dan kawan-kawan (1994) tentang studi eksplorasi tentang pelaksanaan muatan lokal kurikulum Sekolah Dasar di Propinsi Bengkulu. Karya

tersebut memperoleh gambaran mengenai perumusan tujuan, penentuan bahan, pelaksanaan belajar mengajar dan pelaksanaan evaluasi yang berkaitan dengan muatan lokal kurikulum sekolah dasar di Propinsi Bengkulu. Sebagai sampel adalah guru-guru yang dapat memberikan informasi bagi yang telah melaksanakan muatan lokal di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya muatan lokal kurikulum SD di 4 daerah adalah untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Bengkulu sebagai aset daerah dalam menunjang pembangunan nasional, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada murid-murid SD dalam memenuhi tujuan hidupnya melalui kegiatan membuat kain besurek (wilayah kotamadya), kegiatan pertanian (Bengkulu Utara), anyam-anyaman (Bengkulu Selatan) dan bahasa Rejang (Kabupaten Rejang Lebong). Bahan muatan lokal menggunakan fakta-fakta yang ada di daerah dengan memperhatikan kondisi alam sosial dan kebudayaan khas daerah setempat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk dimasukkan sebagai program sekolah, hanya saja tidak dikaitkan dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran muatan nasional. Strategi atau pelaksanaan belajar mengajar pada umumnya dilaksanakan melalui pendekatan konsep dan pendekatan pelatihan, lingkungan, kepustakaan dan pragmatis; dengan melibatkan metode pengajaran, ceramah, eksperimen, diskusi, tugas, kerja kelompok, observasi dan demonstrasi. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan, baik penilaian formatik maupun sumatif untuk mengetahui penguasaan dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor, yang dilakukan melalui tes tertulis, lisan dan tindakan.

Karya Wakhidi dan kawan-kawan (1994) tentang muatan lokal oleh Guru-guru SD di Propinsi Bengkulu : studi eksploratif tentang muatan lokal oleh guru-guru SD di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Karya tersebut menjekaskan bahwa mayoritas guru-guru SD di Propinsi Bengkulu, baik di kota maupun di desa belum memahami sepenuhnya arti dan makna kurikulum muatan lokal. Muatan lokal yang wajib dilaksanakan di daerah perkotaan adalah kain basurek. Sedangkan untuk daerah pedesaan adalah anyam-anyaman di samping pertanian, perikanan, kesenian daerah, dan kain basurek. Khusus di daerah Kabupaten Rejang Lebong disepakati bahwa bahasa Rejang merupakan program wajib muatan lokal daerah. Guru-guru SD

mayoritas belum dikaitkan dalam mengajarkan muatan lokal (pokok bahasan/sub pokok bahasan) dengan lingkungan alam, sosial dan budaya daerah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Namun mereka sama-sama punya pandangan bahwa muatan lokal dapat menambah wawasan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan/memanfaatkan lingkungan tersebut. Tidak ada hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kurikulum tersebut seperti kurangnya dana, tenaga terampil yang profesional, prosedur birokrasi/kerjasama pemanfaatan tenaga PPL, koperasi, BLK, dan lain sebagainya. Disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal khususnya di Propinsi Bengkulu belum dilaksanakan secara penuh.

Posisi penelitian ini dari penelitian terdahulu yang pernah mengkaji, yakni penelitian ini memfokuskan tentang kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya proses penyusunan, pelaksanaan pembelajaran dan faktor yang mendorong dan menghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perspektif sejarah. Sebuah daerah yang sampai sekarang ini masih menerapkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

### 1. 7. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah akan melalui empat tahapan penting yakni *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber. *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan *keempat*, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis.<sup>10</sup>

Dalam pengumpulan sumber dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*), studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan pada Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Rejang Lebong di Curup, Arsip dan Perpustakaan Provinsi

---

<sup>10</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985 : 32 ; lihat juga Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1999 : 89.

Bengkulu di Kota Bengkulu, Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup di Curup, Kantor Badan Mausyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Perpustakaan Universitas Bengkulu di Kota Bengkulu, Biro Pusat Statistik Kota Bengkulu di Kota Bengkulu, Biro Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong di Curup, dan lainnya.



Foto 1

FGD Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu  
Perspektif Sejarah (Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Foto 2

Pengumpulan data lapangan penelitian Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Perspektif Sejarah (Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis tentang keadaan masyarakat digunakan sumber wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah siswa-siswi, guru, kepala sekolah, anggota komite sekolah, pengawas sekolah, anggota BMA (Badan Musyawarah Adat), tokoh adat, penulis buku muatan lokal, dan lainnya. Informan kunci (*key informant*) seperti siswa-siswi, guru, kepala sekolah, komite sekolah, penulis buku muatan lokal, pengawas sekolah dan lainnya. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak pemerintah seperti kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan lainnya. Hasil wawancara tersebut dilakukan pengujian data. Pengujian data akan dilakukan dengan wawancara silang guna mendapatkan data yang orisinal.

Tahap *kedua*, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (*otentisitas sumber*) sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (*kredibilitas sumber*). Tahapan ini, melakukan kritik terhadap pendapat yang berbeda baik melalui tulisan sejarawan ataupun sumber

lisan berupa wawancara antara pencerita yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga melakukan studi komparatif melalui arsip-arsip tertulis, dan buku kurikulum muatan lokal. Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian. Pada akhirnya fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituliskan secara integral dalam suatu cerita sejarah. Tentu saja fakta sejarah yang sesuai dan ada relevannya dengan topik yang dibahas.

### **1.8. Struktur Isi Buku**

Secara sistematika struktur buku ini dibagi kedalam 6 (enam) bab. Antara satu bab dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka analisis, penelitian terdahulu, metode penelitian dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang gambaran umum Kabupaten Rejang Lebong. Bab ketiga tentang kebijakan kurikulum muatan lokal. Bab keempat berisi tentang penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong. Bab kelima berisi tentang faktor pendorong dan penghambat proses pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong, serta bab terakhir bab kelima merupakan bab penutup dari semua rangkaian atau ulasan dari bab terdahulu.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 2.1 Letak dan Kondisi Geografis.

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 246.787 jiwa. Ibu kotanya ialah Curup. Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi.

Penduduk asli terdiri dari 2 (dua) suku utama yaitu suku Rejang dan suku Lembak. Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 – 7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C – 30,940C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi

pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 derajat Celcius dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 derajat Celcius.<sup>11</sup>



Peta 1 :  
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  
Sumber : <http://www.rejanglebongkab.go.id>

Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19' – 102°57' Bujur Timur dan 2°22'07'' – 3°31' Lintang Selatan. Batas – Batas administratif Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| Sebelah Utara   | : | Kabupaten Lebong         |
| Sebelah Selatan | : | Kabupaten Kepahiang      |
| Sebelah Timur   | : | Kabupaten Musi Rawas     |
| Sebelah Barat   | : | Kabupaten Bengkulu Utara |

<sup>11</sup> Lebih lanjut lihat Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2013*. Curup : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rejang lebong, 2014.

Tabel 1  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rejang Lebong

| No            | Kecamatan           | Luas              | %     |
|---------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1             | Curup               | 532,13            | 0,35  |
| 2             | Curup Utara         | 5 380,30          | 3,53  |
| 3             | Curup Timur         | 682,23            | 0,45  |
| 4             | Curup Selatan       | 3 142,39          | 2,06  |
| 5             | Curup Tengah        | 4 167,76          | 2,73  |
| 6             | Sindang Kelingi     | 6 068,09          | 3,98  |
| 7             | Sindang Dataran     | 6 231,90          | 4,08  |
| 8             | Kota Padang         | 19 022,47         | 12,47 |
| 9             | Sindang Beliti Ilir | 15 376,89         | 10,08 |
| 10            | Bermani Ulu         | 15 946,84         | 10,45 |
| 11            | Bermani Ulu Raya    | 14 196,98         | 9,30  |
| 12            | Padang Ulak Tanding | 8 056,50          | 5,28  |
| 13            | Binduriang          | 26 441,28         | 17,33 |
| 14            | Sindang Beliti Ulu  | 12 849,97         | 8,42  |
| 15            | Selupu Rejang       | 14 495,94         | 9,50  |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>152 591,67</b> |       |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong

## 2.2 Sejarah Pemerintahan dan Masyarakat <sup>12</sup>

Sejarah dari Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu. Bila kita mencoba kembali melirik sejarah terbentuknya Provinsi Bengkulu, secara garis besar dapat dibagi dalam enam periode , yaitu:

1. Periode I, sebelum tahun 1685 daerah Bengkulu di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang kesultanan Banten. Pada periode ini di wilayah Bengkulu terdapat berbagai kerajaan besar dan kerajaan kecil yang bersifat otonom maupun bagian/federasi dari kerajaan besar di Bengkulu maupun di luar Bengkulu. Kerajaan yang pernah ada yaitu Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Depati Tiang Empat, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, dan Kerajaan Anak Sungai.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Secara umum bahan tentang sejarah pemerinthn dan masyarakat berasal dari Undri dan kawan-kawan, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya : Aksara Ka Ga Nga di Bumi Rafflesia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

<sup>13</sup> Mengenai hal ini lebih lanjut lihat Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu: 1500 – 1990*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996 : 1 – 28. Catatan terkait dapat juga dilihat pada Agus Setiyanto, *Elite Pribumi Bengkulu: perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001; William Marsden. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008; Darwin Susianto, *Menyibak Misteri Bangkahulu*. Yogyakarta: Ombak, 2010.

2. Periode II, tahun 1685 – 1824 daerah Bengkulu di bawah kekuasaan pemerintah Inggris sebagai daerah jajahan. Dengan ditandatanganinya perjanjian Tranktat London pada tahun 1824, maka kekuasaan Inggris berakhir di Bengkulu digantikan oleh Belanda. Sebagai gantinya Inggris mendapat wilayah Singapura sebagai daerah jajahan.

Dalam situs <http://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu> dituliskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

“....British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada *Bencoolen/Coolen* yang berasal dari bahasa inggris "Cut Land" yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Sejak 1713, dibangun benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun demikian, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi...’.

3. Periode III, tahun 1824 – 1942 daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan kolonial Belanda; Sebelum masuknya Jepang pada periode ini wilayah Bengkulu terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotapraja Bengkulu ditambah dengan daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Namun ketika Jepang menguasai Bengkulu, wilayah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang dimasukkan dalam wilayah Keresidenan Palembang dan Lampung (Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. 1993:28).
4. Periode IV, tahun 1942 – 1945 daerah Bengkulu di bawah kekuasaan Jepang;
5. Periode V, tahun 1945 – 1968 daerah Bengkulu telah menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan; Pada periode ini, Bengkulu menjadi sebuah Keresidenan tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1945.
6. Periode VI, tahun 1968 keresidenan Bengkulu melepaskan diri dari wilayah Sumatera Selatan dan menjadi daerah Tk.I Bengkulu. Sebagai Provinsi, Bengkulu daerah tingkat dua (DATI II) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kotamadya Bengkulu).

---

<sup>14</sup> Tulisan lebih lengkap dapat dibaca pada Abdullah Siddik, 1996.

Pada tahun 1967 dengan berlakunya UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968, maka sejak tanggal 18 November 1968 Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi Provinsi Bengkulu dengan ibukota Bengkulu. Sebelum menjadi ibukota provinsi, Bengkulu merupakan kota kecil di bawah pemerintahan Sumatera Selatan dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> sesuai dengan UU No. 6 tahun 1956. Selanjutnya kota kecil tersebut merubah menjadi Kota Praja yang meliputi 4 wilayah kedadukan dengan membawahi 28 kepemangkuan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1957.

Hingga tahun 1980, sistem pemerintahan terutama pada tingkat terendah masih menggunakan sistem pemerintahan tradisional (*marga*) dengan 4 wilayah kedadukan (*marga*). Dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Kota Praja Bengkulu berubah menjadi Kotamadya Bengkulu. Lima tahun kemudian keluar UU No. 5 tahun 1979 yang mengatur sistem pemerintahan desa dan kelurahan, yang dengan sendirinya sistem marga dan pemangku tidak berlaku lagi di Bengkulu diganti dengan sistem pemerintah desa atau kelurahan.

Secara umum di Provinsi Bengkulu didiami oleh suku bangsa sebagai penduduk asli yang mendiami daerah kebudayaannya maupun sebarannya. Suku bangsa tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Suku bangsa Rejang; suku bangsa rejang mendiami wilayah administratif Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiyang, sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Suku bangsa Serawai; suku bangsa Serawai mendiami wilayah administratif Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Suku bangsa Melayu Bengkulu; suku bangsa melayu Bengkulu mendiami wilayah adminitratif Kota Bengkulu
4. Suku bangsa Enggano; suku bangsa enggano mendiami wilayah Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Kecamatan ini merupakan satu pulau terluar Indonesia di bagian barat Bengkulu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Bahan ini berasal dari Undri dan kawan-kawan, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya : Aksara Ka Ga Nga di Bumi Raflesia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

<sup>16</sup> Tentang kebudayaan Enggano lebih jauh bisa dibaca dalam Rois Leonard Arios, dkk. 2003. *Kebudayaan Enggano*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang.

5. Suku bangsa mukomuko; suku bangsa mukomuko mendiami wilayah administratif Kabupaten Mukomuko dan diyakini sebagai hasil akulturasi budaya minangkabau dengan budaya rejang.<sup>17</sup>
6. Suku bangsa Pekal; suku bangsa Pekal mendiami sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang meliputi daerah pesisir dan sebagian dataran tinggi. Suku bangsa ini juga terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko.<sup>18</sup>
7. Suku bangsa Lembak; suku bangsa Lembak mendiami sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Suku bangsa ini juga dapat ditemui di sebagian wilayah Kota Bengkulu dan sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Suku bangsa Kaur; suku bangsa Kaur diyakini sebagai hasil akulturasi antara budaya Besemah di Kota Pagaralam Sumatera Selatan dengan budaya Serawai di Bengkulu Selatan dan Seluma.<sup>19</sup>
9. Besemah atau Pasemah; suku bangsa ini lebih dikenal di wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. Di Propinsi Bengkulu suku bangsa ini mendiami daerah dataran tinggi Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Selatan.
10. Semende, suku bangsa ini berada di daerah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur khususnya di Muara Sahung dan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.<sup>20</sup>

Adapun suku bangsa mayoritas yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong adalah suku bangsa Rejang dan Lembak. Suku bangsa Rejang diyakini sebagai suku bangsa tertua dan terbesar di wilayah Provinsi Bengkulu. Wilayah kebudayaan Rejang meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahyang, sebagian Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Belum ada pendapat yang memastikan asal usul kedatangan orang Rejang di wilayah Propinsi Bengkulu sekarang. Umumnya informasi yang diperoleh lebih

---

<sup>17</sup> Tentang kebudayaan Mukomuko lebih jauh bisa dibaca dalam Eny Christyawati. 2011. *Kebudayaan Orang Mukomuko*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang Press.

<sup>18</sup> Tentang kebudayaan Pekal lebih jauh bisa dibaca Yondri, dkk. 2006. *Identifikasi Kebudayaan Suku Bangsa Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang.

<sup>19</sup> Tentang kebudayaan Kaur lebih jauh bisa dibaca dalam Rois Leonard Arios. 2010. "Identitas Budaya Orang Kaur". *Laporan Penelitian* : BPSNT Padang.

<sup>20</sup> Tentang suku bangsa Semende di Kabupaten Kaur sedikit disinggung pada Arios (2010)

banyak menceritakan tentang kedatangan empat orang biksu ke wilayah Rejang yang memberikan pengajaran kepada masyarakat Rejang. Salah satu hasil penelitian yang coba mengungkap asal usul orang Rejang adalah penelitian oleh Richard Mc Ginn dari Ohio University. Dari penelitiannya yang memfokuskan pada aspek bahasa, meyakini bahwa orang Rejang berasal Bahasa Rejang (purba) adalah anggota subkelompok Bidayũh (Land Dayak) dan turun dari bahasa induk yang disebut Rejang-Bukar-Sadong-Bidayũh Purba. McGinn juga menjelaskan leluhur Rejang itu berasal dari sana atau sekitarnya, yaitu Kalimantan Utara, di bagian selatan dari kota Kuching di Kalimantan (Richard Mc Ginn, 2007).

Menurut McGinn (2007) dalam Undri dan kawan-kawan (2013) bahwa pusat kebudayaan Rejang sekarang justru berada di wilayah Rawas (Kabupaten Musi Rawas sekarang). Hal ini diperkuat dari penelitiannya tentang bahasa Rejang purba justru berada di wilayah Rawas. Sedangkan menurut mitologi Rejang pusat kediaman awal suku bangsa Rejang diyakini berada di Renah Sekalawi yang selanjutnya berubah nama menjadi Lebong. Nama Lebong berawal dari mitologi Binuang Sakti<sup>21</sup>. Diceritakan bahwa pada jaman dahulu ketika Palembang masih bernama Selebar Daun, Bengkulu masih bernama Limau Nipis atau Sungai Serut, dan Lebong masih bernama Pinang Belapis atau Renah Sekalawi. Pada saat ini sistem pemerintahan pada masyarakat Rejang masih sangat sederhana dan dipimpin oleh empat orang Ajai yaitu Ajai Bitang yang berkedudukan di dusun Pelebai, Ajai Begelan Mato di Kutai Belek Tebo, Ajai Siang di Dusun Siang Lakat, dan Ajai Tiea Keteko di Bandar Agung. Pada masa pemerintahan ajai ini datanglah empat orang *Bikhu* (*bikau*, bahasa Rejang) dari Kerajaan Majapahit. Keempat *bikhu* tersebut adalah *bikhu* Sepanjang Jiwo, *bikhu* Bembo, *bikhu* Bejenggo, dan *bikhu* Bermano.

---

<sup>21</sup> Cerita tentang Binuang Sakti cukup populer pada masyarakat Rejang baik yang ada di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiyang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sayangnya tidak seorangpun yang dapat mengenali secara pasti pohon Binuang tersebut termasuk juga lokasi yang pasti peristiwa itu terjadi. Cerita Binuang Sakti juga terdapat dalam tulisan Abdullah Siddik, 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Lihat juga Mohammad Hoesin, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit, 1932. Perihal bahan ini berasal dari Undri dan kawan-kawan, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya : Aksara Ka Ga Nga di Bumi Rafflesia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

Lebih lanjut Undri (2013 :28) menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan *Bikhu* ini masyarakat Rejang semakin maju. Sistem pertanian di ladang dan sawah mulai diperkenalkan, mulai mengenal tulisan (aksara *ka ga nga*)<sup>22</sup>, dan perbaikan terhadap adat istiadat terutama hukum adat *gawah mati* (hukuman mati bagi setiap yang melanggar hukum) yang diganti dengan hukuman denda. Sistem pemerintahan pada masa ini mulai teratur dan terstruktur sehingga masyarakat dapat hidup dengan tentram. Perkembangan dan persebaran suku bangsa Rejang hingga keluar wilayah Bengkulu sehingga sekitar abad ke-17 para pemimpin *petulai* mengadakan pertemuan untuk membicarakan wilayah persebaran kebudayaan suku bangsa Rejang. Pertemuan ini dihadiri oleh para *petulai* dari wilayah Lebong dan keturunan Rejang yang berada di luar Lebong yaitu empat orang pemimpin dari Sindang Empat Lawang, lima orang pemimpin dari Sindang Beliti, tiga orang pemimpin dari Ulu Musi, sebelas orang pemimpin dari Renah Pesisir dan tujuh orang pemimpin dari Renah Ketahun. Dalam keputusan ini disepakati bahwa wilayah kebudayaan Rejang terbagi atas empat *luak* yaitu *luak Lebong*, *Luak Ulu Musi*, *Luak Lembak Beliti*, dan *Luak Pesisir*. Dengan keputusan ini maka terbentuklah Pemerintahan Depati Tiang Empat dengan Rajo Depati.<sup>23</sup>

Menurut beberapa informasi yang diperoleh, baik lisan maupun tulisan, kesatuan masyarakat Rejang dikelompokkan dalam *kutai*.<sup>24</sup> Sistem *kutai* ini masih berlaku hingga masuknya sistem *marga* pada tahun 1861 yang memarjinalkan peranan *kutai* sebagai unit teritorial maupun sebagai unit politik. Menurut Abdullah Siddik sistem *marga* mulai masuk ke Bengkulu pada tahun 1861 yang diterapkan oleh Asisten Residen Belanda J. Walland yang dipindahkan dari Palembang. Sistem *marga*

---

<sup>22</sup> Menurut Mohammad Hoesin (1932), huruf *Ka Ga Nga* (aksara Rencong) sudah dikenal Orang Rejang pada masa pemerintahan Ajai.

<sup>23</sup> Lebih lanjut lihat Undri dan kawan-kawan, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya : Aksara Ka Ga Nga di Bumi Raflesia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

<sup>24</sup> Abdullah Siddik (1980) memakai istilah *kuteui*. Abdullah Sani (1983) memakai istilah *Kutai*, dan pelafalan orang Rejang di Curup adalah *kutei*. Namun perbedaan tersebut tidak mengubah makna.

ini berasal dari Kesultanan Palembang yang merupakan hasil bentuk Sultan Cindeh Balang, 1662 – 1706 (Siddik, 1980:121 dalam Undri dan kawan-kawan, 2010 ; 30).

Menurut Siddik (1996:107) dalam Undri dan kawan-kawan (2010 : 30) bahwa pada tahun 1878, pemerintah Hindia Belanda membentuk struktur pemerintahan baru yang sebelumnya masih berbentuk *afdeling* dengan pimpinannya asisten residen menjadi keresidenan. Dengan demikian struktur tersebut menjadi : (1) *Residen* Bengkulu dipimpin oleh seorang *residen* yang berasal dari orang Belanda; (2) *Residen* Bengkulu dibagi dalam *afdeelingen* dipimpin oleh seorang asisten residen yang berasal dari orang Belanda; (3) *Afdeelingen* dibagi dalam *onderafdeelingen* dipimpin oleh seorang kontrolir yang berasal dari orang Belanda; (4) *Onderafdeelingen* dibagi dalam *distrik* dipimpin oleh seorang *demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*), (5) *distrik* dibagi dalam *onder-distrik* dipimpin oleh seorang *asisten demang* yang berasal dari orang pribumi (*inlander*); (6) *onderdistrik* dibagi dalam *marga-marga* dipimpin oleh seorang *pasirah/pangeran* yang dipilih oleh warga *marga* tersebut; dan (7) *marga* dibagi dalam beberapa *dusun* yang dipimpin oleh *depati* atau *ginde*.

Dengan struktur pemerintahan tersebut, maka wilayah Rejang dan Lebong oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1904 dimasukkan ke wilayah Keresidenan Bengkulu. Dengan surat keputusan No. 20 tanggal 6 Februari 1904, *onderafdeeling* Rejang dan Lebong dan *marga-marga* Sindang Klingi Ulu, Sindang Bliti, Suku Tengah Kepungut, dan Sindang Klingi (termasuk Pasar Ulak Tanding) dari *onderafdeeling* Sindang (*afdeeling* Tebing Tinggi Keresidenan Palembang) dipisahkan dari Keresidenan Palembang, dan menjadi *afdeeling* Rejang dan *afdeeling* Lebong yang dimasukkan dalam Keresidenan Bengkulu (Siddik (1996 : 113 dalam Undri dan kawan-kawan, 2013 : 30).

Menurut Hamengkubowono (2014 :3), suku Rejang termasuk suku dengan populasi terbesar di Provinsi Bengkulu. Beberapa kebudayaan masih terpelihara dengan baik, Mereka tidak mudah menyerap kebudayaan atau apapun dari adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, sampai saat ini kebudayaan masyarakat Rejang masih terbilang asli. Sejak zaman dahulu Suku Rejang memang

telah memiliki adat-istiadat. Karena mayoritas suku Rejang masih mempertahankan kebudayaan mereka, tidak heran jika hukum adat yang berupa denda dan cuci kampung masih dipertahankan hingga sekarang. Suku Rejang sangat memuliakan harga diri, seperti halnya penjagaan martabat kaum perempuan, penghinaan terhadap para pencuri, penyiksaan dan pemberian hukuman denda terhadap pelaku *zina*. Suku Rejang mayoritas adalah penganut agama Islam yang taat. Karena itu, beberapa tradisi adat Rejang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kepercayaan adat masa lalu telah berubah menjadi kepercayaan terhadap ajaran agama Islam. Budaya Suku Rejang juga identik dengan nuansa Islam.

Sebelum tahun 2000 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong hanya 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Kota Padang. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 15 kecamatan yang berarti bertambah 9 kecamatan baru yaitu Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Kerai, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Lebong Atas.

Pada tahun 2003 dilakukan pemekaran kabupaten sehingga wilayah Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah Kabupaten Lebong adalah Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Taba Atas yang selanjutnya menjadi Kecamatan Lebong Atas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Tebat Karai, dan Kecamatan Bermani Ilir. Kecamatan-kecamatan selebihnya menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pada tahun 2007 kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong telah dimekarkan sehingga bertambah 9 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Bliti Ilir, Kecamatan Bliti Ulu, dan Kecamatan Pindurian.

Khusus sekarang ini Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan sebagai berikut :

- 1) Padang Ulak Tanding
- 2) Sindang Beliti Ilir
- 3) Kota Padang
- 4) Selupu Rejang
- 5) Bermani Ulu Raya
- 6) Sindang Kelingi
- 7) Sindang Beliti Ulu
- 8) Bermani Ulu
- 9) Binduriang
- 10) Sindang Dataran
- 11) Curup
- 12) Curup Selatan
- 13) Curup Timur
- 14) Curup Utara
- 15) Curup Tengah

### **2.3 Demografi**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010, jumlah penduduk Rejang Lebong sementara adalah 246.378 orang, yang terdiri atas 125.099 laki-laki dan 121.279 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Rejang Lebong masih bertumpu di Kecamatan Curup Tengah yakni sebesar 13,96 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Curup sebesar 11,40 persen dan Kecamatan Selupu Rejang sebesar 11,15 persen sedangkan kecamatan- kecamatan lainnya di bawah 10 persen. Curup Tengah, Curup, dan Selupu Rejang adalah 3 Kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 34.400 orang, 28.075 orang, dan 27.483 orang.

Kemudian berdasarkan data BPS tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah 250.608 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin

laki-laki sebesar 127.808 sedangkan yang perempuan adalah 122.800 orang. Dari jumlah 250.608 orang penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.422 jiwa merupakan pencari kerja. Jumlah pencari kerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2011 (3.315 orang) mengalami penurunan sebanyak 1.893 orang atau sebesar 57,10%. Secara rinci lebih lanjut dari jumlah pencari kerja terdiri dari 679 orang (47,75 %) laki-laki dan 725 (50,98%) perempuan

Dengan luas wilayah Rejang Lebong sekitar 1.515,76 kilo meter persegi yang didiami oleh 246.378 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Rejang Lebong adalah sebanyak 163 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Curup Tengah yakni sebanyak 10.058 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bermani Ulu Raya yakni sebanyak 68 orang per kilo meter persegi. Secara regional, laju pertumbuhan penduduk Rejang Lebong per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,03 %. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Selupu Rejang adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Rejang Lebong yakni sebesar 2,20 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Bermani Ulu Raya yakni sebesar – 1,20 persen. Kecamatan Curup Tengah walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk masih berada dibawah Kecamatan Sindang Dataran yakni hanya sebesar 0,85 persen. Kecamatan Sindang Beliti Ilir walaupun jumlah penduduknya kedua yang terkecil tetapi laju pertumbuhannya masih di atas laju pertumbuhan penduduk secara regional yakni sebesar 1,37 persen.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Lebih lanjut lihat Biro Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2010. Curup : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2014.

Tabel 2  
Banyaknya Pencari Kerja Yang Mendaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012

| Tingkat Pendidikan     | Laki-laki  | Perem-puan | Jumlah     |
|------------------------|------------|------------|------------|
| ( 1 )                  | ( 2 )      | ( 3 )      | ( 4 )      |
| Belum / tidak tamat SD | -          | -          | -          |
| Sekolah Dasar          | 4          | 2          | 6          |
| SLTP Umum              | 5          | 2          | 7          |
| SLTP Kejuruan          | -          | -          | -          |
| SLTA Umum              | 134        | 74         | 208        |
| SMTA Kejuruan          | 8          | 6          | 14         |
| STM                    | 42         | 1          | 43         |
| SPMA                   | -          | -          | -          |
| Lainnya                | -          | -          | -          |
| Akademi / Sarjana Muda | 88         | 172        | 260        |
| Sarjana                | 180        | 242        | 422        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>461</b> | <b>499</b> | <b>960</b> |

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013.

## 2.4 Mata Pencarian Penduduk

Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia dalam menjalani hidup, dengan memiliki pekerjaan seseorang akan merasa berharga. Selain untuk mencari nafkah, pekerjaan juga merupakan bentuk aktualisasi diri setiap orang.

Berdasarkan data BPS (2013) bahwa mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, buruh tani, buruh swasta, pengrajin, pedagang, petani, montir, penjahit, tukang kayu, sopir, bidang, guru, kontraktor, polisi dan sebagainya. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatera. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara.

## 2.5. Pendidikan

Salah satu tujuan nasional yang diemban oleh pemerintah adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berbagai upaya pemerintah telah banyak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sejauh mana keberhasilan upaya tersebut tercermin di berbagai indikator pendidikan yang dalam dunia pendidikan ada 3 (tiga) yang dapat diangkat sebagai rekayasa dalam kerangka *dispute kualitatif*, yakni sarana belajar, kurikulum dan guru.

Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong bisa dikatakan sudah lengkap, walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Fasilitas pendidikan yang tersedia tersebut meliputi, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi. Meskipun demikian jumlah fasilitas tersebut masih belum proporsional. Jumlah sarana prasarana terbanyak adalah tingkat Sekolah Dasar (61 %), dan Sekolah Menengah Pertama (13 %). Semakin tinggi tingkat pendidikan maka jumlah fasilitas yang ada pun semakin berkurang.<sup>27</sup>

Berdasarkan data BPS Tahun 2013, dilihat dari sisi tingkat pendidikan penduduk maka untuk tamatan S-1 Umum merupakan jumlah pencari kerja terbanyak yaitu 623 orang (43,81%) kemudian diikuti oleh pencari kerja berijazah SMU 332 orang (23,35%) atau sarjana muda sebanyak 286 orang (20,11%). Seperti diketahui pertambahan penduduk dari tahun ketahun biasanya berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Sehubungan dengan itu sudah tentu harus diimbangi dengan lebih meningkatnya jumlah sarana fisik pendidikan maupun tenaga pendidik/guru. tinggi, yaitu : STAIN, UNHAZ KAM Curup, STIA KSM Curup, STIPER Politeknik Rafflesia dan POLTEKES Bengkulu Jurusan Keperawatan dengan jumlah mahasiswa/mahasiswi sebanyak 5.983 orang yang terdiri dari 2.762 mahasiswa dan 3.221 orang mahasiswi.

---

<sup>27</sup> Lebih lanjut tentang hal ini lihat Biro Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2010. Curup : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2014.

Pada tahun 2012 kondisi sekolah negeri dan swasta di daerah ini terdapat 316 buah sekolah dengan rincian sebagai berikut ; TK 37 buah dengan jumlah guru 220 orang dan murid 1.923 siswa ; SD 184 buah dengan jumlah guru 1.680 orang dan murid 34.301 siswa; SLTP 54 buah dengan jumlah guru, orang dan murid 12.800 siswa ; SLTA 31 buah dengan jumlah guru sebanyak 839 orang dan siswa sebanyak 9.272 orang.

Tabel 3  
Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan & Kecamatan  
Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 –2012

| Tingkat/Jenis<br>( 1 ) | 2011<br>(2) | 2012<br>(3) |
|------------------------|-------------|-------------|
| T K/RA                 | 37          | 43          |
| S D/MI                 | 194         | 194         |
| SLTP/MTs               | 55          | 54          |
| SLTA/MA                | 17          | 17          |
| SMK                    | 13          | 13          |
| Jumlah                 | 316         | 321         |

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013 : 81

Berdasarkan banyaknya sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4  
Banyaknya Sekolah Negeri Menurut  
Tingkat/Jenis Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012

| Kecamatan<br>( 1 )  | T K<br>( 2 ) | RA<br>( 3 ) | S D<br>( 4 ) | MI<br>( 5 ) | SLTP<br>( 4 ) | MTS<br>( 6 ) | SLTA<br>( 7 ) | MA<br>( 8 ) | SMK<br>( 9 ) |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| Kota Padang         | -            | -           | 11           | 1           | 2             | -            | 1             | -           | -            |
| P,U, Tanding        | 1            | -           | 20           | -           | 4             | 1            | -             | -           | 1            |
| Sindang Kelingi     | -            | -           | 13           | -           | 3             | -            | 1             | -           | -            |
| C u r u p           | 1            | -           | 15           | -           | 2             | -            | 1             | 1           | 1            |
| Bermani Ulu         | -            | -           | 10           | -           | 2             | 1            | 1             | -           | -            |
| Selupu Rejang       | 1            | -           | 16           | -           | 4             | -            | 1             | -           | 1            |
| Sindang Beliti Ilir | -            | -           | 9            | -           | 3             | -            | 1             | -           | -            |
| Binduriang          | -            | -           | 7            | 1           | 1             | -            | 1             | -           | -            |
| Sindang Beliti Ulu  | -            | -           | 12           | -           | 3             | -            | -             | -           | -            |
| Sindang Dataran     | -            | -           | 9            | -           | 2             | -            | -             | -           | -            |
| Curup Utara         | -            | -           | 8            | 1           | 2             | -            | 1             | -           | -            |
| Curup Selatan       | -            | -           | 11           | -           | 2             | -            | 1             | -           | 1            |

|                  |   |   |     |   |    |   |    |   |   |
|------------------|---|---|-----|---|----|---|----|---|---|
| Curup Tengah     | - | - | 10  | - | 2  | - | 1  | - | 2 |
| Curup Timur      | - | - | 11  | - | 3  | - | 1  | - | - |
| Bermani Ulu Raya | - | - | 10  | 1 | 2  | - | -  | - | 1 |
| Jumlah           | 3 | - | 172 | 4 | 37 | 2 | 10 | 1 | 7 |

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013 : 82

Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2011 banyaknya guru yang mengajar yakni sebanyak 3.807 orang dan tahun 2012 sebanyak 3.905 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel 5  
Banyaknya Guru Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong  
Tahun 2011 – 2012

| Tingkat / jenis | 2011         | 2012         |
|-----------------|--------------|--------------|
| ( 1 )           | (2)          | (3)          |
| TK/RA           | 220          | 279          |
| SD/MI           | 1 680        | 1 823        |
| SLTP/MTs        | 1 068        | 873          |
| SLTA/MA         | 464          | 627          |
| SMK             | 375          | 303          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>3 807</b> | <b>3 905</b> |

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013 : 86

Di tinjau dari segi banyaknya murid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yakni tahun 2011 sebanyak 58.296 orang siswa dan tahun 2012 sebanyak 51.673 orang siswa. Adapun jenjang yang paling banyak yakni SD/MI yakni sebanyak 34.301 (t2011) dan 26.200 (2012). Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel 6  
Banyaknya Murid Menurut Tingkat/Jenis Pendidikan Di Kabupaten  
Rejang Lebong Tahun 2011 – 2012

| Tingkat / jenis<br>( 1 ) | 2011<br>(2)   | 2012<br>(3)   |
|--------------------------|---------------|---------------|
| TK                       | 1 923         | 2 246         |
| SD/MI                    | 34 301        | 26 200        |
| SLTP/MTs                 | 12 800        | 13 226        |
| SLTA                     | 5 568         | 6 204         |
| SMK                      | 3 704         | 3 797         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>58 296</b> | <b>51 673</b> |

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013  
: 87

Sedangkan jumlah sekolah, guru dan murid pada tingkat pendidikan di  
Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7  
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Rejang  
Lebong Tahun 2011 dan 2012

| Uraian<br>(1) | 2011<br>(2) | 2012<br>(3) |
|---------------|-------------|-------------|
| TK/RA         |             |             |
| -Sekolah      | 37          | 43          |
| -Guru         | 220         | 279         |
| -Murid        | 1 923       | 2 246       |
| SD/MI         |             |             |
| - Sekolah     | 194         | 194         |
| - Guru        | 1 680       | 1 823       |
| - Murid       | 34 301      | 26 200      |
| SLTP/MTS      |             |             |
| - Sekolah     | 54          | 54          |
| - Guru        | 1 068       | 873         |
| - Murid       | 12 800      | 13 226      |
| SLTA/MA       |             |             |
| - Sekolah     | 18          | 17          |
| - Guru        | 464         | 627         |
| - Murid       | 5 568       | 6 204       |
| SMK           |             |             |
| -Sekolah      | 14          | 13          |
| -Guru         | 375         | 303         |

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| -Murid | 3 704 | 3 797 |
|--------|-------|-------|

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2013  
: 103

### BAB III

## KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

### 3.1. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal oleh Pemerintah Pusat

Kurikulum muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Menelusuri tentang kebijakan muatan lokal tidak terlepas dari sejarah pendidikan pada umumnya dan kurikulum khususnya. Ditelusuri lebih lanjut bahwa persoalan kurikulum tidak terlepas dari persoalan tatanan sosial politik. Menurut Sanjaya (2007 :207) bahwa kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada tiga sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. *Pertama*, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan perantren. *Kedua*, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk

dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut :

- 1) Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melanjutkan ke Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau *Mulo* Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki *HIS Inlandsche School* selama 7 tahun, *Mulo* selama 3 tahun, dan *Algemene Middlebare School* (AMS) selama 3 tahun.
- 2) Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, *Hollandch Chinese School* (HCS) yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke *Mulo*.
- 3) Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu *Eropese Legere School* 7 (tahun), sekolah lanjutan *HBS* (3 dan 5 tahun), *Lyceum* (6 tahun), *Maddelbare Meisjeschool* (5 tahun), *Recht Hoge School* (5 tahun), Sekolah kedokteran tinggi (8,5 tahun), dan kedokteran gigi (5 tahun).<sup>28</sup>

Pada awalnya, menurut Ali (1987: 1) menjelaskan kurikulum sekolah termasuk kurikulum muatan lokal pada tingkat yang bersifat universal, yaitu kurikulum nasional mempunyai dampak yang nyata terhadap sistem pendidikan dan sistem sosial suatu negara. Demikian pula terjadi pada kurikulum sekolah di negara kita. Karena dengan kurikulum dapat diupayakan terbentuknya kepribadian bangsa

---

<sup>28</sup> Persoalan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia berasal dari Soedijarto dan kawan-kawan Edisi Tahun 2010, *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

sesuai yang diidealisasikan. Pada tingkat yang lebih rendah, untuk kepentingan sekelompok masyarakat atau golongan tertentu pun kurikulum dapat dijadikan alat membentuk kepribadian anak serta mengenal daerahnya, seperti yang tertuang dalam muatan lokal tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya pemerintah secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Tiga tahun setelah Indonesia merdeka mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan “Rencana Pelajaran” Tahun 1947. Kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih pada masa orde baru.

Mencermati hal tersebut maka pemerintah Republik Indonesia merasa perlu untuk menguatkan kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedangkan pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987.

Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, yakni :

### **Rencana pelajaran 1947**

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah *leer plan*. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang *curriculum* (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis : dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana

Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai *development conformism* lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.<sup>29</sup>

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok :

- 1) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya
- 2) Garis-garis besar pengajaran (GBP)

Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikira dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku (*value, attitude*), meliputi :

1. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat
2. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari
3. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utam kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah *leer plan* tersebut seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang *curriculum* (bahasa Inggris).

Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Rencana

---

<sup>29</sup> Bahan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia berasal dari [http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi\\_Bahan\\_Ajar\\_Cetak/BAC\\_Pengkur\\_SD/unit-4\\_perkembangan\\_kurikulum\\_.pdf](http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BAC_Pengkur_SD/unit-4_perkembangan_kurikulum_.pdf) diakses tanggal 15 November 2014 Pukul 10.00 Wib.

Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Setelah rencana pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

### **Rentjana Pelajaran Terurai 1952.**

Kurikulum tersebut diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :

- 1) Daya cipta
- 2) Rasa
- 3) Karsa
- 4) Karya
- 5) Moral.

Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi.

- 1) Moral
- 2) Kecerdasan

- 3) Emosional/artistik
- 4) Keprigelan (keterampilan)
- 5) Jasmaniah.

Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran”. Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.

Mata Pelajaran yang ada pada Kurikulum 1954 yakni untuk jenjang Sekolah Rakyat (SD) menurut Rencana Pelajaran 1947 adalah sebagai berikut.

- 1) Bahasa Indonesia
- 2) Bahasa Daerah
- 3) Berhitung
- 4) Ilmu Alam
- 5) Ilmu Hayat
- 6) Ilmu Bumi
- 7) Sejarah
- 8) Menggambar
- 9) Menulis
- 10) Seni Suara
- 11) Pekerjaan Tangan
- 12) Pekerjaan keputrian
- 13) Gerak Badan
- 14) Kebersihan dan kesehatan
- 15) Didikan budi pekerti
- 16) Pendidikan agama

### Kurikulum Rencana Pendidikan 1964

Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (*problem solving*).

Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah : bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

Rencana Pendidikan 1964 melahirkan Kurikulum 1964 yang menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena lima kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari sabtu sebagai hari krida. Maksudnya, pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia pancasila yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS Nomor II tahun 1960.<sup>30</sup>

Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10 – 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas II hingga VI tetap menggunakan skor 10 – 100. Kurikulum 1964 bersifat *separate subject curriculum*, yang memisahkan mata

---

<sup>30</sup> Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2007.

pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana). Mata Pelajaran yang ada pada Kurikulum 1968 adalah :

#### I. Pengembangan Moral

- 1) Pendidikan kemasyarakatan
- 2) Pendidikan agama/budi pekerti

#### II Perkembangan kecerdasan

- 1) Bahasa Daerah
- 2) Bahasa Indonesia
- 3) Berhitung
- 4) Pengetahuan Alamiah

#### III Pengembangan emosional atau Artistik

- 1) Pendidikan kesenian

#### IV Pengembangan keprigelan

- 1) Pendidikan keprigelan

#### V Pengembangan jasmani

- 1) Pendidikan jasmani/Kesehatan

### **Kurikulum 1968**

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada

pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 lahir dengan pertimbangan politik ideologis. Tujuan pendidikan pada kurikulum 1964 yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis Indonesia diberangus, pendidikan pada masa ini lebih ditekankan untuk membentuk manusia pancasila sejati.

Kurikulum 1968 bersifat *correlated subject curriculum*, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada tiga kelompok besar: pembinaan pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya 9, yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja.

Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode pembelajarn ini adalah metode eja ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada mata pelajaran lain, “anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu”. Struktur kurikulum 1968 adalah sebagai berikut :

#### I. Pembinaan Jiwa Pancasila

- 1) Pendidikan agama
- 2) Pendidikan kewarganegaraan
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) Bahasa Daerah
- 5) Pendidikan olahraga

#### II. Pengembangan pengetahuan dasar

- 1) Berhitung
- 2) IPA
- 3) Pendidikan kesenian
- 4) Pendidikan kesejahteraan keluarga

### III Pembinaan kecakapan khusus

#### 1) Pendidikan kejuruan

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari *Pancawardhana* menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.<sup>31</sup>

#### **Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994)**

Setelah Indonesia memasuki masa orde baru maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan dari “Rencana Pelajaran” menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua, sejak sekolah yang pertama dulu berdiri. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perenalisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi yang baru.

Menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. kurikulum subjek akademik tidak berarti terus

---

<sup>31</sup> Bahan ini berasal dari Soedijarto dan kawan-kawan Edisi Tahun 2010, *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

tetap hanya menekankan materi yang disampaikan, dalam sejarah perkembangannya secara berangsur-angsur memperhatikan juga proses belajar yang dilakukan peserta didik. Proses belajar yang dipilih tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Semua proses pembelajaran diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum ini mulai dikembangkan sejak tahun 1975 hingga 1984.

### **Kurikulum 1975**

Sejak Tahun 1969 di Negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional, yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaharuan itu adalah : **(a)** Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. **(b)** Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi : “Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan. **(c)** Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional. **(d)** Adanya inovasi dalam system belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. **(e)** Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku. Kemudian pada Kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka dibentuklah kurikulum tahun 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan orde baru dengan program Pelita dan Repelita.

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut :

- 1) Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
- 2) Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
- 3) Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
- 4) Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
- 5) Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*). Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Kurikulum 1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur : (1) Tujuan institusional. Berlaku mulai SD, SMP maupun SMA. Tujuan Institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya. (2) Struktur Program Kurikulum. Struktur program adalah kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah. (3) Garis-Garis Besar Program Pengajaran Sesuai dengan namanya, Garis-Garis Besar Program Pengajaran. Pada bagian ini dimuat hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yaitu : (a) Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan. (b) Tujuan Instruksional Umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap

satuan pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun. (c) Pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan (d) Urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester satu ke semester berikutnya. (4) Sistem Penyajian dengan Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). Sistem PPSI ini berpandangan bahwa proses belajar-mengajar sebagai suatu system yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem instruksional inilah yang merupakan pembaharuan dalam system pengajaran di Indonesia.<sup>32</sup>

Mata Pelajaran dalam Kurikulum tahun 1975 adalah :

- 1) Pendidikan agama
- 2) Pendidikan Moral Pancasila
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) IPS
- 5) Matematika
- 6) IPA
- 7) Olah raga dan kesehatan
- 8) Kesenian
- 9) Keterampilan khusus

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan, Kurikulum 1975 juga menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan

---

<sup>32</sup> Bahan ini berasal dari Bahan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia berasal dari [http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi\\_Bahan\\_Ajar\\_Cetak/BAC\\_Pengkur\\_SD/unit-4\\_perkembangan\\_kurikulum\\_.pdf](http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BAC_Pengkur_SD/unit-4_perkembangan_kurikulum_.pdf) diakses tanggal 15 November 2014 Pukul 10.00 Wib.

belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

### **Kurikulum 1984**

Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.

Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya adalah sebagai berikut : (1) Terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung kedalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. (2) Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. (3) Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya disekolah. (4) Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. (5) Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk Pendidikan Luar Sekolah, dan (6) Pengadaan program studi baru (seperti di SMA) untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja.

Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut (1) *Berorientasi kepada tujuan instruksional*. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. (2) *Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA)*. CBSA bertolak dari anggapan bahwa siswa memiliki potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mereka diberi banyak kesempatan untuk berpikir sendiri. Oleh karena itu maka cara memandang dan

menyikapi tugas guru harus berorientasikan bukan lagi sebagai sang mahatahu yang siap untuk memberi kebijaksanaan (Hasibuan, 1995:10). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. (3) *Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral*. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. (4) *Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan*. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. (5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks, dan (7) Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar-mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran.<sup>33</sup>

Kalau pada Kurikulum 1975 terdapat delapan pelajaran inti, pada Kurikulum 1984 terdapat enam belas mata pelajaran inti. Mata pelajaran yang termasuk kelompok inti tersebut adalah : Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia,

---

<sup>33</sup> Lebih lanjut tentang persoalan Kurikulum Tahun 1984, khususnya tentang Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Lebih lanjut lihat Hasibuan. *Proses belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Geografi Indonesia, Geografi Dunia, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan Nasional.

Setiap kurikulum tentu memiliki kelebihan dan kekurangan . Kelebihan yang dimiliki akan tetap dipertahankan, sedangkan kekurangan yang ada akan diperbaiki dan disempurnakan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984 menurut Masliana (2012) dan Radicks (2012) adalah sebagai berikut : (1) Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. (2) Keterlibatan siswa di dalam kegiatan- kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas dan keberanian mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas, (3) Anak dapat belajar dari pengalaman langsung, dan (4) Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Sedangkan kelemahan yang dimiliki kurikulum 1984 adalah sebagai berikut: (1) Banyak sekolah yang mensalahtafsirkan metode CBSA. Mereka beranggapan diskusi yang dilakukan menjadikansuasana gaduh di ruang kelas. (2) Guru dan siswa mengalami ketergantungan pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. (3) Proses pembelajaran hanya didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. (4) Guru berperan sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Selain itu, guru kurang komunikatif dengan siswa, dan (5) Materi pelajaran tidak tuntas dikuasai siswa karena diperlukan waktu yang banyak dalam pembelajaran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Lihat Masliana. 2012. *Kelemahan dan Kelebihan Masing-masing Kurikulum 1975-2006*. Diakses dari <http://liana-masliana.blogspot.com/2> dan Radicks. 2012. *Karakteristik, Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Dari Tahun 1968 Sampai Tahun 2006*. dari <http://kupaskepote.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 15 November 2014 Pukul 11.00 Wib

### **Kurikulum 1994<sup>35</sup>**

Menurut Soedijarto dan kawan-kawan (2010 : 64) bahwa pada tahun 1989 Kurikulum 1984 telah diimplementasikan selama kurang lebih 5 tahun. Selama dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang berfungsi menyiapkan generasi muda untuk dapat berperan dimasa datang setelah lulus atau tamat menjadi sorotan masyarakat. Isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, antara lain: (1) mutu pendidikan yang belum sesuai dengan harapan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan yang belum merata; (3) beban belajar yang memberatkan peserta didik; (4) kualifikasi dan kemampuan guru yang belum yang belum sesuai; (5) kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu pengimplementasian Kurikulum 1984, telah diadakan pengkajian terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah satu komponen Kurikulum 1984, yaitu Program B yang dimasukkan bagi peserta didik yang dikarenakan kemampuan dan/atau minatnya akan memasuki dunia kerja setelah lulus, pelaksanaannya ditunda akibat belum siapnya sarana pendukung serta ketersediaan dan kesiapan tenaga di lapangan. Pada tahun 1989 telah ditetapkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor: Tentang Pendidikan Menengah menjadi dasar dalam penyempurnaan pendidikan, khususnya kurikulum. Sementara Kurikulum 1984 berjalan, dalam kurun waktu tersebut terjadi perkembangan perubahan jaman yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut: (1) Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. (2) Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang

---

<sup>35</sup> Bahan mengenai penjelasan tentang Kurikulum Tahun 1994 berasal dari Soedijarto dan kawan-kawan Edisi Tahun 2010, *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran dan isi). (3) Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban *konvergen*, *divergen* (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban) dan penyelidikan. (5) Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. (6) Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. (7) Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (*content oriented*), di antaranya sebagai berikut : (1) Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ substansi setiap mata pelajaran. (2) Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

Permasalahan di atas saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu:

- Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.
- Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
- Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi pembelajaran, evaluasi dan sarana-prasarana termasuk buku pelajaran.
- Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah.

Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tentang otonomi daerah.

Pada era ini kurikulum yang dikembangkan diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap serangkat

kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab. Adapun karakteristik KBK menurut Depdiknas (2002) adalah sebagai berikut: (1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. (2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman. (3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. (4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. (5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Adapun yang menjadi latar belakang diberlakukannya kurikulum 1994 adalah sebagai berikut : (1) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamalkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan, dan (3) Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang

pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut : (1) Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan . (2) Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi). (3) Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan. (5) Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. (6) Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. (7) Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanja ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara pendekatan proses. Sayangnya, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

### **Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP (2004/2006)**

Pemikiran yang melandasi mengenai pengembangan kurikulum 2004 tidak dapat dilepaskan dengan konteks reformasi pendidikan nasional yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomo: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjadi acuan dan sumber mereformasi pendidikan nasional yang mencakup seluruh komponen dalam sistem pendidikan nasional, termasuk kurikulum.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK (kurikulum Berbasis Kompetensi). Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, diantaranya UU No 2 1999 tentang pemerintahan daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dan Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar, proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru, yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir, dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.<sup>36</sup>

Penyusunan “Kurikulum 2004” yang berdasarkan pada kompetensi dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan masyarakat berupa harapan agar pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik menjadi kompeten dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan pribadinya serta kehidupan sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Dalam “Kurikulum 2004”, kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini diharapkan siswa memahami, menguasai,

---

<sup>36</sup> Lebih lanjut lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dan Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional.

dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari materi-materi yang telah dipelajarinya. Adapun kompetensi sendiri diklasifikasikan menjadi: kompetensi lulusan (dimiliki setelah lulus), kompetensi standar (dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran), kompetensi dasar (dimiliki setelah menyelesaikan satu topik/konsep), kompetensi akademik (pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan), kompetensi okupasional (kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja), kompetensi kultural (adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia), dan kompetensi temporal (memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa).<sup>37</sup>

Kemudian secara umum kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pebelajar, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002:3). Kerangka dasar KBK dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002:3

<sup>37</sup> Soedijarto dan kawan-kawan Edisi Tahun 2010, *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL.

*Standar isi* adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, Beban belajar, Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan Kalender pendidikan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau

---

<sup>38</sup> Mengenai perihal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih lanjut lihat Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Mulyasa (2006: 151-153) adalah sebagai berikut : (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis sehingga perlu disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik. (2) Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan

---

<sup>39</sup> Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan).

keragaman peserta didik, kondisi daerah dengan tidak membedakan agama, suku, budaya, adat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. (4) Relevan dengan kebutuhan. (5) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. (6) Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. (7) Belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dan (8) Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat.

Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).<sup>40</sup> KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7) standar penilaian pendidikan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah

---

<sup>40</sup> Lebih lanjut Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyusunan KTSP Lengkap (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SD, SMP dan SMA*. Jakarta; Pustaka Yustisia. 2007.

menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.<sup>41</sup>

Secara substansial, pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), yaitu: (1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. (2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman. (3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. (4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. (5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.<sup>42</sup>

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 (versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya. KTSP 2006, awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap

---

<sup>41</sup> Lebih lanjut lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Lingkup SNP meliputi, standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

<sup>42</sup> Untuk persoalan ini lebih lanjut lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.

Muatan kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian dari muatan kurikulum. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester.<sup>43</sup>

Muatan kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan Mata Pelajaran. Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan landasan keilmuan yang akan dibelajarkan kepada peserta didik sebagai beban belajar melalui metode dan pendekatan tertentu. Misalnya, Mata Pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di SMP adalah terdiri 5 kelompok mata pelajaran, yaitu :

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kelompok mata pelajaran estetika.
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelima kelompok mata pelajaran tersebut terdiri dari 10 mata pelajaran yang meliputi :

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Standar Isi tersebut disusun untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan minimal pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan

4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Ilmu Pengetahuan Alam
7. Ilmu Pengetahuan Sosial
8. Seni Budaya
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Kurikulum 2013**

Kemudian kurikulum terbaru yakni kurikulum tahun 2013, Kurikulum 2013 adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada kurikulum Nasional. Kurikulum 2013 terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam kurikulum KTSP, muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

### **3.2. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

Menurut Soedijarto dan kawan-kawan (2010), kurikulum muatan lokal tidak terlepas dari persoalan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan kenyataan kehidupan bangsa Indonesia. Suatu kenyataan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat, tatacara dan tata krama pergaulan, seni, bahasa lisan dan tulisan yang berbedabeda. Keaneka ragaman itu bukan saja pada kemasyarakatan dan kebudayaan, melainkan juga pada kondisi alam yang menjadi suatu kawasan lingkungan hidup dengan ciri-ciri yang khas pula. Keaneka ragaman baik yang terkait dengan kondisi sosial dan budaya maupun dengan lingkungan alam justru memperkaya kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu diusahakan pelestariannya melalui upaya pendidikan dengan cara mengakrabkan siswa dengan lingkungannya, serta menghindarkan anak dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahawa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal. Lingkup isi/jenis muatan

local dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk:

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah
3. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat)
4. Meningkatkan kemampuan berwirausaha.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedangkan pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987, dan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tertanggal 12 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bahan tentang itu terutama dari Berlian, *Isi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang dan Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Sekolah*

Kemudian penguatan ini dilanjutkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pada Bab VIII Pasal 41 ayat (4) yakni Satuan Pendidikan di Kabupaten mencakup 2 (dua) Komponen, yaitu kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal. Adapun pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Rejang Lebong (Budaya dan Bahasa Rejang).
- b. Muatan Kurikulum lokal setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kemudian pada tanggal 17 September 2009 melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Tim ini bertugas untuk melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal bahasa Rejang bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun tim terdiri dari :

Tabel 8  
Tim Penyusun dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang  
di Kabupaten Rejang Lebong

---

*Dasar di Kabupaten Rejang Lebong. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.*

| NO | NAMA                         | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN<br>DALAM DINAS/INSTANSI                                        |
|----|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                    | 4                                                                      |
| 1  | H.Kadirman                   | Ketua                | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda /<br>Ketua BMA Kab. Rejang Lebong |
| 2  | Drs. Rusli, MM               | Wakil Ketua I        | Kepala Dina Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 3  | Andi Wijaya, SH              | Wakil Ketua II       | Unsur BMA Kab. Rejang Lebong                                           |
| 4  | Santoso, SH,M.Si             | Sekretaris           | Unsur BMA Kab. Rejang Lebong                                           |
| 5  | Drs. A. Donal, MM            | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 6  | M. Pharadis, S.Pd            | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 7  | Drs. Arifin                  | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 8  | Nurningsih, S.Pd             | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 9  | Agus Salim Yusuf, S.Pd       | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 10 | Iskandar, S.Pd               | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 11 | Drs. Jon Bensi               | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 12 | Berlian, S.Pd                | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 13 | Deri Efendi, MA, S.Pd.<br>MM | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 14 | Syahril, S.Pd                | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 15 | Maria Botifar, S.Pd          | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 16 | Linda Liana, A, Ma           | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 17 | Hanafi, S.Pd, MM             | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 18 | Junaidi, S.Pd                | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 19 | Sujirman, M.Pd.I             | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 20 | Drs. Nahdi                   | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |
| 21 | Drs. H. Sudirman Halim       | Anggota              | Unsur Dinas Pendidikan Kab. Rejang<br>Lebong                           |

Sumber : Lampiran Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Penentuan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal akan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan sekolah itu sendiri. Untuk Kabupaten Rejang Lebong salah satu muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa Rejang. Setelah Bahasa Rejang di ajarkan di sekolah dari SD (Sekolah Dasar) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), tantangan kita kedepan adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran bahasa Rejang sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal lebih bermakna dan menarik. Harapan masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Rejang agar melalui pelajaran bahasa Rejang dapat lebih mengangkat nilai-nilai luhur yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Rejang seperti gotong royong, toleransi, kasih sayang, nilai hormat, sopan santun, dan lainnya. Melalui bahasa Rejang, diharapkan dapat mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini.

Bahasa Rejang sebagai pelajaran muatan lokal selama ini telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi tanggal 26 Juli 2003 perihal: kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah agar menyusun kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah untuk memprogramkan mata pelajaran (a) bahasa Rejang atau bahasa Rejang Lembak, (b) aksara *Ka Ga Nga* atau aksara Rikung, (c) kesenian Rejang Lebong, (d) pengenalan alat musik Rejang, dan (e) adat istiadat, kurikulum, adat, serta petatah-petitih yang hidup di masyarakat.

Adanya instruksi Bupati tersebut memberikan kekuatan hukum bagi sekolah untuk terkonsentrasi mengembangkan muatan lokal lebih baik. Namun kenyataannya, pelajaran muatan lokal di sekolah hanya menjadi pelengkap mata pelajaran saja. Tidak diprogramkan menjadi program unggulan sekolah, sehingga proses pembelajarannya lebih diperhatikan. Selama ini, pembelajaran muatan lokal tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berhubungan dengan bahasa Rejang belum

ada. Muatan lokal baru terbatas pada pengenalan aksara *Ka Ga Nga*, yang telah siswa pelajari terlebih dahulu di SD (Sekolah Dasar).

Muatan lokal bahasa Rejang dengan materi yang diajarkan aksara *Ka Ga Nga* berpedoman pada buku aksara *Ka Ga Nga* yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dengan materi ajar yang sangat minim. Pembelajaran ini belum mencakup pada pembelajaran bahasa secara umum. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif, bukan hanya pada aspek pengetahuan bahasa saja.

Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Menurut sejarah, sebelum ada sekolah formal, pendidikan yang berprogram muatan lokal telah dilaksanakan oleh para orang tua peserta didik dengan metode drill dan dengan *trial and error* serta berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka hayati. Tujuan pendidikan mereka terutama agar anak-anak mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Bahan yang diajarkan ialah bahan yang diambil dari berbagai keadaan yang ada di dalam sekitar. Sedangkan kriteria keberhasilannya ditandai mereka telah dapat hidup mandiri. Menurut Dirjen Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat. Menurut Kurikulum 1994 Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran yang diajarkan secara terpisah, menjadi kajian tersendiri.

Menurut Soewardi Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah legenda serta adat istiadat. Dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang berdasarkan usulan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong pada

tanggal 2 September 2009, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Kadirman, SH.M.Si, seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas.<sup>45</sup>

### 3.3. Aksara *Ka Ga Nga* Sebagai Isi Kurikulum Muatan Lokal

Istilah *Ka Ga Nga* sendiri diperkenalkan oleh Jaspan (1964) dalam bukunya *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*.<sup>46</sup> Istilah ini berdasarkan bunyi ketiga aksara pertama yang sangat mirip antara yang satu dengan yang lainnya, yakni *Ka Ga Nga*. Istilah lainpun muncul untuk penyebutan istilah ini selain *Ka Ga Nga*. Menurut Sarwono (2004), dari sumber-sumber Barat kita mengetahui bahwa masyarakat di Bengkulu seperti Rejang, Pasemah, Serawai, dan Lembak pada masa lampau menggunakan tulisan atau aksara daerah untuk menuliskan teks-teks pada naskah-naskah. Tulisan daerah itu disebut aksara *Rencong*, *Ka Ga Nga* atau *Surat Ulu*. Istilah *Rencong* lazim dipergunakan oleh sarjana Belanda. Adapun istilah *Surat Ulu* lazim dipergunakan oleh masyarakat setempat.<sup>47</sup>

Perihal ini lebih lanjut oleh Sarwono (2004:61) dijelaskan bahwa pencermatan terhadap naskah-naskah aksara *Ka Ga Nga* yang tersimpan di berbagai museum dan perpustakaan serta dari sejumlah naskah yang menjadi milik desa/keluarga di beberapa tempat, ditemukan bahwa aksara daerah yang dipergunakan oleh masyarakat Rejang, Pasemah, Serawai, dan Lembak (serta Lintang, Rawas, dan Ogan) dapat

<sup>45</sup> Kadirman, SH.M.Si adalah mantan ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong dan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

<sup>46</sup> Mengenai penamaan terhadap aksara ini, tim penulis memakai penyebutan aksara *Ka Ga Nga*, walaupun terdapat perdebatan untuk penyebutannya terutama pada masyarakat, seperti aksara *Rencong* dan *Surat Ulu*. Melalui berbagai pertimbangan, terutama hasil kesepakatan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong tahun 1983, dimana untuk penyebutan aksara tersebut yakni dengan aksara *Ka Ga Nga*. Untuk penjelasan berikutnya tim penulis memakai aksara *Ka Ga Nga*. Mengenai aksara *Ka Ga Nga* itu sendiri lebih lanjut lihat Jaspan, M.A (M.A. Jaspan), *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*. Canberra : The Australian National University Canberra, 1964.

<sup>47</sup> Paparan sangat baik dilakukan oleh Sarwit Sarwono mengenai Surat Ulu ini terutama di Provinsi Bengkulu. Lebih lanjut tentang hal ini lihat Sarwit Sarwono, "Tradisi Tulis Ulu di Bengkulu : Penulis, Naskah dan Kandungannya" dalam Sarwit Sarwono (ed), *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu : Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu, 2004 halaman 61.

dimasukkan ke dalam satu kelompok, dengan istilah Melayu Tengah. Umumnya naskah-naskah Rejang, Pasemah, Serawai dan Lembak serta Lintang, Rawas dan Ogan ditulis dalam bahasa Melayu. Sebetulnya terdapat perbedaan dengan naskah-naskah yang ada di daerah Lampung dan Kerinci, bahasa yang dipergunakan dalam naskah-naskah tersebut pada umumnya dari masyarakat tersebut, yakni bahasa Lampung dan Kerinci.

Sarwono (2004:66) kemudian lebih jauh menjelaskan bahwa di daerah Bengkulu sendiri, terdapat daerah-daerah atau desa-desa pada masa lampainya sarat sebagai penghasil naskah aksara *Ka Ga Nga*. Daerah atau desa-desa tersebut pada masa lampau merupakan *scriptorium* (pusat penulisan) naskah aksara *Ka Ga Nga*. Daerah Talo misalnya, pernah menjadi pusat penulisan naskah yang produktif, terbukti dari banyaknya naskah yang berasal dari daerah ini. Ditinjau dari perspektif pengkajian atas karakteristik internal maupun eksternal dari naskah-naskah-naskah yang tersimpan di Museum Negeri Bengkulu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta, Perpustakaan Universitas Leiden, serta yang tersimpan sebagai pusaka keluarga atau desa, dapat dikemukakan bahwa pada masa lampau pernah ada desa-desa pada setiap wilayah etnis yang menjadi *scriptorium* naskah aksara *Ka Ga Nga*. Dalam hal ini daerah Talo dapat dinyatakan sebagai salah satu *scriptorium* naskah dari etnis Serawai. Dengan demikian diasumsikan bahwa pada masa lampau ada daerah yang menjadi *scriptorium* naskah aksara Rejang, Lembak, dan Pasemah. Sedangkan ditinjau dari perspektif pelestariannya, Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong merupakan dua daerah yang sangat menarik untuk disigi. Kota Bengkulu sebagai tempat menyimpan paling banyak naskah aksara *Ka Ga Nga*, yakni di Museum Negeri Bengkulu, sedangkan Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah pelestarian aksara *Ka Ga Nga* tersebut. Misalnya dalam pemakaian nama jalan, pihak pemerintah daerah membuat nama jalan dengan menuliskan aksara *Ka Ga Nga* di samping bahasa Indonesia. Begitu juga dengan motif baju seragam pegawai Pemerintah Daerah memakai kain dengan motif aksara *Ka Ga Nga*.

Sekarang ini naskah-naskah aksara *Ka Ga Nga* selain disimpan oleh masyarakat sebagai pusaka keluarga atau desa juga disimpan di Museum Negeri

Bengkulu. Di Museum Negeri Bengkulu terdapat 122 koleksi naskah aksara *Ka Ga Nga*, 99 naskah aksara *Ka Ga Nga* disimpan di ruangan tempat penyimpanan koleksi dan 23 naskah aksara *Ka Ga Nga* ditempatkan di ruangan pameran.<sup>48</sup>

Adapun pelajaran yang diajarkan kepada anak didik di sekolah yakni aksara *Ka Ga Nga* tersebut, yakni : Aksara *Ka-Ga-Nga* terdiri dari huruf tunggal dan huruf jamak, jumlahnya 23 grafem untuk kelompok Rejang dan Lembak, 28 grafem kelompok Pasmah dan Serawai, yang disebabkan lingkungan kebahasaan tempat naskah berasal (Astuti.2000:28) Kelompok Rejang dan Lembak tidak mengenal grafem **mpa**, **nca**, **nta**, **ngka**, dan **ra** karena dalam bahasa mereka tidak ada kosakata yang menggunakan lima alfabet tersebut. Berikut ini disajikan susunan dan bentuk aksara *Ka-Ga-Nga* :

Tabel 9  
Urutan Aksara *Ka-Ga-Nga*  
Kelompok Rejang dan Lembak                      Kelompok Serawai dan Pasmah

| No | Grafem                                                                              | Bunyi | No | Grafem                                                                                | Bunyi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  |  | ka    | 1  |  | ka    |
| 2  |  | ga    | 2  |  | ga    |
| 3  |  | nga   | 3  |  | nga   |
| 4  |  | ta    | 4  |  | ta    |
| 5  |  | da    | 5  |  | da    |
| 6  |  | na    | 6  |  | na    |
| 7  |  | pa    | 7  |  | pa    |
| 8  |  | ba    | 8  |  | ba    |
| 9  |  | ma    | 9  |  | ma    |
| 10 |  | ca    | 10 |  | ca    |
| 11 |  | ja    | 11 |  | ja    |
| 12 |  | nya   | 12 |  | nya   |
| 13 |  | sa    | 13 |  | sa    |
| 14 |  | la    | 14 |  | la    |
| 15 |  | ya    | 15 |  | ya    |

<sup>48</sup> Ada perbedaan jumlah koleksi naskah aksara *Ka Ga Nga*, menurut Muhardi (2009) dan Sarwit Sarwono dan kawan-kawan (2007) menyebutkan bahwa ada 138 koleksi yang berkaitan dengan aksara *Ka Ga Nga*. Namun tim menemui hanya 122 koleksi naskah aksara *Ka Ga Nga* yang ada di Museum Negeri Bengkulu. Lebih lanjut lihat Undri dan kawan-kawan, 2013.

|    |  |      |  |    |  |      |
|----|--|------|--|----|--|------|
| 16 |  | wa   |  | 16 |  | wa   |
| 17 |  | ha   |  | 17 |  | ha   |
| 18 |  | a    |  | 18 |  | a    |
| 19 |  | mba  |  | 19 |  | ra   |
| 20 |  | nda  |  | 20 |  | mba  |
| 21 |  | nja  |  | 21 |  | nda  |
| 22 |  | ngga |  | 22 |  | nja  |
| 23 |  | ngsa |  | 23 |  | ngga |
|    |  |      |  | 24 |  | ngsa |
|    |  |      |  | 25 |  | mpa  |
|    |  |      |  | 26 |  | nca  |
|    |  |      |  | 27 |  | nta  |
|    |  |      |  | 28 |  | ngka |

Sumber Astuti, 2000:29-30 dalam Muhardi, 2009 :55)

Bentuk huruf *Ka-Ga-Nga* yang merupakan paduan garis miring dan tegak lurus ditulis dari kiri ke kanan, dan dilengkapi tiga belas tanda baca yang berfungsi untuk mengubah bunyi vokal, pengganti beberapa konsonan, dan tanda bunuh/mematikan huruf vokal *a*. Misalnya *bitan* (titik bawah ----) untuk mengubah bunyi (*ka*) menjadi (*ku*). Tanda baca tersebut selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 10 : Tanda baca dalam aksara *Ka-Ga-Nga*.

| No | Nama Tanda Baca | Bentuk Tanda Baca | Grafem ka | Diberi tanda baca | Grafem ka menjadi | Merubah bunyi       |
|----|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Luan            | •----             |           |                   | ki                | Bunyi a menjadi i   |
| 2  | Taling          | ˘----             |           |                   | ke'               | Bunyi a menjadi e'  |
| 3  | Mincu           | x----             |           |                   | ko                | Bunyi a menjadi o   |
| 4  | Bitan           | •----             |           |                   | ku                | Bunyi a menjadi u   |
| 5  | Mincak          | ••----            |           |                   | ke                | Bunyi a menjadi e   |
| 6  | Tulung          | ˘˘----            |           |                   | kau               | Bunyi a menjadi au  |
| 7  | Tulang          | ˘˘˘•              |           |                   | kang              | Bunyi a menjadi ang |

|    |         |       |  |  |     |                      |
|----|---------|-------|--|--|-----|----------------------|
| 8  | Dendan  | ---•• |  |  | kan | Bunyi a menjadi an   |
| 9  | Ranting | ---•• |  |  | kam | Bunyi a menjadi am   |
| 10 | Junjung | ---v  |  |  | kar | Bunyi a menjadi ar   |
| 11 | Jinak   | ---•  |  |  | kah | Bunyi a menjadi ah   |
| 12 | Kicu    | ---v  |  |  | kai | Bunyi a menjadi kai  |
| 13 | Bunuh   | ---o  |  |  | k   | Membunuh huruf akhir |

Sumber : Shahid.1990:8-12 dalam Muhardi, 2009 :56

Sejalan dengan kurikulum muatan lokal, yakni kurikulum muatan lokal memunculkan keadaan daerah, adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut yakni aksara *Ka Ga Nga* yang harus diajarkan kepada anak didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan data yang didapat dilaporkan bahwa buku kurikulum muatan lokal yang ada selama ini yakni :

### **Buku *Baso Jang Te* : Bahasa dan Aksara Rejang**

Buku *Baso Jang Te* terdiri dari enam jilid, yakni *Baso Jang Te* Jilid 1 untuk kelas I, *Baso Jang Te* Jilid 2 untuk kelas II, *Baso Jang Te* Jilid 3 untuk kelas III, *Baso Jang Te* Jilid 4 untuk kelas IV, *Baso Jang Te* Jilid 5 untuk kelas V, *Baso Jang Te* Jilid 6 untuk kelas VI. Penulis dari buku ini adalah Indah Sari Kencanawati. Buku tersebut diterbitkan oleh Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.



Foto 3

Salah satu contoh buku *Baso Jang Te* : Bahasa dan Aksara Rejang yang diajarkan di sekolah

Sumber : Dokumentasi Peneliti



### Buku Muatan Lokal Untuk Sekolah Dasar

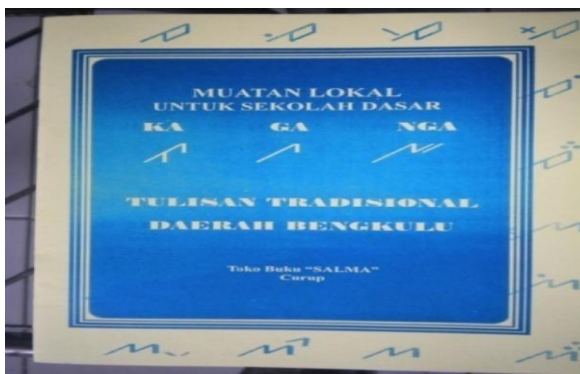


Foto 4

Buku muatan lokal (mulok) *Ka Ga Nga* untuk Sekolah Dasar (Sumber : Tim Peneliti).

Buku Muatan Lokal untuk Sekolah Dasar ini merupakan buku bahan ajar

untuk Sekolah Dasar (SD) berisi tulisan tradisional daerah Bengkulu yakni *Aksara Ka Ga Nga*. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Salma Curup.

### **Buku Belajar Tulis Baca Abjad Ka Ga Nga**

Buku ini dicetak oleh penerbit percetakan Aksara Kaganga Bengkulu. Adapun susunan tim penulis dari buku ini adalah :

#### **Konsultan**

- 1) Abdullah Sani
- 2) H.Z. Arifin Merana
- 3) Muhammad Masil

#### **Pelaksana**

##### **Ketua**

Ramli Achmad SH  
 Tamrin Fajar  
 Drs. Badrul Munir H

##### **Bidang**

##### **Teknis**

1. Abu Syahid, BA
2. Drs. Jon Bensi
3. Drs. Muhardi

##### **Metoda**

1. Drs. Hanafi
2. Drs. Mardansyah
3. Aziz Wahab, BA
4. Carda Amin



### Buku Aksara Ka Ga Nga Untuk Sekolah Dasar

Buku ini disusun oleh Agus Salim Yusuf, BA tahun 2009 pada waktu dia menulis adalah seorang Guru Sekolah Dasar Negeri 09 Curup Timur. Buku ini diperuntukkan bagi siswa Kelas III, IV, V dan VI.

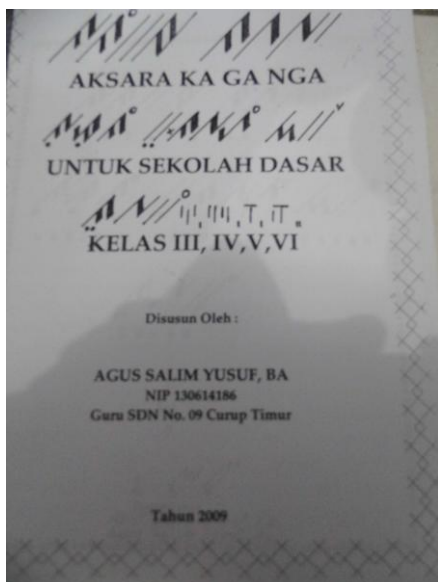


Foto 5

Buku Aksara Ka Ga Ng Untuk SD Kelas III, IV, V dan VI (Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa kurikulum Muatan lokal (mulok) merupakan sebuah bentuk terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem pendidikan dalam rangka memperkenalkan para peserta didik mengenal lingkungannya sendiri, ikut melestarikan budaya daerahnya termasuk kerajinan, keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi di daerahnya.

Muatan lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah, yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi, serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pelestarian lingkungan alam, budaya, dan keterampilan melalui pendidikan di sekolah perlu diawali dengan pengenalan, pemahaman, penguasaan, dan penerapan hingga pembentukan etos kerja.

Muatan lokal sangat diperlukan oleh anak didik. Sejarawan Sartono Kartodisardjo (1982) mengatakan seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengerti dengan lebih baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal.

Dengan demikian pelajaran muatan lokal dalam jangka panjang akan memperjelas identitas dan jati diri setiap daerah dengan segala kearifan lokalnya, hal ini tentu sangat diperlukan dalam rangka otonomi daerah. Dalam arti, daerah memang

membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas yang berbeda dengan daerah lain, tetapi masih dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muatan lokal juga berkenaan dengan pemajuan kebudayaan bukan diarahkan pada kebudayaan saja, tetapi juga pada manusianya. Manusia sebagai pemilik dan pendukung kebudayaan perlu dilakukan pembinaan. Yang dimaksud pembinaan ialah upaya peningkatan kemampuan kecerdasan, kepribadian, kreatifitas dan keterampilan pemilik dan pendukung kebudayaan bangsa. Upaya pembinaan dapat dilakukan antara lain melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal melalui pelatihan, penataran dan bentuk-bentuk lainnya.



Foto 6  
*Baso Jang Te* untuk Kelas V SD dan MI (Sumber : Dokumentasi Tim Peneliti)

Uniknya, informasi yang sangat menarik dari guru yang mengajar muatan lokal, bahwa kurikulum muatan lokal diajarkan ke siswa-siswi terutama di Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pelajaran tersebut memakai buku panduan (seperti foto diatas). Namun di beberapa daerah seperti di Kabupaten Bengkulu Utara, kurikulum muatan lokal aksara *Ka Ga Nga* belum diajarkan pada siswa-siswi di sekolah. Jadi, kurikulum muatan lokal untuk aksara *Ka Ga Nga* di Propinsi Bengkulu belum merata di setiap daerah. Hal ini tergantung kepada kebijakan pemerintah kota/kabupaten yang melaksanakan kurikulum muatan lokal aksara *Ka Ga Nga* tersebut.

### 3.4. Kompetensi Dasar Kurikulum Muatan Lokal

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa lingkup isi atau jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang bersangkutan.

Bahasa Rejang yang diajarkan sebagai bagian kurikulum muatan lokal merupakan bahasa daerah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga, selayaknya pembelajaran bahasa Rejang harus mengacu pada pendekatan komunikatif yang menjadi paradigma pembelajaran di sekolah saat ini, agar menjadi bahan acuan sebagai dasar kompetensi dasar dalam kurikulum muatan lokal tersebut. David Nunan (1991, dalam Mulyati 2008, 2) memberikan rambu-rambu bagi pembelajaran bahasa yang komunikatif melalui karakteristik berikut: (1) penekanan terhadap belajar berkomunikasi melalui interaksi komunikatif; (2) pengenalan teks otentik dalam situasi belajar; (3) memberikan kesempatan untuk belajar bahasa dan manajemen belajar; (4) pemberian pengalaman personal dalam belajar; (5) menunjukkan hubungan antara pembelajaran bahasa di kelas dengan aktivitas berbahasa di luar kelas.

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang disusun mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Materi tingkat SD menjadi pondasi dalam memahami materi tingkat SMP dan SMA. Materi disusun secara hirarki dengan tingkat kemudahan, konkrit, dekat, sampai menuju sulit, abstrak dan jauh. Secara konteks berbahasa lebih difokuskan pada konteks sekolah dan rumah, misal memahami peralatan rumah dalam bahasa Rejang. Inti materi kurikulum berkaitan dengan huruf, kata, kalimat, paragraf, wacana, tanda bunyi, huruf ngimbang, dongeng, sejarah suku Rejang, lagu daerah, pribahasa, cerita rakyat, nasehat, angka bejagung. Aspek berbahasa difokuskan pada empat keterampilan berbahasa yaitu, aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Semua materi berbahasa ditulis dengan menggunakan huruf *Ka, Ga, Nga*.

Sehubungan dengan itu, komponen utama dalam kurikulum muatan lokal adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran

bahasa, sastra, dan budaya Rejang adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang sebagai rukun untuk menyusun indikator kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang terdiri atas kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Rejang. Kompetensi berbahasa dan bersastra diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Rejang didukung oleh kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Rejang sesuai dengan *unggah-ungguh basa*. Kompetensi berbahasa dan bersastra terbagi dalam empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (a) menyimak, (b) berbicara, (c) membaca, dan (d) menulis yang dalam pelaksanaan pembelajaran, empat aspek kompetensi berbahasa dan bersastra ini tidak terpisah satu dengan lainnya, melainkan dilaksanakan secara terpadu.

Berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa kompetensi dasar dalam kurikulum muatan lokal yang diajarkan (**terlampir**).

## **BAB IV**

### **PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL**

#### **4.1. Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal**

Penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di satuan tingkat pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengajarkan kurikulum muatan lokal tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dijelaskan bahwa : Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan

supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- 1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
- 2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
- 3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Merespon hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pada Bab VIII Pasal 41 ayat (4) yakni Satuan Pendidikan di Kabupaten mencakup 2 (dua) Komponen, yaitu kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal. Adapun pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah : Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Rejang Lebong (Budaya dan Bahasa Rejang, dan Muatan Kurikulum lokal setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.

Dorongan pelaksanaan dan pengembangan dari kurikulum muatan lokal ini juga berasal dari Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.<sup>49</sup> Menurut

---

<sup>49</sup> Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang secara struktural terbentuk mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa, hanya merupakan kumpulan elite masyarakat yang hanya mempunyai fungsi konsultatif dengan segala keterbatasannya. Sedangkan eksekusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan adat, hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Jenang Kutei dan atau pemerintahan Desa/Kelurahan. Dalam Pasal 7 anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa tujuan BMA adalah : (1) Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pegong Pakei Adat Lem Kutai Natet, Pancasila serta menjaga kelestariannya. (2) Untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang hidup, tumbuh kembang dalam Kabupaten Rejang Lebong, dengan memperhatikan perkembangan dan kepentingan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (3)

Santoso (2014 :3) bahwa persoalan kurikulum muatan lokal juga menjadi “kegelisahan” di Badan Musyawarah Adat. Kegelisahan mengenai makin beratnya tantangan yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Adat misalnya di ungkapkan oleh Kadirman :

“Faktor internal yang patut di waspadai dan menjadi perhatian khusus yang dapat menjadi faktor penghambat pemberdayaan budaya daerah antara lain, fenomena makin langkanya tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi secara tradisional terhadap budaya, adat-istiadat atau hukum adat Rejang. Kapasitas dan kecendikiaan tokoh-tokoh adat terkubur usia zaman dan sedikit sekali yang dapat terekam dalam dokumen tertulis yang dapat diselamatkan. Budaya lisan yang mendominasi sejarah budaya Rejang tidak dapat seluruhnya ditransfer atau direspon oleh generasi muda yang cenderung menganggap budaya daerah sebagai barang antik, usang dan ketinggalan zaman. Dilain pihak sangat disayangkan para intelektual dan kalangan terpelajar Anak Kutei Jang belum banyak yang berminat meneliti bidang budaya Rejang karena mungkin tidak menjanjikan keuntungan finansial.”<sup>50</sup>

Lebih lanjut Santoso (2014 :6) menjelaskan bahwa berkaitan dengan peranan dan fungsi Badan Musyawarah Adat dalam transformasi nilai budaya melalui pembelajaran muatan lokal, dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dan bahan-bahan yang berkaitan dengan berbagai cabang kesenian, meliputi seni gerak, tari, seni musik, sastra dan bahasa daerah, adat istiadat

---

Pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat Rejang Lebong, mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional serta berwawasan Nusantara. (4) Pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kebudayaan Rejang Lebong untuk meningkatkan peranan nilai-nilainya di daerah terutama di Desa/Kelurahan, guna kesejahteraan rakyat, dan (5) Mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga warga masyarakat merasa terpanggil untuk ikut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

<sup>50</sup> Kadirman (2009) dalam Santoso, *Peran Badan Musyawarah Adat Dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong*. Disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

serta hukum adat. Bahan-bahan dan materi pembelajaran muatan lokal disusun sesuai dengan teknis pembelajaran. Materi dan media pembelajaran muatan lokal di Rejang Lebong sangat memungkinkan dan tersedia untuk di susun sebagai kurikulum. Kekayaan akan seni gerak/tari termasuk didalamnya seni silat Rejang yang tersebar dalam wilayah kecamatan merupakan sumber yang perlu digali dan dikembangkan. Gong kulintang yang sebagian besar telah tersedia di seluruh kecamatan dan sekolah-sekolah, Seni sastra lisan yang masih tersisa dan Bahasa dan Aksara Rejang merupakan bahan pembelajaran yang dapat disusun dalam kurikulum sesuai dengan kaidah-kaidah belajar mengajar.<sup>51</sup>

Hal ini sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong disebutkan bahwa maksud BMA adalah ;

1. Menjunjung tinggi Adat Istiadat Rejang Lebong dalam mencapai pembangunan manusia seutuhnya.
2. Sebagai **wadah Kosultasi**, memberi bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, baik diminta maupun tidak diminta demi kelancaran roda Pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Memupuk kesadaran hukum masyarakat dan disiplin masyarakat Kabupaten Rejang Lebong
4. Memberlakukan Hukum Adat Rejang dengan tidak mengesampingkan ketentuan hukum lainnya.

Menurut Effendi (2014 : 8-13),<sup>52</sup> bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran selalu menyangkut berbagai unsur atau komponen. Menyusun perencanaan muatan lokal juga akan menyangkut berbagai sumber, pengajar, metode,

---

<sup>51</sup> Santoso, *Peran Badan Musyawarah Adat Dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

<sup>52</sup> Bahan ini terutama dari Zakaria Effendi, *Sejarah Proses Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion Penelitian Kurikulum Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang pada tanggal 24-26 Februari 2014

media, dana dan evaluasi. Merencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan antara lain dengan : (1) Mengidentifikasi segala sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan muatan lokal, (2) Menyeleksi bahan muatan lokal dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- 2) Tidak bertengan dengan Pancasila dan aturan adat yang berlaku.
- 3) Letaknya terjangkau dari sekolah.
- 4) Ada nara sumber baik didalam maupun diluar sekolah.
- 5) Bahan/ajaran tersebut merupakan ciri khas daerah tersebut.
- 6) Menyusun GBPP/Kurikulum Muatan lokal yang bersangkutan
- 7) Mencari sumber bahan yang tertulis maupun yang tidak tertulis
- 8) Mengusahan sarana/prasarana yang relevan dan terjangkau.

Lebih lanjut lagi Effendi (2014 : 9) menjelaskan bahwa dalam kurikulum muatan lokal yang diajarkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu adalah tentang bahasa dan aksara Rejang. Bahasa dan Aksara Rejang adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang patut diupayakan penggalan, pengembangan, dan pemeliharaan. Dari 17 aksara dunia, diantaranya adalah aksara Rejang (*Ka-Ga- Nga*) yang merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya, dan terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Rejang.<sup>53</sup> Maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong beserta Dinas Pendidikan Rejang Lebong dan Badan

---

<sup>53</sup> Istilah *Ka Ga Nga* sendiri diperkenalkan oleh Jaspian (1964) dalam bukunya *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*.<sup>53</sup> Istilah ini berdasarkan bunyi ketiga aksara pertama yang sangat mirip antara yang satu dengan yang lainnya, yakni *Ka Ga Nga*. Istilah lainpun muncul untuk penyebutan istilah ini selain *Ka Ga Nga*, walaupun terdapat perdebatan untuk penyebutannya terutama pada masyarakat, seperti aksara Rencong dan Surat Ulu. Melalui berbagai pertimbangan, terutama hasil kesepakatan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong tahun 1983, dimana untuk penyebutan aksara tersebut yakni dengan aksara *Ka Ga Nga*. Untuk penjelasan berikutnya tim penulis memakai aksara *Ka Ga Nga*. Mengenai aksara *Ka Ga Nga* itu sendiri lebih lanjut lihat Jaspian, M.A (M.A. Jaspian), *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*. Canberra : The Australian National University Canberra, 1964.

Musyawarah Adat Rejang Lebong berupaya untuk menyusun Kurikulum Bahasa Rejang yang terprogram dan terstruktur yang berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Kurikulum ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengenal huruf Rejang dan Bahasa Rejang sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam mengajar Bahasa Rejang di sekolah baik dari tingkat dasar sampai dengan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) / SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penyusunan kurikulum tersebut berbagai perdebatan, masukan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang di sampaikan kepada Tim yang berjumlah 21 orang selaku Tim Penyusun sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang tersebut sehingga Tim membuat kesepakatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah.

Adapun langkahlangkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Standar Kompetensi.

Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.

- b) Pengembangan Kompetensi Dasar.

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai.

2. Pengembangan silabus

Dalam pengembangan silabus diberikan keleluasaan kepada guru yang mengajar Muatan Lokal Bahasa Rejang di sekolah masing-masing, mengingat dalam penerapannya disesuaikan dengan tempat dan kondisi

sekolah. Misalnya Guru yang mengajar di wilayah Lembak maka mereka harus menyesuaikan dengan daerahnya. Pengembangan silabus mencakup:

- a) Mengembangkan indikator
- b) Mengidentifikasi materi pembelajaran
- c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
- d) Pengalokasian waktu
- e) Pengembangan penilaian
- f) Menentukan Sumber Belajar

Di Kabupaten Rejang Lebong penyusunan kurikulum muatan lokal dengan mengajarkan bahasa Rejang sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah tidak terlepas dari keberadaan dari bahasa Rejang itu sendiri. Bahasa Rejang merupakan bahasa ibu yang lahir dan berkembang di tanah kelahirannya. Sebagai bahasa ibu, bahasa Rejang pun menjadi bahasa kolokial yang hidup di tengah masyarakat. Ia menjadi bahasa pergaulan, bahasa adat, bahasa budaya dan bahasa keluarga dalam masyarakat setempat.

Proses pendidikan di keluarga, disaranai oleh bahasa Rejang sebagai upaya pewarisan budaya dan pola pikir masyarakat setempat. Perkembangan zaman hari ini, menyebabkan pola pewarisan ini menjadi tersumbat. Bahasa Rejang bersentuhan secara langsung dengan bahasa lain yang juga mengalami tumbuh kembang dalam masyarakat. Bahasa Indonesia, misalnya, sebagai bahasa resmi Negara, bahasa Indonesia selalu bersinggungan dengan bahasa daerah yang ada dalam masyarakat. Begitu juga dengan bahasa lokal yang secara langsung bergesekan dengan bahasa Indonesia. Pilihan masyarakat terhadap kedua bahasa ini akan menggiring kepunahan bahasa yang lain.

Ketertinggalan bahasa Rejang terhadap bahasa Indonesia tidak lagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Prestise yang menggiring sikap berbahasa mengakibatkan bahasa lokal menjadi bahasa yang tertinggal. Orang tidak lagi menganggap bahasa lokal menjadi bahasa “kebutuhan” untuk memenuhi kehidupannya, karena ia tidak dapat beradaptasi dengan pola kehidupan masyarakat yang berkembang.

Saat ini di keluarga inti suku Rejang telah terjadi perubahan penggunaan bahasa Rejang. Bahasa Rejang telah bergeser hanya menjadi bahasa budaya yang muncul saat terjadinya even-even budaya, misal upacara perkawinan. Komunikasi dalam keluarga inti dengan menggunakan bahasa Rejang hanya berhenti pada orang tua, tidak terjadi dalam komunikasi dengan anak. Anak memilih bahasa pergaulan sebagai bahasa kolokialnya, misal bahasa Melayu Bengkulu.

Pewarisan bahasa Rejang tidak lagi berjalan secara alamiah di rumah. Keluarga inti tidak lagi berperan sebagai sekolah bagi anak dalam mewariskan bahasa Rejang. Lingkungan pergaulan, baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan lainnya juga tidak lagi menjadi sarana dalam pembelajaran bahasa Rejang. Sekolah sebagai sarana pendidikan dapat mengambil alih peran keluarga tersebut dengan menjadikan bahasa Rejang sebagai bahasa yang harus dipelajari di sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal.<sup>54</sup>

Kemudian dari segi persoalan adat dan budaya, menurut Hamengkubowono (2014 :9-11) menjelaskan bahwa perlu kiranya memasukkan persoalan adat dan budaya Rejang kedalam kurikulum. Implementasi kekinian dari adat dan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong saat ini, antara lain terlihat dari indikator berikut:

Tabel 11  
Implementasi Adat dan Budaya Rejang saat ini

| No | Unsur                                | Kondisi     |            |
|----|--------------------------------------|-------------|------------|
|    |                                      | Terpelihara | Pergeseran |
| 1  | Bekulo “Basen” / Asen Te’ang         | √           | √          |
| 2  | Mbin cupik moi unen/ min cupik mbioa | √           | √          |
| 3  | Temgak umeak / membuat rumah         | -           | √          |
| 4  | Ngetem / panen padi                  | -           | √          |
| 5  | Bahasa / komunikasi                  | √           | √          |
| 6  | Sastra                               | √           | -          |
| 7  | Baso / sebutan pada kedudukan        | √           | √          |
| 8  | Temungeu umeak beleu                 | -           | √          |

<sup>54</sup> Maria Botifar, *Model Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa Rejang sebagai Muatan Lokal di Sekolah Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 9  | Beto'ok / temanem saweak | - | √ |
| 10 | Pakaian adat             | √ | - |
| 11 | Rumah (arsitek)          | - | √ |
| 12 | Kesenian                 | √ | √ |
| 13 | Sistem pemerintahan      | - | √ |
| 14 | Balai adat               | √ | √ |
| 15 | Kerajinan tradisional    | √ | √ |
| 16 | Makanan tradisional      | √ | √ |
| 17 | Nyanyian                 | √ | √ |
| 18 | Alat-alat pertanian      | √ | √ |
| 19 | Sistem pengetahuan       | √ | √ |
| 20 | Mata pencaharian         | √ | √ |
| 21 | Hukum adat               | √ | √ |
| 22 | Alat transportasi        | √ | √ |

Sumber : Hamengkubowono, Tantangan Adat dan Budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Pada Era Kekinian. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Walaupun beberapa unsur dari adat dan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami pergeseran, tapi dengan heterogennya masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, adat dan budaya suku-suku lain di Rejang Lebong tetap memiliki ruang untuk berkembang dan tetap terpelihara. Heterogenya masyarakat itu tidak banyak mempengaruhi substansi adat dan budaya Rejang. Pergeseran adat dan budaya di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh beberapa unsur : (1) Masyarakat Rejang Lebong saat ini bersifat heterogen, (2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (3) Komunikasi bebas (visual, audio, dan audio visual) (4) Masyarakat Rejang adalah masyarakat yang bersifat terbuka menerima perubahan. (5) Belum ada upaya intensif mewariskan adat dan budaya Rejang (6) Telah banyak terlibatnya akademisi dari lingkungan perguruan tinggi dalam upaya penyusunan pendidikan adat, budaya Rejang

(muatan lokal), (7) Modernisasi (8) Globalisasi, dan (9) Kurang aktifnya lembaga-lembaga sekolah dalam menggiat pelestarian budaya Rejang.<sup>55</sup>

## BAB V

### FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### 5.1. Faktor Pendorong dan Penghambat<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Hamengkubowono, Tantangan Adat dan Budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Pada Era Kekinian. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

<sup>56</sup> Bahan ini terutama berasal dari kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin-Rabu, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong. Adapun peserta FGD yang telah banyak membantu dalam memberikan data yakni : Winarsih (SD N 13 Curup), Absir (SMA N 2 Arga Makmur/Arma), Jalilah (Narasumber/ SMA N 1 Curup Selatan), Yanti Harneli (SMA N 2 Arga Makmur/ Arma), Drs. Syahril Eff (DPRD Kabupaten Rejang Lebong), Reskan Hamidi (SDN 15 Curup), Rosmala, S.Pd (SD N Curup), Iskandar (Narasumber/ SMP 1 Bur), Santoso, SH, M.Si (Narasumber/BMA), Berlian R (Narasumber/ SDN Curup Timur), Emillah (Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), Yanti (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong), Marsiani (SMPN 1 Curup Tengah), Indra (SMPN 2 Pondok Kelapa), Ahmadibul Amda (STAIN Curup), Luh Santeni (SMAN 1 Curup), Hamengkubowono (Narasumber/STAIN Curup), Mario Botifar (Narasumber/ STAIN Curup), Zakaria Effendi (Narasumber/Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), M. Muid (SDN 04 Curup), Bambang Winarto (SMPN 2 Curup), Ilham Wahyudi (SMPN 4

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang mulai disusun pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim pengembang Kurikulum Bahasa Rejang. Tim terdiri dari unsur BMA, akademisi, guru SD-SMP-SMA, dan dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang ini akan dipayungi secara hukum melalui Peraturan Daerah tentang muatan lokal bahasa Rejang. Melalui PERDA ini diharapkan seluruh sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA baik dibawah naungan Pendidikan Nasional ataupun Kementerian Agama dapat menjadikan bahasa Rejang sebagai muatan lokal di sekolah.

Melalui usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tentang muatan lokal bahasa Rejang disampaikan ke DPRD kabupaten Rejang Lebong. Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang dan Dinas Pendidikan diundang Komisi DPRD untuk melakukan kegiatan dengar pendapat yang akan diputuskan melalui rapat paripurna. Rapat paripurna pada tahun 2011 memutuskan menunda Perda tentang muatan lokal bahasa Rejang.

Penggunaan bahasa Rejang dalam kurikulum muatan lokal tidak terlepas dari peran strategis pada bahasa Rejang tersebut. Menurut Effendi (2014 : 8013) bahwa berdasarkan catatan pusat Bahasa juta jiwa sensus tahun 1981 penutur Bahasa Rejang adalah satu juta orang, bagaimana sekarang tahun 2014, yang jumlah penduduk sudah mencapai 200, tmenjadi entu penutur bahasa Rejang telah jauh meningkat maka layaklah bahwa Bahasa rejang untuk dapat dipelajari sebagai mata pelajaran di sekolah. Secara substansi nilai-nilai lokal, seperti dikemukakan Sayuti (2003:3-4) budaya etnik local mengandung tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Rejang. Melalui sejumlah pelajaran, peserta didik secara bertahap memasuki proses penyiapan diri untuk hidup, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pencerahan nilai-nilai dalam diri berlangsung. Di samping itu, juga berlangsungnya proses beradaptasi dengan lingkungan. Implikasinya “dekatkan anak didik dengan lingkungann, dan jangan

mengasingkannya” menjadi penting, dan pemilihan serta penentuan porsi bahan pelajaran yang bersifat lokal menjadi imperatif yang sudah selayaknya diupayakan. Materi pembelajaran muatan lokal di sini diderivasikan dari kebudayaan etnik lokal dalam keseluruhannya, tidak hanya eksklusif berupa seni dan bahasa lokal.

Selain potensi nilai-nilai lokal, bahasa dan sastra Rejang termasuk bahasa yang telah mapan dan baku (*standard*). Seperti dikemukakan oleh William A. Stewart (dalam Adisumarto, 1991:9-11), bahasa baku (*standard*) harus memiliki empat atribut pokok, yaitu (1) kebakuan (*standardization*), (2) keswatantraan (*outonomy*), kesejarahan (*historicity*), dan ketahanan hidup (*vitality*), bahasa Rejang telah memenuhi kriteria ini. Dilihat dari kebakuan (*standardization*). Bahasa Rejang telah memiliki kaidah yang mantap, bahasa Rejang telah memiliki tata bahasa baku, dan kamus bahasa Rejang (eka bahasa, dwibahasa, dan multibahasa). Dilihat dari keswatantraan (*outonomy*), bahasa Rejang merupakan bahasa mandiri, bukan dialek atau bukan menjadi bagian dari bahasa lain. Dilihat dari indikator kesejarahan (*historicity*), bahasa Rejang telah terbukti perkembangannya, dimulai dari bahasa Rejang Kuna, bahasa Rejang Tengahan, sampai bahasa Rejang Baru; hasil-hasil karya sastra sebagai cermin sejarah perkembangan bahasa Rejang dan adat-istiadat maupun budayanya tak terhitung jumlahnya.

Dalam Politik Bahasa Nasional tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah dinyatakan bahwa di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Rejang, Madura, Makasar, dan Sunda, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Rejang, Madura, Makasar, dan Sunda berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:13). Nababan (1984) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga hal, pelestarian kebudayaan, pengembangan kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Fungsi kemasyarakatan meliputi ruang lingkup dan bidang pemakaian.

Fungsi perorangan meliputi fungsi instrumental, kepribadian, pemecahan masalah, khayalan, dan informatif. Fungsi pendidikan meliputi fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran.

Dalam Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Rejang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan bahwa fungsi mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah adalah sebagai (1) sarana pembina rasa bangga terhadap bahasa Rejang, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Rejang, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Rejang yang baik dan benar untuk berbagai keperluan, dan (5) sarana pemahaman budaya Rejang melalui kesusasteraan Rejang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mata pelajaran bahasa Rejang sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah setidaknya mengemban fungsi (1) alat komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Rejang secara baik dan benar untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif.

Dalam persoalan hambatan menurut Santoso (2010 :6) menjelaskan bahwa hambatan serius berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang akan berperan baik dalam rangka penyusunan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran, mengingat fenomena makin langkanya tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi secara tradisional terhadap budaya, adat-istiadat atau hukum adat Rejang. Kapasitas dan kecendikiaan tokoh-tokoh adat terkubur usia zaman dan sedikit sekali yang dapat terekam dalam dokumen tertulis yang dapat diselamatkan.

Kemudian menurut Botifar (2010 : 7) menjelaskan bahwa belum adanya

Peraturan Daerah yang mengatur bahasa Rejang sebagai bahasa yang wajib dipelajari oleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal. Hal ini sangat terkait dengan persoalan kurikulum muatan lokal bahasa Rejang menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam melestarikan budaya dan bahasa Rejang. Apalagi dalam kurikulum 2013 telah mendudukan bahasa daerah setara dengan bahasa Indonesia. Dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 menyebutkan penggunaan bahasa di kelas dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sungguh sebuah ironi jika pemilik bahasa Rejang yang oleh Guru Besar Ilmu bahasa Universitas Indonesia, Multamia Lauder dalam kongres bahasa-bahasa daerah Wilayah Barat mengemukakan bahasa Rejang sebagai salah satu dari 13 bahasa daerah yang masih *survive* di wilayah barat harus kehilangan bahasanya mungkin dalam 30 tahun atau lebih kedepannya.<sup>57</sup>

Kemudian, kurikulum sebagaimana dipahami tidaklah selesai dengan selesainya dokumen kurikulum semata. Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan dalam keseluruhan aktivitas yang berlangsung di sekolah, yang pada gilirannya turut memberi kontribusi pada perubahan pada sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Sebagaimana dikemukakan pada bagian lain tulisan ini, implementasi kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar dapat dikatakan masih relatif baru. Sehingga berbagai persoalan dalam kurikulum ini masih menyisakan berbagai problematik.<sup>58</sup>

Persoalan dalam implementasi kurikulum muatan lokal sampai saat ini cukup pelik. Hal ini berkaitan perencanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya. Dilihat dan segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu mungkin *team*

---

<sup>57</sup> Maria Botifar, *Model Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa Rejang sebagai Muatan Lokal di Sekolah Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

<sup>58</sup> Muhammad Nasir, Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah. Dalam *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 1-18

*teaching* sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama terpadu antara pembina, pelaksana lapangan dan nara sumber.

Menurut Iskandar (2014 : 14-15), menjelaskan bahwa dalam pengalaman mengajar kurikulum muatan lokal aksara *Ka Ga Nga* ada beberapa hambatan yakni :

- 1) Kurangnya buku pokok aksara *Ka Ga Nga* untuk guru dan siswa
- 2) Kurangnya buku-buku penunjang aksara *Ka Ga Nga* untuk guru dan siswa.
- 3) Kurangnya narasumber (pakar aksara *Ka Ga Nga*)
- 4) Kurangnya tenaga pendidik aksara *Ka Ga Nga*
- 5) Kemajamekukan peserta didik (berbagai suku)
- 6) Tulis baca *Ka Ga Nga* mudah dimengerti dan akan sukar bila di transliterasi kedalam bahasa lain.
- 7) Kurangnya Kamus Bahasa Rejang yang menggunakan literatur *Ka Ga Nga*.
- 8) Kebanyakan tenaga honorer belum banyak yang mampu mengajarkan aksara *Ka Ga Nga*, namun lebih mampu mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan
- 9) Tuntutan jam mengajar linear Guru Sertifikasi sesuai dengan spesialisasinya.<sup>59</sup>

## 5.2. Pengembangan Muatan Lokal

### 5.2.1. Konsep dan Sifat Muatan Lokal

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Pengembangan Muatan Lokal, dijelaskan bahwa Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

<sup>59</sup> Iskandar, *Isi Kurikulum Muatan Lokal dan Pengalaman Pengajaran Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar: (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan (3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.<sup>60</sup>

Kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan

---

<sup>60</sup> Lebih lanjut tentang hal ini lihat lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Pengembangan Muatan Lokal.

mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal

### **5.2.2. Proses Pengembangan**

Pada tatatan idealnya, mata pelajaran muatan lokal pengembangannya sepenuhnya ditangani oleh sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Dengan demikian di samping mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional, perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan muatan lokal memperhatikan keseimbangan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penanganan secara profesional muatan lokal merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu sekolah dan komite sekolah.

Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah
- b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal
- c. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal
- d. Menentukan Mata Pelajaran Muatan Lokal

- e. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus, dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)

Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. *Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah*

Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah yang bersangkutan seperti Pemerintah Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Instansi vertikal terkait, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha/industri. Keadaan daerah seperti telah disebutkan di atas dapat ditinjau dari potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kekayaan alam. Kebutuhan daerah dapat diketahui antara lain dari:

- 1) Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan daerah, baik pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, maupun pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- 2) Pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan;
- 3) Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya, serta konservasi alam dan pemberdayaannya.

b. *Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal*

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas dapat diperoleh berbagai jenis kebutuhan. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan lokal di daerah, antara lain untuk:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- 2) Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu;
- 3) Meningkatkan kemampuan berwiraswasta;
- 4) Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari;

c. *Menentukan bahan kajian muatan lokal*

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- 2) Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana
- 4) Tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa
- 5) Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan
- 6) Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah;
- 7) Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.

d. *Menentukan Mata Pelajaran Muatan Lokal*

Berdasarkan bahan kajian muatan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang agar bahan kajian muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah kemudian ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah untuk dijadikan nama mata pelajaran muatan lokal.

*e. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta silabus, dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP.*

1) Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.

a) Pengembangan Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai.

2) Pengembangan silabus secara umum mencakup:

a) Mengembangkan indikator

b) Mengidentifikasi materi pembelajaran

c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran

d) Pengalokasian waktu

e) Pengembangan penilaian

f) Menentukan Sumber Belajar

Pengembangan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong di beberapa sekolah tidak hanya mengajarkan kurikulum muatan lokal aksara dan bahasa Rejang tapi juga bidang kewirausahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Jalilah (2014 :1-6) bahwa hal ini dilandasi :

Rejang lebong merupakan kabupaten yang terletak dilingkungan perbukitan, sehingga pertanian dan perkebunan merupakan kegiatan yang cocok untuk dikembangkan. Hasil pertanian dan perkebunan melimpah tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pada saat musim

panen banyak jenis sayuran yang harganya merosot tajam, dan petani tidak dapat berbuat banyak selain membiarkan tanaman tersebut membusuk dikebun atau membuangnya ke sungai-sungai. Petani belum bisa memanfaatkan hasil pertanian perkebunan mereka dengan cara mengelolanya menjadi makanan atau oleh-oleh yang mempunyai nilai jual. Hal ini lah yang mendorong SMA Negeri 1 Curup Selatan mengembangkan Muatan Lokal Kewirausahaan agar peserta didik dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dengan jiwa, semangat, dan keterampilan berwirausaha. Mata Pelajaran kewirausahaan merupakan pilihan tepat untuk dikembangkan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan berwirausaha, bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup, yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi untuk bertahan hidup, serta mampu menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan bermasyarakat. Muatan lokal Kewirausahaan dimaksudkan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha. Isi muatan lokal Kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut untuk lebih aktif mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran muatan lokal kewirausahaan dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri.<sup>61</sup>

Sedangkan pengalaman dalam mengajarkan muatan lokal kewirausahaan dijelaskan oleh Jalilah (2014 : 7) :

Saya mengajar mata pelajaran muatan lokal mulai tahun 2006 saat kurikulum KTSP dikeluarkan. Saya sangat kebingungan ketika di beri tugas mata pelajaran ini karena tidak ada petunjuk dari pihak sekolah dan dinas bagaimana cara melaksanakannya. Semua kegiatan pembelajaran diserahkan ke guru yang mengajar, saya harus mencari sendiri materi yang ingin diajarkan. Tahun pertama mengajar muatan lokal, kegiatan pembelajaran dilakukan di sore hari karena belum bisa terjadwal di pagi hari, di tahun berikutnya baru diberikan jam di pagi hari tapi hanya 1 jam pelajaran kemudian berkembang menjadi 2 jam pelajaran. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan untuk dikembangkan, yaitu (a) Tata boga; sarana dan prasarana pendukung tidak ada, (b) Tata busana; saya tidak mempunyai ke ahlian dalam hal menjahit pakaian dan mesin jahit disekolah belum punya, (c) Pertanian; lahan sekolah tidak

---

<sup>61</sup> Jalilah, Isi Kurikulum Muatan Lokal Dan Pengalaman Pengajaran Kurikulum Muatan Lokal di SMA Negeri 1 Curup Selatan. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

mencukupi untuk kegiatan pertanian, (d) Membatik; saya belum mengerti tentang cara membatik, (e) Kaganga; saya tidak bisa bahasa dan tulisan rejang “kaganga” walaupun sudah lama tinggal di curup, jadi tidak mungkin mengajarkan anak bahasa rejang sedangkan saya sendiri sebagai guru tidak mengerti tulisan rejang. (f) Kewirausahaan; buku pendukung ada di perpustakaan, saya menginginkan siswa memiliki keterampilan life skill yang bisa menjadi pertimbangan bagi mereka nanti setelah lulus sekolah.

Dengan berbagai pertimbangan akhirnya kewirausahaan adalah yang paling cocok untuk kembangkan, karena saya memang mempunyai latar pendidikan ekonomi akuntansi. Tapi proses pembelajarannya saya modifikasi sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya menerima materi saja tapi memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan yang disesuaikan dengan kondisi kabupaten Rejang Lebong. Pembelajaran materi wirausaha saya gabung dengan keterampilan seperti : (a) Menjahit, menggunakan peralatan yang ada tanpa mesin jahit sehingga tidak membutuhkan modal besar (b) Memanfaatkan barang bekas atau plastic untuk dijadikan hiasan atau peralatan, (c) Memanfaatkan hasil bumi yang ada di kabupaten Rejang Lebong untuk di olah menjadi makanan atau oleh-oleh. Seperti membuat kue dari ubi ungu, manisan terong, manisan pepaya, (d) Membuat masakan khas Rejang Lebong, (e) Mengadakan bazaar; siswa diminta untuk membuat makanan kemudian menghitung biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungan yang diinginkan, berapa harga jual, dan setelah selesai apakah keuntungan tersebut bisa di capai, dan (f) Pembuatan batik tulis sederhana untuk jilbab dan kaos.

Selain memberikan keterampilan, mereka juga saya ajak mengadakan pengamatan langsung kelapangan tentang cara-cara berwirausaha untuk usaha kecil menengah. Baik itu saya terjun langsung ke lapangan bersama siswa maupun pemberian tugas kelompok kepada anak untuk mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pelaku usaha yang ada di kota curup dan sekitarnya.

Sampai sekarang kegiatan tersebut masih dilakukan dalam proses pembelajaran muatan lokal di SMA Negeri 1 Curup Selatan dengan harapan siswa tidak hanya mendapatkan materi tentang kewirausahaan di kelas, tetapi juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman secara langsung penerapan kewirausahaan di lapangan. Sehingga setelah tamat sekolah mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa mencoba untuk berwirausaha.<sup>62</sup>

### 5.2.3. Pihak yang Teribat dalam Pengembangan

<sup>62</sup> Jalilah, Isi Kurikulum Muatan Lokal Dan Pengalaman Pengajaran Kurikulum Muatan Lokal di SMA Negeri 1 Curup Selatan. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Sekolah dan komite sekolah mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan program muatan lokal. Bila dirasa tidak mempunyai SDM (Sumberdaya Manusia) dalam mengembangkan sekolah dan komite sekolah dapat bekerjasama dengan dengan unsur-unsur Depdiknas seperti Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi dan instansi/lembaga di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya pemerintah daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Departemen lain terkait, dunia usaha/industri, tokoh masyarakat.

Peran, tugas dan tanggung jawab TPK secara umum adalah sebagai berikut

- a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing;
- b. Menentukan komposisi atau susunan jenis muatan lokal;
- c. Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing;
- d. Menentukan prioritas bahan kajian muatan lokal yang akan dilaksanakan;
- e. Mengembangkan silabus muatan lokal dan perangkat kurikulum muatan lokal lainnya, yang dilakukan bersama sekolah, mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan oleh BSNP

Peran Perguruan Tinggi dan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) antara lain memberikan bimbingan dan bantuan teknis dalam:

- a. Mengidentifikasi dan menjabarkan keadaan, potensi, dan kebutuhan lingkungan ke dalam komposisi jenis muatan lokal;
- b. Menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran;
- c. Menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan jenis bahan kajian/pelajaran

Peran instansi/lembaga di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada di daerah yang bersangkutan, serta prioritas pembangunan daerah di

berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan;

- b. Memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam menentukan prioritas muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat.

Diskursus pendidikan, terutama yang berorientasi menanamkan nilai-nilai budaya, memiliki landasan argumentatif yang cukup kuat untuk terus didemonstrasikan. Setidaknya ada dua alasan penting yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap *up to date* untuk dikaji. *Pertama*, kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. Membincangkan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Sebaliknya, menghindari wacana pendidikan budaya sama halnya dengan menghancurkan jati diri dan identitas. Dampak buruk menjauhkan manusia dari pendidikan budayanya sangatlah muda diterka, semisal terombang-ambingnya generasi muda karena kehilangan identitas budaya dan tergulung oleh arus informasi di era globalisasi yang menghapus jatidiri dan menghantarkan pada absurditas.<sup>63</sup>

*Kedua*, pendidikan berbasis budaya juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa masyarakat yang sadar budaya akan bertransformasi menjadi masyarakat yang maju dan beradab.

---

<sup>63</sup> Dede Mahfudh dan Dayat, "Pentingnya Manajmenen dalam Pengelolaan Pendidikan", *Makalah*, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2009, h. 1.186 *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.

Dalam tataran nilai, pendidikan secara umum dan pendidikan berbasis budaya pada khususnya, mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, jiwa-jiwa yang progresif, produktif, dan inovatif akan tumbuh secara bertahap dan pasti. Di sinilah nilai penting lain pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pendidikan juga dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan.<sup>64</sup>

Manajemen pendidikan menduduki posisi vital dalam dunia pendidikan. Manajemen dapat diibaratkan sebagai “roh” yang akan menggerakkan gerak-hidup raga pendidikan. Sukses-gagalnya dunia pendidikan meraih cita-cita dan tujuan sangat ditentukan sejauhmana manajemen dijalankan dengan baik. Kegagalan manajemen sudah dipastikan menyebabkan gagalnya upaya pencapaian tujuan pendidikan. Lebih jauh, manajemen adalah penggunaan efektif sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta bahan-bahan materil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan itu. Manajemen sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang. Selain itu juga manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks.

Selanjutnya, lembaga pendidikan dapat dipahami tempat bagi penyelenggaraan manajemen yang akuntabel. Lembaga pendidikan itu sendiri merupakan suatu pranata sosial. Predikat sebagai pranata sosial ini disimpulkan dari kenyataan bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat yang dihuni orang-orang dari berbagai latar belakang

---

<sup>64</sup>Selengkapnya bisa ditelusur dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yukrim Latief, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung Sai Batin dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus* (Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2007).187  
Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012

sosial, yang kemudian membentuk suatu kesatuan dengan nilai-nilai dan budaya tertentu. Di lembaga pendidikan inilah berbagai nilai bertemu, bersatu, bekerjasama dalam mewujudkan visi-misi bersama. Nilai-nilai dan budaya yang beragama itulah sangat potensial untuk mendukung suksesi dan penyelenggaraan manajemen lembaga pendidikan yang akuntabel. Tetapi, pada saat bersamaan dapat menjadi penghambat.

Dalam konteks ini, kita melihat adanya infiltrasi kekuatan nilai-nilai budaya dalam mempengaruhi jalannya manajemen pendidikan. Nilai-nilai budaya yang berdiam dalam jiwa-batin masyarakat secara hampir kasat-mata berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya sebuah pelaksanaan manajemen. Dengan kenyataan ini tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa manajemen pendidikan pun memiliki landasan epistemologis untuk mendasarkan dirinya pada nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, inilah apa yang disebut dengan manajemen berbasis budaya (*culture-based management*).

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Simpulan**

Di bumi Rafflesia tersebut, kurikulum muatan lokal sudah diterapkan sejak tahun 2009. Penerapan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal di daerah ini pun agak terlambat, bila ditinjau dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan kurikulum muatan lokal itu sendiri. Penguatan atas penerapan proses pembelajaran kurikulum ini yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987 dan pelaksanaannya dijabarkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987. Hampir duapuluh dua tahun lamanya kurikulum muatan lokal tidak diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten

Rejang Lebong sejak tahun 1987 yakni dikeluarkannya payung hukum pelaksanaan penerapan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal tersebut.

Keinginan masyarakat Rejang Lebong untuk menerapkan kurikulum muatan lokal sudah ada sejak dikeluarkannya payung hukum tersebut, namun terbentur dalam persoalan bahan yang akan diajarkan dalam materi kurikulum muatan lokal serta sumberdaya manusia atau guru yang akan mengajarkan kurikulum muatan lokal itu sendiri. Berfondasikan kepada perihal tersebut pihak pemerintah daerah Kabupaten Rejang tidak memaksakan kurikulum muatan lokal diajarkan kepada anak didik. Hal ini sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan bahwa pemaksaan terhadap kurikulum muatan lokal ini akan berakibat tidak berjalannya proses belajar mengajar itu sendiri.

Menelusuri tentang kebijakan muatan lokal tidak terlepas dari sejarah pendidikan pada umumnya dan kurikulum khususnya. Ditelusuri lebih lanjut bahwa kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada tiga sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. *Pertama*, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan perantren. *Kedua*, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi.

Penguatan atas kurikulum muatan lokal tersebut tidak terlepas dari perjalanan sejarah kurikulum pendidikan nasional. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu

dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas bahwa kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987, dan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tertanggal 12 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Kemudian penguatan ini dilanjutkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pada Bab VIII Pasal 41 ayat (4) yakni Satuan Pendidikan di Kabupaten mencakup 2 (dua) Komponen, yaitu kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal. Adapun pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah : (1) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Rejang Lebong (Budaya dan Bahasa Rejang). (2) Muatan Kurikulum lokal setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, dan (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kemudian pada tanggal 17 September 2009 melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Tim ini bertugas untuk melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal bahasa Rejang bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Rejang Lebong.

Bahasa Rejang sebagai pelajaran muatan lokal selama ini telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi tanggal 26 Juli 2003 perihal: kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah agar menyusun kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah untuk memprogramkan mata pelajaran (a) bahasa Rejang atau bahasa Rejang Lembak, (b) aksara *Ka Ga Nga* atau aksara Rikung, (c) kesenian Rejang Lebong, (d) pengenalan alat musik Rejang, dan (e) adat istiadat, kurikulum, adat, serta petatah-petitih yang hidup di masyarakat.

Adanya instruksi Bupati tersebut memberikan kekuatan hukum bagi sekolah untuk terkonsentrasi mengembangkan muatan lokal lebih baik. Namun kenyataannya, pelajaran muatan lokal di sekolah hanya menjadi pelengkap mata pelajaran saja. Tidak diprogramkan menjadi program unggulan sekolah, sehingga proses pembelajarannya lebih diperhatikan. Selama ini, pembelajaran muatan lokal tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berhubungan dengan bahasa Rejang belum ada. Muatan lokal baru terbatas pada pengenalan aksara *Ka Ga Nga*, yang telah siswa pelajari terlebih dahulu di SD (Sekolah Dasar).

Muatan lokal bahasa Rejang dengan materi yang diajarkan aksara *Ka Ga Nga* berpedoman pada buku aksara *Ka Ga Nga* yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dengan materi ajar yang sangat minim. Pembelajaran ini belum mencakup pada pembelajaran bahasa secara umum. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif, bukan hanya pada aspek pengetahuan bahasa saja.

Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Menurut sejarah, sebelum ada sekolah formal, pendidikan yang berprogram muatan lokal telah dilaksanakan oleh para orang tua peserta didik dengan metode drill dan dengan *trial and error* serta berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka hayati. Tujuan pendidikan mereka terutama agar anak-anak mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Bahan yang diajarkan ialah bahan yang diambil dari berbagai keadaan yang ada di dalam sekitar. Sedangkan kriteria keberhasilannya ditandai mereka telah dapat hidup mandiri. Menurut Dirjen

Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang di per kaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat. Menurut Kurikulum 1994 Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran yang diajarkan secara terpisah, menjadi kajian tersendiri.

Komponen utama dalam kurikulum muatan lokal adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang sebagai rukunan untuk menyusun indikator kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang terdiri atas kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Rejang. Kompetensi berbahasa dan bersastra diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Rejang didukung oleh kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Rejang sesuai dengan *unggah-ungguh basa*. Kompetensi berbahasa dan bersastra terbagi dalam empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (a) menyimak, (b) berbicara, (c) membaca, dan (d) menulis yang dalam pelaksanaan pembelajaran, empat aspek kompetensi berbahasa dan bersastra ini tidak terpisah satu dengan lainnya, melainkan dilaksanakan secara terpadu.

Kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Salah satu muatan lokal di Propinsi Bengkulu.

Melalui muatan lokal mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat lebih mengangkat nilai *adi luhung* yang ada dalam tata kehidupan Rejang, seperti toleransi, kasih sayang, *gotong royong*, *andhap asor*, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya. Di samping itu, melalui mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat diangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal. 12 Secara substansi kebahasaan, kesastraan, kebudayaan, dan muatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; bahasa, sastra, dan budaya Rejang tidak diragukan lagi sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah, mata pelajaran bahasa Rejang setidaknya mengemban fungsi (1) alat komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Rejang secara baik dan benar untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran kurikulum muatan lokal di satuan tingkat pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengajarkan kurikulum muatan lokal tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dijelaskan bahwa : Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2)

Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Dalam persoalan hambatan serius berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang akan berperan baik dalam rangka penyusunan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran, mengingat fenomena makin langkanya tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi secara tradisional terhadap budaya, adat-istiadat atau hukum adat Rejang. Kapasitas dan kecendikiaan tokoh-tokoh adat terkubur usia zaman dan sedikit sekali yang dapat terekam dalam dokumen tertulis yang dapat diselamatkan.

Hal ini juga disebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur bahasa Rejang sebagai bahasa yang wajib dipelajari oleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal. Hal ini sangat terkait dengan persoalan kurikulum muatan lokal bahasa Rejang menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam melestarikan budaya dan bahasa Rejang. Apalagi dalam kurikulum 2013 telah mendudukkan bahasa daerah setara dengan bahasa Indonesia.

Kemudian, kurikulum sebagaimana dipahami tidaklah selesai dengan selesainya dokumen kurikulum semata. Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan dalam keseluruhan aktivitas yang berlangsung di sekolah, yang pada gilirannya turut memberi kontribusi pada perubahan pada sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Sebagaimana dikemukakan pada bagian lain tulisan ini, implementasi kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar dapat dikatakan masih relatif baru. Sehingga berbagai persoalan dalam kurikulum ini masih menyisakan berbagai problematik.

Persoalan dalam implementasi kurikulum muatan lokal sampai saat ini cukup pelik. Hal ini berkaitan perencanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya. Dilihat dan

segi ketenagaan, pelaksanaan muatan lokal memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Untuk itu mungkin *team teaching* sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru kelas, harus ada kerjasama terpadu antara pembina, pelaksana lapangan dan nara sumber. Serta beberapa hambatan dalam pembelajaran kurikulum muatan lokal yakni ; (1) Kurangnya buku pokok aksara *Ka Ga Nga* untuk guru dan siswa, (2) Kurangnya buku-buku penunjang aksara *Ka Ga Nga* untuk guru dan siswa, (3) Kurangnya narasumber (pakar aksara *Ka Ga Nga*), (4) Kurangnya tenaga pendidik aksara *Ka Ga Nga*, (5) Kemajamekukan peserta didik (berbagai suku), (6) Tulis baca *Ka Ga Nga* mudah dimengerti dan akan sukar bila di transliterasi kedalam bahasa lain, (7) Kurangnya Kamus Bahasa Rejang yang menggunakan literatur *Ka Ga Nga*, (8) Kebanyakan tenaga honorer belum banyak yang mampu mengajarkan aksara *Ka Ga Nga*, namun lebih mampu mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan (9) Tuntutan jam mengajar linear Guru Sertifikasi sesuai dengan spesialisasinya.

## 6.2. Saran-Saran

Berikut ini saran-saran untuk diperhatikan dalam pelaksanaan muatan lokal.

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar dapat mendorong untuk pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran kurikulum muatan lokal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
- 2) Sekolah yang mampu mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila sekolah belum mampu mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar beserta silabusnya sekolah dapat melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, atau dapat meminta bantuan kepada sekolah yang terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Bila beberapa sekolah dalam satu daerah belum mampu mengembangkan dapat meminta bantuan TPK daerah, atau meminta bantuan dari ke pemerintah pusat.

- 3) Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan peserta didik yang meliputi dekat secara fisik dan secara psikis. Dekat secara fisik maksudnya terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik, sedangkan dekat secara psikis maksudnya bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencernakan informasi sesuai dengan usianya. Untuk itu, bahan pengajaran hendaknya disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu: (1) bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru; (4) dari yang mudah/ sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu bahan kajian/pelajaran hendaknya bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan nara sumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekolah, misalnya dengan memanfaatkan tanah/kebun sekolah, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu guru hendaknya dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.
- 5) Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Bahan kajian muatan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester atau satu tahun ajaran.
- 6) Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran muatan lokal perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Achmad Ramli dan kawan-kawan, *Belajar Tulis Baca Abjad Ka Ga Nga Tulisan Tradisional Daerah Bengkulu Jilid 1*. Bengkulu : Aksara Ka Ga Nga, 1993.
- Ali, Mohammad, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Arikunto, Suharsimi, . “Kualitas Pendidikan dalam Pengembangan Afektif untuk Kurikulum Muatan Lokal”. Makalah Simposium Nasional Pergeseran Paradigma Pengembangan dan Inovasi Pendidikan, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1996.
- Astuti,Nunuk Juli. *Identifikasi Naskah-Naskah Ulu Yang Tersimpan Di Museum Bengkulu*. Laporan Penelitian Universitas Bengkulu, 2000.
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Curup : Badan Mausyawah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, 2007.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2013*. Curup : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong bekerjasama dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rejang lebong, 2014.
- Berlian, *Isi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang dan Pengalaman Pengajaran Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Sekolah Dasar di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada

- kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Botifar, dan kawan-kawan, “Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang Berbasis Pendekatan Komunikatif di SMP”. *Thesis S2*. Bengkulu : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu, 2009.
- ....., Model Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa Rejang sebagai Muatan Lokal di Sekolah Kabupaten Rejang Lebong Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Christyawati. Eny, *Kebudayaan Orang Mukomuko*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang Press, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Bahan Sosialisasi*. <http://www.depdiknas.id.org>, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyusunan KTSP Lengkap (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SD, SMP dan SMA*. Jakarta; Pustaka Yustisia. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Penyusunan KTSP Lengkap (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SD, SMP dan SMA*. Jakarta; Pustaka Yustisia. 2007
- Effendi, Zakaria, *Sejarah Proses Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Galizia, Michele, “Myth Does Not Exist Apart From Discourse, or The Story Of A Myth Which Became History” dalam Wolfgang Marschall, dkk, *The Rejang of Southern Sumatra*. Centre For South-east Asian Studies at The University of Hull., 1992 : 6-7
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2007.
- ....., *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Bina Aksara, 1999.
- Hamengkubowono, *Tantangan Adat dan Budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Pada Era Kekinian*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Hasibuan. *Proses Belajar Mengajar* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

- Hymes, Dell. . “Models of the Interaction of Language and Social Life” dalam, J.J. Gumperz dan Hymes (ed.) *Direction in Sociolinguistic*. New York: Rinehart & Winston, 1972.
- [http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi\\_Bahan\\_Ajar\\_Cetak/BAC\\_Pengkur\\_SD/unit-4\\_perkembangan\\_kurikulum\\_.pdf](http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BAC_Pengkur_SD/unit-4_perkembangan_kurikulum_.pdf) diakses tanggal 15 November 2014 Pukul 10.00 Wib.
- <http://iammovic.wordpress.com/2014/05/09/sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia-i/>
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2007.
- Iskandar, Isi *Kurikulum Muatan Lokal dan Pengalaman Pengajaran Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Ismawati, Esti, *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012.
- Jalilah, Isi *Kurikulum Muatan Lokal Dan Pengalaman Pengajaran Kurikulum Muatan Lokal di SMA Negeri 1 Curup Selatan*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Jaspan, M.A, *Folk Literature of South Sumatra: the Redjang Ka-Ga-Nga Texts*. Camberra :The Australian National University Camberra, 1964.
- Kencanawati, Indah Sari, *Baso Jang Te 1. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 1 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- .....*Baso Jang Te 2. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 2 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- .....*Baso Jang Te 3. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 3 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- .....*Baso Jang Te 4. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 4 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- .....*Baso Jang Te 5. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 5 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- .....*Baso Jang Te 6. Bahasa dan Aksara Rejang Untuk Kelas 6 SD/MI Muatan Lokal Bengkulu*. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993.

- Khaeruddin dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Yogyakarta: Pilar Media. 2007.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1980.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1999.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006. Jakarta, 2006.
- Leonard Arios, Rois, dan kawan-kawan. *Kebudayaan Enggano*. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Padang, 2003.
- ..... . "Identitas Budaya Orang Kaur". *Laporan Penelitian* : BPSNT Padang, 2010.
- ..... dan Yondri, *Kutei: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.
- ..... dan Femmy, *Lebong: dari Mitologi, Kota Tambang, hingga Kabupaten*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008.
- Latief, Yukrim dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung Sai Batin dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus* (Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2007).187
- Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012
- Mahfudh, Dede dan Dayat, "Pentingnya Manajemen dalam Pengelolaan Pendidikan", *Makalah*, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2009, h. 1.186
- Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.
- Marsden, William, *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Masliana. *Kelemahan dan Kelebihan Masing-masing Kurikulum 1975-2006*. Tahun 2012. Diakses dari <http://liana-masliana.blogspot.com/2> dan Radicks. 2012. *Karakteristik, Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Dari Tahun 1968 Sampai Tahun 2006*. dari <http://kupaskepot.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 15 November 2014 Pukul 11.00 Wib
- Moeliono, Anton. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan, 1981.
- Muhaimin, dan kawan-kawan, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah*. Edisi I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhardi, *Pengelolaan Koleksi Naskah Ka Ga Nga di Museum Bengkulu*. Thesis S2. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2009.
- Murlyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah*, Cetakan ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Nababan, P.W.J. *Sosiolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Nasir, Muhammad, *Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah*. Dalam Jurnal *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 1-18.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional pendidikan (SNP).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Radicks. 2012. *Karakteristik, Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Dari Tahun 1968 Sampai Tahun 2006*. Diakses dari <http://kupaskepot.blogspot.com>, pada tanggal 5 Maret 2013.
- Rosidi, Ajip (editor). *Bahasa Nusantara suatu Pemetaan Awal*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1999.
- Santoso, *Peran Badan Musyawarah Adat Dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong*. Makalah disampaikan pada kegiatan FGD (Focus Group Discussion): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Sarwono, Sarwit, "Tradisi Tulis Ulu di Bengkulu : Penulis, Naskah dan Kandungannya" dalam Sarwit Sarwono (ed), *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu : Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu, 2004 halaman 61.
- Sayuti, Suminto A. "Muatan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan". Bukittinggi: Makalah Kongres Kebudayaan, 2003.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka. Lihat juga Mohammad Hoesin, *Naskah Tembo Rejang Empat Petulai*. Tanpa Penerbit, 1932.
- Soedijarto dan kawan-kawan Edisi Tahun 2010, *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Sutrisna Wibawa, *Apresiasi Sastra Wayang di SMP Negeri 8 Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY, 1999.
- Sutrisna Wibawa, *Pendekatan Pembelajaran Bahasa Rejang di SMA/SMK/MA. Bengkulu*: Makalah Kongres Bahasa Rejang, 2006.
- Safri, dan kawan-kawan, "Studi Eksplorasi Tentang Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar di Provinsi Bengkulu". *Laporan Penelitian*. Bengkulu : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 1994.
- Susianto, Darwin, *Menyibak Misteri Bangkahulu*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Sagala, S, *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta, 2003.
- Setiyanto, Agus, *Elite Pribumi Bengkulu: perspektif Sejarah Abad Ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Sobandi, Bandi, *Implementasi Pembelajaran Membantk Untuk Menumbuhkan Nilai Karakter Bangsa*. Padang : Proseding Seminar Internasional Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2012.

- Surya, M, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung : Yayasan Bhakti Winaya Bandung, 2003.
- Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undri dan kawan-kawan, *Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya : Aksara Ka Ga Nga di Bumi Rafflesia*. Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
- Murlyasa, E, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah*. Cetakan ke 3. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah*, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, *Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum SMK*. Jakarta : Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan, 2007.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, 2010. Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Rejang. Bengkulu: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. *Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Seri Penyuluhan 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Yondri, dkk. *Identifikasi Kebudayaan Suku Bangsa Pekal di Kabupaten Bengkulu Utara*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang, 2006.
- Yusuh, Agus Salim, *Aksara Ka Ga Nga Untuk Sekolah Dasar Kelas III, IV, V dan VI*. Tahun 2009. Tanpa penerbit.
- Wasliman, Iim, *Modul Problematika Pendidikan Dasar*. Bandung: PPs Pendidikan Dasar UPI, 2007.
- Wakhidi, dan kawan-kawan, "Muatan Lokal oleh Guru-Guru SD di Provinsi Bengkulu: Studi Eksploratif Tentang Muatan Lokal oleh Guru-Guru SD di Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan". *Laporan Penelitian*. Bengkulu : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 1994.

## DAFTAR INFORMAN

Dalam pengumpulan data lapangan, tim peneliti sangat terbantu dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Rabu, 24-26 Februari 2014 di Hotel Griya Angita - Curup Kabupaten Rejang Lebong. Adapun peserta FGD yang telah banyak membantu dalam memberikan data yakni : Winarsih (SD N 13 Curup), Absir (SMA N 2 Arga Makmur/Arma), Jalilah (Narasumber/ SMA N 1 Curup Selatan), Yanti Harneli (SMA N 2 Arga Makmur/ Arma), Drs. Syahril Eff (DPRD Kabupaten Rejang Lebong), Reskan Hamidi (SDN 15 Curup), Rosmala, S.Pd (SD N Curup), Iskandar (Narasumber/ SMP 1 Bur), Santoso, SH, M.Si (Narasumber/BMA), Berlian R (Narasumber/ SDN Curup Timur), Emillah (Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), Yanti (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong), Marsiani (SMPN 1 Curup Tengah), Indra (SMPN 2 Pondok Kelapa), Ahmadibul Amda (STAIN Curup), Luh Santeni (SMAN 1 Curup), Hamengkubowono (Narasumber/STAIN Curup), Mario Botifar (Narasumber/ STAIN Curup), Zakaria Effendi (Narasumber/Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong), M. Muid (SDN 04 Curup), Bambang Winarto (SMPN 2 Curup), Ilham Wahyudi (SMPN 4 Curup), M. Agustin Ayu, Ahmad Rojali (SMPN 2 Curup), Oktaviani Z (SMAN 1 Curup), Fauzan Mubarak (SDN 10 Curup), dan Dian Sukma (SDN 04 Curup). Serta informan lapangan terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA REJANG**  
**TINGKAT PENDIDIKAN DASAR**

| NO | KELAS | SMT | STANDAR KOMPETENSI                                                                    | KOMPETENSI DASAR                                                                                           |
|----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | I     | I   | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata benda Bahasa Rejang                             | 1. Siswa dapat menyebutkan kata- kata benda Bahasa Rejang.                                                 |
|    |       |     | 2. Siswa mampu mengucapkan kata- kata benda Bahasa Rejang                             | 2. Siswa dapat melafalkan kata- kata benda Bahasa Rejang dengan tepat                                      |
|    |       |     | 3. Siswa mampu membaca bueak tuwei tulisan Rejang                                     | 3. Siswa dapat membaca bueak tuwei tulisan Rejang dengan tepat                                             |
|    |       |     | 4. Siswa mampu menulis bueak tuwei tulisan Rejang                                     | 4. Siswa dapat menulis bueak tuwei tulisan Rejang dengan tepat                                             |
| 2  | I     | II  | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata benda dalam bahasa Rejang                       | 1. Siswa dapat menemukan gambar yang sesuai dengan kata-kata benda yang diperdengarkan dalam bahasa Rejang |
|    |       |     | 2. Siswa mampu mengucapkan kalimat sederhana dalam Bahasa Rejang                      | 2. Siswa dapat mengucapkan satu kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal dan intonasi yang tepat       |
|    |       |     | 3. Siswa mampu membaca kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                          | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat dalam bahasa Rejang  |
|    |       |     | 4. Siswa mampu menulis kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menyusun kata benda dengan kartu huruf dalam tulisan Rejang menggunakan tanda bunyi         |

|   |     |    |                                                                                                              |                                                                                                        |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | II  | I  | 1. Siswa mampu mendengar kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                                               | 1. siswa mampu mengartikan kalimat sederhana bahasa Rejang ke dalam bahasa Indonesia                   |
|   |     |    | 2. Siswa mampu mengucapkan nama-nama benda yang digambarkan dalam bahasa Rejang                              | 2. Siswa dapat mengucapkan nama-nama benda yang digambarkan dalam bahasa Rejang                        |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring dengan lafal yang baik kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                  | 3. Siswa dapat membaca nyaring dengan lafal yang baik kalimat sederhana dalam bahasa Rejang            |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang                        | 4. Siswa dapat menuliskan kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan.                     |
| 4 | II  | II | 1. Siswa mampu mendengarkan pengalaman sehari-hari dalam bahasa Rejang                                       | 1. Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang diperdengarkan. |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Rejang tentang identitas diri di depan kelas                      | 2. Siswa dapat melakukan percakapan dalam bahasa Rejang tentang identitas diri di depan kelas          |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal yang baik                        | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal yang baik                  |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan tanda bunyi dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menuliskan bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang   |
| 5 | III | I  | 1. Siswa mendengarkan kalimat tanya dalam bahasa Rejang                                                      | 1. Siswa dapat menjawab kalimat tanya dalam bahasa Rejang yang diperdengarkan                          |

|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari               | 2. Siswa dapat bercakap-cakap dengan bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan intonasi yang benar              | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan intonasi yang benar              |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      | 4. Siswa dapat menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      |
| 5 | III | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan bait lagu dalam bahasa Rejang                                          | 1. Siswa dapat memahami arti bait lagu yang diperdengarkan                                         |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membuat kalimat tanya bahasa Rejang                                                 | 3. Siswa dapat membuat kalimat tanya dalam bahasa Rejang                                           |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    | 4. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    |
| 6 | III | II | 1. Siswa mampu mendengarkan dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                  | 1. Siswa memahami isi dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                        |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar | 3. Siswa dapat membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar |

|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | III | II | 4. Siswa mampu menulis kata-kata dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kata-kata dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang |
|   |     |    | 1. Siswa mampu mendengarkan teka-teki dalam bahasa Rejang                                          | 1. Siswa dapat membuat teka-teki dalam bahasa Rejang                                               |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pengalaman di hari libur                                     | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pengalaman di hari libur dengan menggunakan bahasa Rejang    |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca cerita dalam bahasa Rejang                                                  | 3. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan cerita dalam bahasa Rejang                   |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah dalam bahasa Rejang            | 4. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah dalam bahasa Rejang            |
| 7 | IV  | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan cerita rakyat dalam bahasa Rejang                                      | 1. Siswa memahami isi cerita rakyat dalam bahasa Rejang                                            |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari di luar jam sekolah dalam bahasa Rejang | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari di luar jam sekolah dalam bahasa Rejang |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca kalimat "permohonan maaf" dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar    | 3. Siswa dapat membaca kalimat "permohonan maaf" dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar    |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kegunaan peralatan rumah tangga dalam bahasa Rejang dengan                  | 4. Siswa dapat menulis kegunaan peralatan rumah tangga dalam bahasa dan tulisan Rejang             |

|   |    |    |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    | intonasi yang benar                                                                                                       |                                                                                                                           |
|   |    |    | 5. Siswa mampu mendengarkan satu bait puisi dalam bahasa Rejang                                                           | 5. Siswa dapat memahami isi satu bait puisi dalam bahasa Rejang                                                           |
|   |    |    | 6. Siswa mampu menceritakan pengalaman berkunjung ke rumah keluarga                                                       | 6. 6. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkunjung ke rumah keluarga                                                    |
|   |    |    | 7. Siswa mampu membaca peribahasa dalam bahasa Rejang                                                                     | 7. Siswa dapat membuat pertanyaan dalam bahasa Rejang                                                                     |
| 8 | IV | II | 8. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah yang ada di dalam kelas dalam bahasa Rejang           | 8. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah yang ada di dalam kelas dalam bahasa Rejang           |
|   |    |    | 1. Siswa mampu mendengarkan sejarah asal-usul suku bangsa Rejang dalam bahasa Rejang                                      | 1. Siswa memahami sejarah asal-usul suku bangsa Rejang dalam bahasa Rejang                                                |
|   |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan hari-hari besar dalam bahasa Rejang                                        | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan hari-hari besar dalam bahasa Rejang                                        |
|   |    |    | 3. Siswa mampu membaca surat izin dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                                          | 3. Siswa dapat membaca surat izin dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                                          |
|   |    |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat dengan menggunakan kata benda yang ada di sekitar sekolah dengan bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kalimat dengan menggunakan kata benda yang ada di sekitar sekolah dengan bahasa dan tulisan Rejang |
|   |    |    | 5. Siswa mampu membaca beberapa bait lagu dalam bahasa Rejang                                                             | 5. Siswa dapat menemukan kosakata sulit dari bait lagu dalam bahasa Rejang                                                |
|   |    |    | 6. 6. Siswa mampu menulis kalimat yang belum                                                                              | 6. Siswa dapat menyempurnakan kalimat dalam bahasa                                                                        |

|   |   |    | sempurna dalam bahasa Rejang                                                                     | Rejang                                                                                                 |
|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | V | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan pidato singkat dalam bahasa Rejang                                   | 1. Siswa dapat menemukan pesan pidato singkat dalam bahasa Rejang                                      |
|   |   |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan gotong-royong di sekolah dalam bahasa Rejang      | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan gotong-royong di sekolah dalam bahasa Rejang            |
|   |   |    | 3. Siswa mampu membaca puisi dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                      | 3. Siswa dapat membaca puisi dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                            |
|   |   |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kalimat dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang       |
|   |   |    | 5. Siswa mampu mendengarkan lagu daerah Rejang                                                   | 5. Siswa dapat menyanyikan lagu daerah Rejang                                                          |
|   |   |    | 6. Siswa mampu menyusun cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                     | 6. Siswa dapat menyusun cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                           |
| 9 | V | II | 1. Siswa mampu mendengarkan kata sambutan perpisahan dalam bahasa Rejang                         | 1. Siswa dapat menemukan isi kata sambutan perpisahan dalam bahasa Rejang                              |
|   |   |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang peraturan tata tertib sekolah dalam bahasa Rejang          | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang peraturan tata tertib sekolah dalam bahasa Rejang                |
|   |   |    | 3. Siswa mampu membaca teks pidato dengan menggunakan bahasa Rejang                              | 3. Siswa dapat membacakan teks pidato dengan menggunakan bahasa Rejang secara nyaring                  |
|   |   |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat tanya dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa              | 4. Siswa dapat menulis kalimat tanya dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang |

|   |    |    |                                                                                                            |                                                                                                            |
|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    | dan tulisan Rejang                                                                                         |                                                                                                            |
|   |    |    | 5. Siswa mampu membaca nyaring pribahasa Rejang                                                            | 5. Siswa dapat membaca nyaring peribahasa Rejang                                                           |
|   |    |    | 6. Siswa mampu menulis cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                                | 6. Siswa dapat menulis cerita sederhana dalam bahasa Rejang dengan sistematis                              |
| 1 | VI | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata ucapan terimakasih dalam bahasa Rejang                               | 1. Siswa dapat mengucapkan kembali kata-kata ucapan terimakasih dalam bahasa Rejang                        |
| 0 |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah dalam bahasa Rejang | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah dalam bahasa Rejang |
|   |    |    | 3. Siswa mampu membaca kata-kata nasehat dengan menggunakan bahasa Rejang                                  | 3. Siswa dapat membacakan kata-kata nasehat dengan menggunakan bahasa Rejang                               |
|   |    |    | 4. Siswa mampu memahami teknik menulis huruf Rejang                                                        | 4. Siswa dapat menjelaskan teknik menulis huruf Rejang                                                     |
| 1 | VI | II | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata ucapan selamat dalam bahasa Rejang                                   | 5. Siswa dapat melafalkan kembali ucapan selamat dalam bahasa Rejang                                       |
| 0 |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang hobi dalam bahasa Rejang                                             | 6. Siswa dapat bercakap-cakap tentang hobi dalam bahasa Rejang                                             |
|   |    |    | 3. Siswa mampu membaca kata-kata iklan dalam bahasa Rejang                                                 | 7. Siswa dapat memahami pesan iklan dalam bahasa Rejang                                                    |
|   |    |    | 4. Siswa mampu menulis angka bejagung                                                                      | 8. Siswa dapat menulis angka bejagung                                                                      |

**KOMPETENSI DASAR**  
**KELAS VII-IX SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)**

| NO | KELAS | SMT | ASPEK STANDAR KOMPETENSI                                                                     | KOMPETENSI DASAR                                                                                  |
|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VII   |     | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                      | 1. Siswa dapat menggunakan kosakata dalam teks percakapan dengan tepat.                           |
|    |       |     | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan.                      | 2. Siswa dapat mengidentifikasi tokoh dalam dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan             |
|    |       |     | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                           | 3. Siswa dapat memperkenalkan diri sendiri dengan pelafalan yang tepat                            |
|    |       |     | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.                | 4. Siswa dapat menceritakan sebuah gambar dengan pelafalan yang tepat                             |
|    |       |     | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                               | 5. Siswa dapat mengartikan kosakata dalam teks percakapan yang tepat                              |
|    |       |     | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                              | 6. Siswa dapat membaca secara tepat satu paragraf cerita rakyat Rejang sesuai dengan pelafalannya |
|    |       |     | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis pesan singkat dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga     |
|    |       |     | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.     | 8. Siswa dapat menulis cerita pengalaman pribadi dengan tepat                                     |

|   |      |  |                                                                                           |                                                                                                                |
|---|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | VIII |  | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                   | 1. Siswa dapat menuliskan kembali teks percakapan dengan kosakata yang tepat                                   |
|   |      |  | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan.                   | 2. Siswa dapat mengidentifikasi tema dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                                 |
|   |      |  | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                        | 3. Siswa dapat menceritakan kegiatan sehari-hari dengan pelafalan yang tepat                                   |
|   |      |  | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.             | 4. Siswa dapat menceritakan sebuah gambar dengan pelafalan yang tepat.                                         |
|   |      |  | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                            | 5. 1. Siswa dapat menggunakan kata sapaan yang tepat dalam teks percakapan                                     |
|   |      |  | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                           | 6. Siswa dapat membaca satu paragraf cerita rakyat Rejang dengan tepat sesuai dengan intonasi dan pelafalannya |
|   |      |  | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis beberapa kalimat dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga               |
|   |      |  | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.  | 8. Siswa dapat menulis cerita pendek dalam bahasa Rejang dengan tepat                                          |
| 3 | IX   |  | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                   | 1. Siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat untuk melengkapi teks dialog percakapan yang diperdengarkan     |
|   |      |  | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                    | 2. Siswa dapat menyimpulkan amanat dalam dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                             |

|  |  |  |                                                                                              |                                                                                                                       |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                           | 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi dengan pelafalan yang tepat                                            |
|  |  |  | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.                | 4. Siswa dapat menyampaikan informasi cerita bergambar dengan urutan yang tepat dan pelafalan yang jelas              |
|  |  |  | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                               | 5. Siswa dapat menyimpulkan teks percakapan sesuai dengan konteks                                                     |
|  |  |  | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                              | 6. Siswa dapat membaca satu paragraf cerita rakyat Rejang dengan tepat sesuai dengan pelafalan, intonasi, dan gesture |
|  |  |  | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis dialog antar teman dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga                    |
|  |  |  | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.     | 8. Siswa dapat menulis pantun dalam bahasa Rejang dengan tepat                                                        |

**KOMPETENSI DASAR**  
**KELAS X-XII SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)**

| NO | ASPEK        | STANDAR KOMPETENSI                                                                                                           | KOMPETENSI DASAR                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MENDENGARKAN | 1. Siswa mampu memahami perubahan bunyi dalam kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Rejang yang diperdengarkan                | 1. Siswa mampu membedakan kalimat aktif dan pasif dalam percakapan yang diperdengarkan.                                                                                                                                                   |
|    |              | 2. Siswa mampu memahami pesan moral dalam peribahasa Rejang                                                                  | 2. Siswa mampu mengemukakan pesan moral dalam peribahasa Rejang yang diperdengarkan.                                                                                                                                                      |
|    |              | 3. Siswa mampu memahami pesan yang terkandung dalam syair lagu Rejang                                                        | 3. Siswa mampu menemukan pesan yang terkandung dalam syair lagu Rejang.                                                                                                                                                                   |
| 2  | BERBICARA    | 1. Siswa mampu mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi dengan menggunakan kalimat tanya dalam percakapan bahasa Rejang | 1. Siswa mampu menanyakan informasi dengan menggunakan kalimat tanya (jano, api, bene, tengen, nak-ipe/dik-ipe, awei-ipe)<br>2. Siswa mampu menyampaikan informasi dengan menggunakan kata depan (nak, mai, dik) dalam percakapan Rejang. |
|    |              | 2. Siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita                                                 | 3. Siswa mampu menceritakan sebuah cerita pendek dalam bahasa Rejang.                                                                                                                                                                     |

|   |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | MEMBACA | 1. Siswa mampu memahami wacana tulis dalam tulisan Rejang                            | 1. Siswa mampu menemukan ketibeak baso (anok, indok, bapok, ninik, sebei, puyang, muning, buluak, pelmong, teak bibik, tamang, minen, mamak, wok, kuyung, upik, asuak, kakok, adik, dayang, gindo, senenami, sepasuak) dalam wacana tulis aksara Rejang.              |
|   |         | 2. Siswa mampu memahami isi berbagai teks bacaan sastra dalam tulisan Rejang         | 2. Siswa mampu menemukan penggunaan kata ganti orang (kumu, miko, si, ko, udi, tobo o, kaben, keme, uku) dalam wacana tulis aksara Rejang.<br>3. Siswa mampu membacakan kalimat pengandaian (amen-kirone, kaleu) dalam wacana tulis aksara Rejang.                    |
| 4 | MENULIS | 1. Siswa mampu mengapresiasi pikiran, perasaan, dan informasi melalui tulisan Rejang | 4. Siswa mampu membacakan pantun dalam wacana tulis aksara Rejang.                                                                                                                                                                                                    |
|   |         | 2. Siswa mampu mengapresiasi peribahasa Rejang                                       | 1. Siswa mampu menyusun beberapa kalimat dalam tulisan Rejang dengan menggunakan kata penghubung (ngen, dik/de)<br>2. Siswa mampu menulis kalimat ajakan (aro, maro, mi-ndai) dalam tulisan Rejang.<br>3. Siswa mampu menulis peribahasa Rejang dalam tulisan Rejang. |

Lampiran :



## PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI REJANG LEBONG**

- Menimbang :      a. bahwa dalam rangka berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia seutuhnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewajiban untuk mengatur sistem penyelenggaraan Pendidikan yang selaras dengan pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, secara tegas telah diatur dan ditetapkan urusan – urusan bidang pendidikan yang telah diserahkan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 1091 );

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);  
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Tehknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang perpu nomor 3 tahun 2005 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
9. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan
11. Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  13. 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
  14. Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  15. 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  16. 4864);
  - Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
  17. Rejang Lebong tahun 2008 Nomor 20 Seri E).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
  18. 2008 Nomor 21 Seri D).

19.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN BUPATI REJANG LEBONG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:     **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
5. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
6. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan internal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Pendidikan Formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan Keluarga dan Lingkungan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangkasan, Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan Jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.

13. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan Umum dan Kejuruan yang diselenggarakan bagi Lulusan Pendidikan Dasar.
14. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan tentang Ajaran Agama dan/atau menjadi Ahli Ilmu Agama.
15. Pendidikan Luar Biasa adalah Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang **berkelainan** yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
16. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Agama Sosial, budaya, Aspirasi dan Potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
17. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar/ sederajat.
20. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk program Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak usia 4 tahun sampai 6 tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 tahun.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 tahun.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dalam program Pendidikan 3 tahun.
25. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
27. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah Pendidikan Menengah Keagamaan pada jenjang Pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik tentang Ajaran Agama Islam.

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
29. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instuktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
32. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
33. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
34. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
35. Badan akreditasi sekolah/madrasah yang selanjutnya disingkat BAS/M adalah Badan Evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan Program pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
37. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Tenaga Kependidikan, masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana.
38. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.
39. Komite Sekolah atau Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komonitas sekolah atau madrasah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.
40. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong.
41. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah Badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
42. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
43. Perlakuan khusus di Bidang Pendidikan adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pasal 3**

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
  - a. pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
  - b. pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal;
  - c. pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV VISI DAN MISI PENDIDIKAN**

### **Pasal 5**

Visi Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong adalah terwujudnya Pendidikan yang berkualitas bermutu serta berakhlak mulia di Kabupaten Rejang Lebong.

### **Pasal 6**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Misi Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkaji dan mengembangkan serta melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha serta PNS yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Penyelenggaraan Diklat atau memfasilitasi pelatihan –pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan mengembangkan program –program pengembangan kemampuan guru;
- d. Memberikan pelayanan pelatihan tentang perubahan-perubahan kurikulum;
- e. Memberikan dukungan fasilitas teknis administratif dalam pengelolaan urusan manajemen sekolah;
- f. Meningkatkan kualitas profesional guru melalui penataran singkat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT,**  
**PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Warga Negara**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh perlakuan khusus di bidang pendidikan.
- (5) Setiap Warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat.

**Pasal 8**

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar sampai tamat.
- (2) Setiap Warga Negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Orang Tua**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Orang Tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang tua memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
- (3) Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan Pendidikan Informal di lingkungan keluarganya.

- (4) Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai Pendidikan bagi anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu yang dibebaskan kewajiban tersebut sampai dengan Pendidikan Dasar.

### **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 11**

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi Program Pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan

### **Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 12**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membangun, penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada Satuan Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu Pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar Keagamaan.

### **Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan berhak :
  - a. Mendapatkan Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
  - b. Mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

- d. Mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
  - e. Pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
  - f. Menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban :
- a. Menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
  - b. Ikut menanggung biaya Pendidikan kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
  - c. Menjaga dan memelihara serana dan prasarana Pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang berlaku.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dalam wilayah Daerah.

### **Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan Pendidikan yang bermutu, sesuai standar Pendidikan yang ditetapkan.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggaraan Satuan Pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan baik Formal maupun Non Formal, wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber Peserta Didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, dan sarana prasarana.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan**

### **Pasal 17**

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - b. Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah;
  - d. Berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Penghapusan atau Penutupan**

### **Pasal 18**

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
  - b. tidak lagi menyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara Pendidikan dan atas hasil Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Perubahan Status**

### **Pasal 19**

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh Sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi Satuan Pendidikan berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal yang dikelola oleh unit pelaksana teknis.
- (2) Ketentuan pelaksanaan perubahan status Satuan Pendidikan dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informasi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- (2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

**Pasal 21**

- (1) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Jenjang Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (4) Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi.

**Pasal 22**

- (1) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berbentuk kursus, Pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diselenggarakan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar mandiri.

#### **Pasal 24**

Pendidikan Keagamaan pada jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini**

#### **Pasal 25**

Pendidikan Anak Usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal, dan/atau Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 1**

#### **Pendidikan Anak Usia Dini Formal**

#### **Pasal 27**

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk :
  - a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
  - c. Raudatul Athfal (RA);
  - d. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
  - a. Kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
  - b. Kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit di masing-masing Kecamatan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal**

#### **Pasal 28**

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Non Formal berbentuk :

- a. Kelompok bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Taman Penitipan Anak(TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan usia dan minat Peserta Didik.

### **Pasal 29**

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

## **Bagian Ketiga Pendidikan Dasar**

### **Pasal 30**

- (1) Pendidikan Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 1 Pendidikan Dasar Formal**

### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas:
  - a. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah akselerasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan Perda ini, Pemerintah Daerah sudah membangun Pendidikan Dasar Unggulan minimal 1(satu) sekolah dimasing – masing Kecamatan yang memiliki fasilitas berstandar Nasional dengan segala beban di bebaskan dalam APBD Kabupaten dan atau sumber-sumber dana lainnya.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 2 Pendidikan Dasar Non Formal**

### **Pasal 32**

Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Non Formal terdiri atas :

- a. Program keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara.

- b. Program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 ( sembilan ) tahun, yang terdiri dari :
  - 1) Kejar Paket A setara Sekolah Dasar ( SD ) atau Madrasah Tsanawiyah ( MTs );
  - 2) Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Program kursus ;
- d. Program Pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program Pendidikan dan Pelatihan.

**Paragraf 3**  
**Pendidikan Dasar Layanan Khusus**  
**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar layanan khusus dan/atau Pendidikan Dasar layanan tambahan bagi peserta Didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau daya serap rendah atau bantuan khusus.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar layanan khusus dan/atau Pendidikan Dasar layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Menengah**  
**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 1**  
**Pendidikan Menengah Formal**  
**Pasal 35**

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas :
  - a. Sekolah Menengah Atas ( SMA ) dan Madrasah Aliyah ( MA ) atau bentuk lain sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) dan Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK ) atau bentuk lain sederajat.;
  - c. Sekolah Menengah Luar Biasa ( SMLB )
- (4) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan Menengah Non Formal dan Informal**

**Pasal 36**

- (1) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Non Formal, terdiri atas :
  - a. Program Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas ( SMA ) atau Madrasah Aliyah (MA);
  - b. Program kursus – kursus ;
  - c. Program Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan Menengah Keluarga atau Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

**Paragraf 3**  
**Pendidikan Menengah Layanan Khusus**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah Layanan Khusus dan/atau Pendidikan Menengah Layanan tambahan bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan/atau ekonomi dan/atau memiliki daya serap rendah atau bantuan khusus.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah layanan khusus dan / atau Pendidikan Menengah layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga**  
**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diselenggarakan berdasarkan program Pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KURIKULUM**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pada jalur pendidikan non formal berisikan kajian dan pelajaran umum, pokok dan penunjang yang mengacu pada standar kompetensi.
- (4) Satuan Pendidikan di Kabupaten mencakup 2 (dua) Komponen, yaitu kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal. Adapun pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal adalah ;
  - d. Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Rejang Lebong (BUDAYA DAN BAHASA REJANG).
  - e. Muatan Kurikulum lokal setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
  - f. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Ketentuan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PENGADAAN BUKU**

### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah uang / subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan buku teks diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X BAHASA PENGANTAR**

### **Pasal 44**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Pendidikan Nasional.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

## **BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 45**

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

### **Pasal 46**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh;
  - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban;
- a. Menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
  - c. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### **Pasal 47**

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 48**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikasi sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai Pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berbudi pekerti luhur;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Calon Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan, calon Tenaga Kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berbudi pekerti luhur;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan;
  - e. Menjadi teladan bagi lingkungan Pendidikan.
- (3) Calon Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian**

#### **Pasal 50**

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan atau pertimbangan pelaksana teknis bidang Pendidikan.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kurun waktu untuk memindahkan tenaga Pendidik dalam Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan minimal 3 tahun bertugas.
- (5) Kurun waktu memindahkan tenaga Pendidik keluar Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan minimal 5 tahun bertugas.

- (6) Tata cara penugasan, pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 51**

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Pembinaan dan pengembangan**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan menjadi tanggungjawab Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan disiplin Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab Pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pengembangan kemampuan Tenaga Pendidik wajib di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kelima Kesejahteraan**

#### **Pasal 54**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Penghargaan**

##### **Pasal 55**

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan /atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Penghargaan kepada anak didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya berupa beasiswa dan penghargaan lainnya di sesuaikan dengan kemampuan Daerah

### **Bagian Ketujuh**

#### **Perlindungan Hukum**

##### **Pasal 56**

- (1) Perlindungan Hukum diberikan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
  - b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia;
  - c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan Pendidikan dan Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Ikatan Profesi**

##### **Pasal 57**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan Pendidik.

- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Pendidik Warga Negara Asing**

**Pasal 58**

- (1) Untuk peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyelenggara Pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat mengangkat Warga Negara Asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai Pendidik.
- (2) Pendidik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

**Pasal 59**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, dan kejiwaan Peserta Didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan pada semua Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KEPALA SEKOLAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**

**Pasal 60**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 61**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 62**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
  - b. Memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Kinerja**  
**Pasal 63**

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai :
  - a. Pemimpin;
  - b. Manajer;
  - c. Pendidik;
  - d. Administrator;
  - e. Wirausahawan;
  - f. Pencipta iklim kerja;
  - g. Penyelia
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 64**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Masa penugasan berakhir;
  - c. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
  - a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - b. Diangkat pada jabatan lain;
  - c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - d. Diberhentikan dari jabatan guru;
  - e. Meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENDANAAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 65**

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pendanaan**  
**Pasal 66**

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, cakupan dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan.
- (3) Usaha pengumpulan dana pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengalokasian Dana Pendidikan**  
**Pasal 67**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah.

**Pasal 68**

- (1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bupati melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan.

- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, badan hukum sebagai pengelola Pendidikan memegang peranan pengelolaan dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Pengelolaan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Operasional Sekolah**  
**Pasal 69**

Bantuan Operasional Sekolah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB XV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN**  
**Pasal 70**

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan Pendidikan di daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memberikan Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan bagi Peserta Didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengelola Warga Negara Indonesia.

**BAB XVI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 71**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai Sumber Daya, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.

**Pasal 72**

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat**

### **Pasal 73**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kekhasan Agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi Pendidikan serta Manajemen dan pendanaannya sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah.
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber lain dari Pemerintah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH / MADRASAH**

### **Bagian Kesatu Dewan Pendidikan Pasal 74**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya Demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai Lembaga Mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

### **Komite Sekolah / Madrasah**

#### **Pasal 75**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta Pengawasan Pendidikan ditingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Komite Sekolah/Madrasah.

### **BAB XVIII**

#### **PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

##### **Pasal 76**

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta Didik yang diterima pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan umum, administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Satuan Pendidikan.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja.

### **BAB XIX**

#### **EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Evaluasi**

##### **Pasal 77**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta didik, lembaga dan program Pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta didik dilaksanakan oleh Pendidikan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, Satuan pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Akreditasi**

### **Pasal 78**

- (1) Akreditasi Sekolah / Madrasah pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh BAS / M dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Organisasi dan tata kerja BAS / M dan Pendidikan Non formal, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 79**

- (1) Tujuan dilakukan akreditasi untuk :
  - a. Memperoleh gambaran obyektif atas kinerja yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan.
  - b. Menentukan tingkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas dan akuntabilitas.
- (3) Akreditasi dilakukan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan formal dan non formal.

## **Bagian Ketiga Sertifikasi**

### **Pasal 80**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara Pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang Terakreditasi/Lembaga Sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX KERJASAMA**

### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri, yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan di Sekolah/Madrasah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI PENGAWASAN**

### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 83**

Setiap orang, organisasi dan Satuan Pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 84**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

### **Pasal 85**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal , 27 Juni 2009

**BUPATI REJANG LEBONG**  
*ttd*  
**S U H E R M A N**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 21 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH,**  
*ttd*  
**TARMIZI USULUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2009 NOMOR 27 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

*ttd*

MAULANA, SH.,M.Si  
NIP. 19570515 198203 1 008

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dan orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (4) berbunyi : Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-

kurangnya 20% ( dua puluh persen ) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional, hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20% ( dua puluh persen ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% ( dua puluh persen ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

Daerah mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong berusaha mengerahkan sumber daya yang ada sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

|          |               |
|----------|---------------|
| Pasal 1  | : cukup jelas |
| Pasal 2  | : cukup jelas |
| Pasal 3  | : cukup jelas |
| Pasal 4  | : cukup jelas |
| Pasal 5  | : cukup jelas |
| Pasal 6  | : cukup jelas |
| Pasal 7  | : cukup jelas |
| Pasal 8  | : cukup jelas |
| Pasal 9  | : cukup jelas |
| Pasal 10 | : cukup jelas |
| Pasal 11 | : cukup jelas |
| Pasal 12 | : cukup jelas |
| Pasal 13 | : cukup jelas |
| Pasal 14 | : cukup jelas |
| Pasal 15 | : cukup jelas |
| Pasal 16 | : cukup jelas |
| Pasal 17 | : cukup jelas |
| Pasal 18 | : cukup jelas |

Pasal 19 : cukup jelas  
 Pasal 20 : cukup jelas  
 Pasal 21 : cukup jelas  
 Pasal 22 : cukup jelas  
 Pasal 23 : cukup jelas  
 Pasal 24 : cukup jelas  
 Pasal 25 : cukup jelas  
 Pasal 26 : cukup jelas  
 Pasal 27 : cukup jelas  
 Pasal 28 : cukup jelas  
 Pasal 29 : cukup jelas  
 Pasal 30 : cukup jelas  
 Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : bagi Peserta Didik yang tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan dapat menyelesaikan studinya sampai selesai.

Pasal 34 : cukup jelas  
 Pasal 35 : cukup jelas  
 Pasal 36 : cukup jelas  
 Pasal 37 : cukup jelas  
 Pasal 38 : cukup jelas  
 Pasal 38 : cukup jelas  
 Pasal 39 : cukup jelas  
 Pasal 40 : cukup jelas  
 Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) : Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program Pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Bahasa Daerah pengantar yang digynakan adalah Bahasa Rejang dan Lembak yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) : Penugasan dan pemindahan dengan mempertimbangkan domisili pendidik dan tenaga pendidik yang bersangkutan.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : Pengembangan kemampuan Tenaga Pendidik adalah memberikan kesempatan untuk meningkatkan strata pendidikan berikutnya.

Pasal 55 : cukup jelas

Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 : cukup jelas

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) : Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 62 : cukup jelas  
 Pasal 63 : cukup jelas  
 Pasal 64 : cukup jelas  
 Pasal 65 : cukup jelas  
 Pasal 66 : cukup jelas  
 Pasal 67 : cukup jelas  
 Pasal 68 : cukup jelas  
 Pasal 69 : cukup jelas  
 Pasal 70 : cukup jelas  
 Pasal 71 : cukup jelas  
 Pasal 72 : cukup jelas  
 Pasal 73 : cukup jelas  
 Pasal 74 : cukup jelas  
 Pasal 75 : cukup jelas  
 Pasal 76 : cukup jelas  
 Pasal 77 : cukup jelas  
 Pasal 78 : cukup jelas  
 Pasal 79 : cukup jelas  
 Pasal 80 : cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud kerjasama dengan pihak swasta adalah kerjasama antara sekolah dengan swasta dalam rangka pengembangan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 82 : cukup jelas  
 Pasal 83 : cukup jelas  
 Pasal 84 : cukup jelas  
 Pasal 85 : cukup jelas

**Lampiran Makalah [1] :**

**TANTANGAN ADAT DAN BUDAYA REJANG  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG PADA ERA KEKINIAN**

**MAKALAH**

**Disampaikan Pada Kegiatan FGD Kurikulum Muatan Lokal  
Di Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 24 – 26 Februari  
Di hotel Griya Anggita Curup**

**Oleh**

**Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd  
Dosen STAIN Curup**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PADANG  
WILAYA KERJA SUMATERA BARAT, BENGKULU,**

## DAN SUMATERA SELATAN 2014

### TANTANGAN ADAT DAN BUDAYA REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG PADA ERA KEKINIAN

Oleh  
**Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd**

#### **A. Permasalahan**

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatera selain suku Bangsa Melayu. Argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang sejarah Rejang ini adalah tulisan Jhon Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun (1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya Empat Petulai Rejang yaitu: Joorcalang, Beremmani (Bermani), Selopo (Selupu) dan Toobey (Tubai).

Catatan-catatan lain tentang Kedudukan 4 Petulai tersebut sebagai komunitas adat asli Rejang, dalam laporannya mengenai adat-Federatie In de Residentie's Bengkoelen en Palembang Dr. JW. Van Royen menyebutkan bahwa kesatuan Rejang yang paling murni dimana marga-marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang di satu Bang, harus diakui Rejang yang adadi wilaya Lebong.

Suku Rejang, yang dikenal sebagai satu di antara sedikit suku asli penduduk Bengkulu, memiliki budaya yang beragam. Ragam budaya itu meliputi tulisan, adat istiadat, hukum adat, kesenian, dan sastra. Khusus untuk sastra lisan, suku ini juga memiliki berbagai macam jenis sastra, antara lain Nandei, Geritan, Berdai, Pantun, Syair, Sambel, dan Serambeak. Janis sastra yang disebut terakhir inilah yang lebih populer digunakan sehari-hari, baik oleh orang tua, remaja, dan anak-anak dalam berinteraksi.

Suku Rejang, adalah salah satu suku yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong.

Asal usul Suku Rejang sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun Suku ini dikategorikan sebagai Proto Malayo. Yang berarti sebagai salah

- 
- ❖ Makalah disampaikan pada kegiatan FGD kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 – 26 Februari di Hotel Griya Anggita Curup.

satu suku tertua di Sumatera. Sejarah asal usul Suku Rejang telah terhapus dan hilang, atau tidak tercatat, sehingga hanya terdapat beberapa spekulasi sejarah mengenai asal-usul mereka, selain beberapa cerita rakyat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Suku Rejang termasuk suku dengan populasi terbesar di Provinsi Bengkulu. Beberapa kebudayaan masih terpelihara dengan baik, Mereka tidak mudah menyerap kebudayaan atau apapun dari adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, sampai saat ini kebudayaan masyarakat Rejang masih terbilang asli. Sejak zaman dahulu Suku Rejang memang telah memiliki adat-istiadat. Karena mayoritas suku Rejang masih mempertahankan kebudayaan mereka, tidak heran jika hukum adat yang berupa denda dan cuci kampung masih dipertahankan hingga sekarang. Suku Rejang sangat memuliakan harga diri, seperti halnya penjagaan martabat kaum perempuan, penghinaan terhadap para pencuri, penyiksaan dan pemberian hukuman denda terhadap pelaku *zina*.

Suku Rejang mayoritas adalah penganut agama Islam yang taat. Karena itu, beberapa tradisi adat Rejang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kepercayaan adat masa lalu telah berubah menjadi kepercayaan terhadap ajaran agama Islam. Budaya Suku Rejang juga identik dengan nuansa Islam.

Adat dan budaya Rejang sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia memiliki tiga wujud yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, wujud yang kedua sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan wujud yang terakhir ialah sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dimasa lalu, ketiga wujud kebudayaan diatas sangatlah dijunjung tinggi keberadaannya di kalangan masyarakat Rejang, segala sesuatu hal yang menyangkut kehidupan selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang berbau kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas dan merupakan jati diri dan warisan leluhur yang terus berkembang di era tersebut. Bentuk-bentuk kebudayaan lokal ini diantaranya berbentuk fisik maupun non fisik, seperti bahasa Rejang Aksara Kaganga, tata krama, bermacam-macam tarian, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.

Tapi di era kekinian, semua wujud kebudayaan lokal yang ada seakan-akan mulai terlupakan dan luntur dimakan zaman baru yang menuntut segala sesuatunya harus berbau hal yang berstatus "*modern*" dan mengikuti trend yang sedang berlaku secara International. Pola pemikiran yang telah bergeser tersebut mengakibatkan keberadaan kebudayaan yang rumit, tidak praktis, di era kekinian masyarakat Rejang modern sudah tidak mau direpotkan lagi dengan *tradisi* yang dianggap sangat sulit untuk dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan generasi Rejang saat ini.

## **B. Pembahasan**

Adat adalah kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun menurun, kebiasaan yang turut dari nenek moyang sejak zaman dahulu kala (EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia, 2008:16). Sedangkan pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan

diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. (wikipedia:2003) Kemudian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia sedang pengertian budaya menurut Kocutjara Ningrat budaya adalah suatu sistem gagasan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan dengan belajar.

Budaya merupakan hasil budi, daya, dan karsa manusia. Budaya merupakan salah satu unsur dasar dalam kehidupan sosial. Budaya mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Budaya mencakup perbuatan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh suatu individu maupun masyarakat, pola berpikir mereka, kepercayaan, dan ideologi yang mereka anut.

Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari budhayah (Bahasa Sanskerta), jamak dari kata budhhi yang artinya budi atau akal. Atau dasar kata tersebut, kebudayaan diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi.

Dalam istilah antropologi, kebudayaan sebagai terjemahan dari kata culture, berasal dari kata latin *Colore*. Artinya mengolah atau mengerjakan yaitu mengolah tanah atau bertani berkaitan dengan alam. Maka berdasarkan arti kata tersebut maka *culture* diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor, yang menulis dalam bukunya *Primitive Culture*, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Definisi lain di kemukakan oleh R. Linton dalam buku *The Cultural Background of Personality*, bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Sementara itu adat istiadat biasanya terdiri atas kebiasaan yaitu kebiasaan dalam masyarakat merupakan tradisi turun temurun yang berkembang terus, berlaku dan dipatuhi dimana-mana.

Berdasarkan pengertian adat dan budaya di atas, dapat diuraikan bahwa wujud dari adat dan budaya Rejang antara lain;

Bahasa Rejang, aksara Ringkung atau Kaganga, adat istiadat, hukum adat, kesenian Rejang, sastra Rejang, pakaian adat, rumah adat, pengetahuan, kepercayaan, moral, kebiasaan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, sopan santun.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Sebagian besar kebutuhan spiritual maupun material manusia dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada tahap awal kebudayaan terbentuk dengan tujuan untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam. Hal ini dapat dijumpai dalam masyarakat yang rendah taraf kebudayaannya.

Pada masyarakat yang sudah kompleks yang taraf kebudayaannya lebih tinggi dimana pada tahap ini manusia dapat memanfaatkan dan menguasai lingkungan alamnya, teknologi memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan apabila mungkin menguasai alam. Dimana dalam artikel Vera Priecheliapa (2003) menyebutkan paling sedikit teknologi itu melingkupi tujuh unsur yaitu:

- a. Alat-alat produktif,
- b. Senjata,
- c. Wadah,
- d. Makanan dan minuman,
- e. Pakaian dan perhiasan,
- f. Tempat berlindung dan perumahan,
- g. Alat-alat transpor.

Perkembangan teknologi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Soviet Rusia, Prancis, Jerman dan sebagainya, merupakan beberapa contoh dimana masyarakatnya tidak lagi pasif menghadapi tantangan alam sekitar.

Norma dan nilai-nilai sosial sangatlah diperlukan dalam menciptakan tata tertib pada aktivitas kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat. Untuk menghadapi kekuatan buruk manusia terpaksa melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk tentang bagaimana manusia bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup yaitu nilai dan norma.

Secara umum fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman dan pengarah hidup bagi manusia, sehingga ia mengerti bagaimana ia harus bertindak, bersikap, berperilaku, baik secara individu maupun kelompok. Pedoman hidup yang dimaksud adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, maupun kebutuhan psikologis yang berpedoman pada kebudayaan yang sudah ada. Jika di dalam kehidupan masyarakat tidak berpedoman kepada kebudayaan maka akan menimbulkan guncangan-guncangan sosial.

Perwujudan keguncangan sosial adalah pertentangan-pertentangan, persaingan yang tidak sehat, mementingkan diri sendiri, mengganggu ketentraman orang lain, dan sebagainya. Untuk menghindari hal-hal yang berakibat buruk, manusia berpedoman pada norma, nilai, pranata, dan pedoman lainnya, yaitu aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat Rejang yang kaya akan nilai-nilai luhur daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pembangunan. Sebagai masyarakat yang memiliki bahasa, aksara dan budaya sendiri, nilai-nilai luhur tersebut telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tanpa harus terjadi tumpang tindih dengan nilai-nilai budaya bangsa. Diantara berbagai nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa nilai-nilai luhur yang dianggap dominan dan mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan di daerah ini. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain Gotong royong, Musyawarah dan mufakat. Gotong royong, Musyawarah dan Mufakat adalah nilai-nilai luhur yang masih sangat melekat dalam masyarakat ini.

#### - **Gotong Royong**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, aktivitas yang didasarkan pada semangat gotong royong masih tetap dilaksanakan baik dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai hubungan kekeluargaan maupun dalam kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu dusun atau desa. Ungkapan “tei ne tanggung jawab besamo, ban benek, lengan sarno-samo masung” yang secara turun temurun diwariskan dan dijiwai oleh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong merupakan nilai-nilai luhur. Dalam hal tolong menolong ada juga ungkapan yang berbunyi “kasiak mbales sayang betimbang, ade tepok tebis, ade tanjung menyuung” yang lebih kurang terjemahannya “kasih dibalas sayang dipertimbangkan, ada tebing di tepi air runtuh ada tanjung menjelma” Maksud dari kiasan ini adalah budi baik dan kasih sayang tidak akan sia-sia. Ungkapan ini pada dasarnya menganjurkan agar anggota masyarakat selalu berbuat baik, tolong-menolong, jangan kikir dengan harta benda dan ilmu pengetahuan.

#### - **Musyawarah dan Mufakat**

Sebagai kelompok masyarakat yang secara historis telah ada sejak zaman Majapahit dahulu, budaya bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan terhadap sesuatu yang harus diputuskan untuk kepentingan bersama telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Ungkapan kio sesudo keker abis, mbeak nyesoa kedong bilai, mbeak nyeletuk kedong malem. Nyesoa coa ko nyesoa bae. Soa nu moi pateak indoi, nyeletuk moi pateak nangis. Kecek nik supayo ko micik, kecek lai supayo ko metai. Mbeak ko micik sesu'ang. Supayo ko metai ngen pupuk kaum”, yang dalam bahasa Indonesia lebih kurang berarti “renungi secara mendalam, pikir sampai habis. Jangan menyesal dikemudian hari, jangan menggerutu di kemudian malam. Sesalmu bukan sembarang sesal. Sesalmu akan menimbulkan tangis, gerutumu akan menimbulkan isak. Kata halus supaya kau resapkan, kata jelas supaya kau artikan. Jangan kau resapkan sendiri. Supaya engkau artikan bersama-sama dengan sanak keluarga”. Ungkapan ini merupakan anjuran agar selalu bermusyawarah dengan sanak famili dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dalam keseharian kita untuk mencari jalan keluarnya. Ungkapan “Pat sepakat, lemo sernpurno” sebenarnya menunjukkan bahwa proses musyawarah untuk mufakat dalam

masyarakat dapat saja dilakukan tanpa harus melibatkan pimpinan formal mereka. Kehadiran pemimpin hanyalah sebagai penyempurna dari kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Sebagai *indigenous community* suku bangsa rejang tentunya memiliki beberapa kearifan local dalam mengurus diri (manusia, alam dan gaib) kemudian dikenal dengan istilah local *adat rian ca'o* atau adat *neak kutai nated*. Aplikasi system ini umumnya dalam system adat Rejang di aplikasikan dalam berbagai bentuk dengan nilai estetika yang tinggi, system demokrasi diaplikasikan dengan musyawarah mupakat oleh tetua adat yang kuat akan legitimasi komunitas 'jurit' yang dipimpinnya, dengan sumber-sumber daya alam system pengelolaannya lebih kental dengan system kepemilikan komunal di beberapa tahapannya dilakukan dengan menampilkan seni budaya yang magis, 'kedurai' adalah salah satu budaya untuk membuka Hutan, 'Mundang Biniak' acara seni budaya ketika menanam padi, dan 'kedurai agung' adalah pentas seni kolosal yang dipercayai mampu menangkat musibah bagi komunitas tertentu.

Implementasi kekinian dari adat dan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong saat ini, antara lain terlihat dari indikator berikut:

Tabel. 1  
Implementasi Adat dan Budaya Rejang saat ini

| No | Unsur                                | Kondisi     |            |
|----|--------------------------------------|-------------|------------|
|    |                                      | Terpelihara | Pergeseran |
| 1  | Bekulo "Basen" / Asen Te'ang         | √           | √          |
| 2  | Mbin cupik moi unen/ min cupik mbioa | √           | √          |
| 3  | Temgak umeak / membuat rumah         | -           | √          |
| 4  | Ngetem / panen padi                  | -           | √          |
| 5  | Bahasa / komunikasi                  | √           | √          |
| 6  | Sastra                               | √           | -          |
| 7  | Baso / sebutan pada kedudukan        | √           | √          |
| 8  | Temungeu umeak beleu                 | -           | √          |
| 9  | Beto'ok / temanem saweak             | -           | √          |
| 10 | Pakaian adat                         | √           | -          |
| 11 | Rumah (arsitek)                      | -           | √          |
| 12 | Kesenian                             | √           | √          |
| 13 | Sistem pemerintahan                  | -           | √          |
| 14 | Balai adat                           | √           | √          |
| 15 | Kerajinan tradisional                | √           | √          |
| 16 | Makanan tradisional                  | √           | √          |
| 17 | Nyanyian                             | √           | √          |
| 18 | Alat-alat pertanian                  | √           | √          |
| 19 | Sistem pengetahuan                   | √           | √          |
| 20 | Mata pencaharian                     | √           | √          |
| 21 | Hukum adat                           | √           | √          |
| 22 | Alat transportasi                    | √           | √          |

Walaupun beberapa unsur dari adat dan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami pergeseran, tapi dengan heterogennya masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, adat dan budaya suku-suku lain di Rejang Lebong tetap memiliki ruang untuk berkembang dan tetap terpelihara. Heterogennya masyarakat itu tidak banyak mempengaruhi substansi adat dan budaya Rejang.

Terpeliharanya substansi dari adat dan budaya di Kabupaten Rejang Lebong, didasari oleh pemahaman akan fungsi dari adat dan budaya itu, yaitu:

1. Fungsi perlindungan
2. Fungsi otoritas dan wewenang
3. Fungsi edukasi
4. Fungsi idiologi dan filosofi
5. Fungsi estetika, etika
6. Fungsi rohani (ritual)
7. Fungsi karakter, ciri khas
8. Fungsi pelestarian
9. Fungsi ukhuwah
10. Fungsi ekonomis
11. Fungsi pengawasan/kendali
12. Fungsi kepuasan
13. Fungsi rekreasi

Pergeseran adat dan budaya di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh beberapa unsur :

1. Masyarakat Rejang Lebong saat ini bersifat heterogen
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Komunikasi bebas (visual, audio, dan audio visual)
4. Masyarakat Rejang adalah masyarakat yang bersifat terbuka menerima perubahan.
5. Belum ada upaya intensif mewariskan adat dan budaya Rejang
6. Telah banyak terlibatnya akademisi dari lingkungan perguruan tinggi dalam upaya penyusunan pendidikan adat, budaya Rejang (muatan lokal)
7. Modernisasi
8. Globalisasi
9. Kurang aktifnya lembaga-lembaga sekolah dalam menggiat pelestarian budaya Rejang.

Pergeseran adat dan budaya yang tidak terkendali kan berdampak pada:

1. Munculnya sikap individualistik
2. Pola hidup konsumtif
3. Gaya hidup kebarat-baratan
4. Kesenjangan sosial
5. Kriminalitas
6. Kenakalan remaja
7. Kerusakan lingkungan
8. Timbulnya konflik

9. Menurunnya daya ikat masyarakat

10. Kehilangan identitas

Untuk tetap terjaganya adat dan budaya Rejang secara baik, perlu dilakukan usaha-usaha berikut:

1. Muatan lokal dengan materi kebudayaan lokal dilakukan secara intensif
2. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang terprogram
3. Memotivasi para pelajar, mahasiswa, pemuda untuk menulis, meneliti adat dan budaya Rejang
4. Membangun museum khusus Rejang atau Pusat Budaya Rejang
5. Menanamkan rasa bangga, rasa memiliki terhadap adat dan budaya rejang
6. Membangun kemitraan, kerja sama dengan beberapa lembaga dan perguruan tinggi dalam menulis, meneliti, menggali, menginpentaris adat dan budaya Rejang
7. Membina sanggar-sanggar kesenian yang ada.

### C. Penutup

Suku Rejang, yang dikenal sebagai satu diantara sedikit suku asli penduduk Bengkulu, memiliki budaya yang beragam, ragam budaya itu meliputi tulisan, adat istiadat, hukum adat, kesenian, dan sastra, khususnya untuk sastra lisan, suku ini juga memiliki berbagai macam jenis sastra, anatara lain Nandei, Gritan, Berdai, Pantun, Syair, sambei, dan serambeak.

Sebagai *indigenous community* suku bangsa Rejang tentunya memiliki beberapa kearifan lokal dalam mengurus diri (manusia, alam dan gaib) kemudian dikenal dengan istilah lokal *adat rian ca'o* atau *adat neak kutai nated*. Aplikasi sistem ini umumnya dalam sistem adat Rejang di aplikasikan dalam berbagai bentuk dengan nilai estetika yang tinggi, sistem demokrasi diaplikasikan dengan musyawarah mupakat yang kuat akan legitimasi komunitas.

Adat dan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong tetap terpelihara tetapi sebagian besar mengalami pergeseran. Walaupun demikian substansinya tetap terpelihara. Heterogenitas suku di Rejang Lebong tetap memiliki ruang kepada komunitas mereka untuk melestarikan, memelihara dari adat dan budaya mereka.

Adat dan budaya itu memiliki banyak fungsi dan menerima tekanan untuk perubahan, oleh sebab itu memerlukan beberapa usaha untuk melestarikannya.

### Bahan Rujukan

- Admin. 2010. *Fungsi dan hakekat Kurikulum*. [www.unsilster.com](http://www.unsilster.com). (diakses tanggal 9 Maret 2013)
- Priechieliapa, Vera, 2013. *Fungsi kebudayaan bagi masyarakat*. [www.verapriechieliapa.blogspot.com](http://www.verapriechieliapa.blogspot.com). (diakses tanggal 9 maret 2013)
- Admin. 2013. [www.respository.usu](http://www.respository.usu). (diakses tanggal 9 maret 2013)
- Admin.2013. *kebudayaan*. <http://id.scribd.com/> (diakses tanggal 9 maret 2013)
- EM Zul Fajri, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Difa Publisher. Jakarta
- Hakikat, Fungsi, Unsur Kebudayaan Dan Pranata Dalam Masyarakat

W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII, hal 178

JW. Van Royen, *adat-federatie in de Residentie's Bengkoelen en Palembang Bab de Redjang*. Hal 18

H. Abdullah Siddik dalam *Hukum Adat Rejang*

## Lampiran Makalah [2] :

### **PERAN BADAN MUSYAWARAH ADAT DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

Oleh :  
**Santoso, SH.,M.Si.**<sup>66</sup>

#### **I. PENDAHULUAN.**

Model pemerintahan sentralistis yang diterapkan pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sempat memati-surikan kearifan budaya lokal dalam pelaksanaan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan di daerah. Khususnya di Propinsi Bengkulu, budaya lokal mengalami nasib yang tragis karena dihapuskannya sistem pemerintahan marga yang telah mengasuh masyarakat adat selama berabad-abad. Hilangnya sistem pemerintahan marga tidak hanya melenyapkan kewenangan-kewenangan unik dalam tata kelola wilayah dan sumber daya alam, seperti hutan, air, tambang, flora dan fauna, tetapi juga mereduksi tatanan kemasyarakatan dari model paguyuban ke model demokrasi yang cenderung liberal, meskipun di bungkus dengan kulit musyawarah mufakat.

Gerakan reformasi yang selanjutnya diikuti dengan kebijakan otonomi daerah dalam bidang pemerintahan merupakan titik balik bangkitnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya lokal dalam membangun daerah. Momentum otonomi daerah yang dimulai dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan ruang untuk

---

<sup>66</sup> Disampaikan pada kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*): *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*, Senin- Selasa, 24-26 Februari 2014

membangkitkan kembali budaya lokal sebagai spirit pembangunan tata kelola pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di daerah.

Konsekwensi logis dari perubahan tatanan pemerintahan daerah adalah makin meningkat dan diperlukannya Peran-peran lembaga sosial kemasyarakatan tradisional adat dalam menggali, menemukan, merekonstruksi, merumuskan dan menegakkan kembali kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan tata pergaulan anggota masyarakat.

Akan tetapi seperti merajut untaian permata yang telah terserak sekian lama, upaya pemberdayaan budaya merupakan pekerjaan yang tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan kecermatan dalam menata urutan permata prioritas, menemukan kembali manik-manik kearifan yang hilang, menyusun rentang benang anggaran, dan memasarkan kepada masyarakat untuk memakainya merupakan pekerjaan yang panjang yang perlu kesabaran dan optimisme.

## II. BMA SEBAGAI AGENT OF CHANGE BUDAYA

Masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan sosial memerlukan pranata (lembaga) adat sebagai sistem yang mengatur tata kelakuan dan hubungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kompleks masyarakat adat dan anggotanya. Sebagai kesatuan budaya, lembaga adat mengatur kebutuhan budaya yang universal meliputi, *pertama*: peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport), *kedua*: mata pencaharian hidup, dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi). *Ketiga*: sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), *keempat*: bahasa (lisan maupun tertulis), *Kelima*: Kesenian (Seni rupa, seni sastra, seni gerak/tari), *Keenam* : sistem pengetahuan dan *Ketujuh*: sistem Religi (sistem kepercayaan).

Lembaga sosial adat seperti lembaga sosial lainnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Kebutuhan sosial masyarakat adat Rejang, khususnya dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dipenuhi oleh lembaga “*marga*” sebagai **lembaga pemerintahan** sekaligus **lembaga adat**. Marga sebagai lembaga pemerintahan adat merupakan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan konsultatif yang berpusat pada kewenangan Pasirah yang sangat luas, efektif dan berwibawa.

Konsep otonomi daerah baik sebelum era pemerintahan sentralistik atau sesudahnya, membagi habis kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah secara umum. Formula pembagian kewenangan yang di generalisir untuk seluruh

Nusantara, secara tidak disadari mengeleminasi kewenangan-kewenangan tradisional spesifik yang sebelumnya selama ber abad-abad telah dimiliki oleh masyarakat tradisional. Banyak kewenangan-kewenangan tradisional yang merupakan sumber daya, modal dan kekayaan masyarakat adat tetap menjadi kewenangan lembaga Negara dan tidak di kembalikan sebagai kewenangan daerah atau kewenangan adat.

Hilangnya sistem pemerintahan marga tidak hanya melenyapkan kewenangan-kewenangan unik dalam tata kelola wilayah dan sumber daya alam, seperti hutan, air, tambang, flora dan fauna, tetapi juga mereduksi tatanan kemasyarakatan dari model paguyuban ke model demokrasi yang cenderung liberal.

Daerah-daerah kemudian perlu menyelamatkan khazanah kekayaan yang tersisa, yang selama tiga dasa warsa termarginalkan dalam era pemerintahan sentralistis dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat antara lain dengan membentuk Badan Musyawarah Adat. Tingginya harapan yang digantungkan di pundak lembaga ini untuk kembali memerankan model pemerintahan marga justru membuat lelah, karena lingkaran kewenangan, perangkat, dan sumber daya yang tidak memungkinkan.

Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang secara struktural terbentuk mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ke Desa, hanya merupakan kumpulan elite masyarakat yang hanya mempunyai fungsi konsultatif dengan segala keterbatasannya. Sedangkan eksekusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan adat, hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Jenang Kutei dan atau pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kegelisahan mengenai makin beratnya tantangan yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Adat misalnya di ungkapkan oleh Kadirman :

“Faktor internal yang patut di waspadai dan menjadi perhatian khusus yang dapat menjadi faktor penghambat pemberdayaan budaya daerah antara lain, fenomena makin langkanya tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi secara tradisional terhadap budaya, adat-istiadat atau hukum adat Rejang. Kapasitas dan kecendikiaan tokoh-tokoh adat terkubur usia zaman dan sedikit sekali yang dapat terekam dalam dokumen tertulis yang dapat diselamatkan. Budaya lisan yang mendominasi sejarah budaya Rejang tidak dapat seluruhnya ditransfer atau direspon oleh generasi muda yang cenderung menganggap budaya daerah sebagai barang antik, usang dan ketinggalan zaman. Dilain pihak sangat disayangkan para intelektual dan kalangan terpelajar Anak Kutei Jang belum banyak yang berminat meneliti bidang budaya Rejang karena mungkin tidak menjanjikan keuntungan finansial.”<sup>67</sup>

Terhadap upaya memberdayakan budaya Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dalam hal Penguatan lembaga /institusi budaya adat, dalam makalah tersebut Kadirman mengungkapkan : ”Penguatan terhadap kelembagaan Budaya atau adat di

<sup>67</sup> Disampaikan pada Rapat Koordinasi BPNST Padang dengan stakeholders di Propinsi Bengkulu, tanggal 22-23 November 2009 di Hotel Griya Anggita Curup

kabupaten Rejang Lebong difokuskan kepada peningkatan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat yang secara struktural telah terbentuk sampai ke seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong. Peningkatan peran Badan Musyawarah Adat tidak hanya berputar kepada masalah-masalah retensional, berupa perdebatan sejarah yang berorientasi kepada masa lampau, tetapi lembaga ini dapat lebih responsif terhadap masalah-masalah situasional yang dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan secara protensional kedepan dalam memberikan alternatif-alternatif bagi perjalanan kamasyarakatan dengan visi budaya-adat Rejang. Badan Musyawarah Adat dapat berperan lebih kentara dalam masalah Pembangunan, Lingkungan Hidup, Arsitektur, Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba, Moral, Pendidikan dan masalah aktual lainnya.”

Peran Badan Musyawarah Adat dalam mempertahankan eksistensi dan kelestarian budaya Rejang agar tidak hanya akan menjadi sejarah masa lampau adalah dengan mewariskan secara generatif kepada generasi muda penerus dan pendukung budaya. Sosialisasi dan transportasi nilai ini harus secara atraktif disampaikan kepada generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa. Perlunya kebijakan yang di landasi instrumen legal formal untuk memasukkan Pelajaran Budaya Rejang ke dalam Kurikulum Muatan Lokal dan penyediaan alokasi dana untuk mendukung penelitian-penelitian, eksperimen-eksperimen kreatif yang menggali atau mengaktualkan budaya Rejang.

### III. PERAN BADAN MUSYAWARAH ADAT DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Peranan lebih banyak menunjuk pada *fungsi*, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses; tepatnya dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan peranan.

Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu; *pertama*, peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, peranan adalah konsep perihal *apa yang dapat dilakukan oleh orang* dalam masyarakat sebagai organisasi, dan *ketiga* : peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan orang yang penting bagi struktur sosial. Pengertian orang termasuk di dalamnya adalah lembaga atau organisasi yang dapat berperilaku yang mempunyai hak dan kewajiban.

Pedoman tingkah laku sebuah organisasi atau lembaga yang mencerminkan peranan sebuah lembaga antara lain dapat didalami dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam pasal 6 Anggaran Dasar Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong disebutkan bahwa maksud BMA adalah ;

5. Menjunjung tinggi Adat Istiadat Rejang Lebong dalam mencapai pembangunan manusia seutuhnya.
6. Sebagai **wadah Kosultasi**, memberi bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, baik diminta maupun tidak diminta demi kelancaran roda Pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong.

7. Memupuk kesadaran hukum masyarakat dan disiplin masyarakat Kabupaten Rejang Lebong
8. Memberlakukan Hukum Adat Rejang dengan tidak mengesampingkan ketentuan hukum lainnya.

Dalam Pasal 7 anggaran dasar tersebut disebutkan bahwa tujuan BMA adalah :

1. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pegong Pakei Adat Lem Kutai Natet, Pancasila serta menjaga kelestariannya.
2. Untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang hidup, tumbuh kembang dalam Kabupaten Rejang Lebong, dengan memperhatikan perkembangan dan kepentingan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat Rejang Lebong, mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional serta berwawasan Nusantara.
4. Pemberdayaan, pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kebudayaan Rejang Lebong untuk meningkatkan peranan nilai-nilainya di daerah terutama di Desa/Kelurahan, guna kesejahteraan rakyat.
5. Mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga warga masyarakat merasa terpanggil untuk ikut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Jika kita mencermati maksud dan tujuan Badan Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, betapa tinggi dan mulianya cita-cita dimaksud. Tentu untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan integritas dan kapabilitas pengurus dan anggotanya. Kapabilitas Badan Musyawarah Adat berkait dan dibatasi langsung dengan kewenangan-kewenangan pemerintahan dan Negara, terutama berkaitan dengan bidang agama, keamanan dan pertahanan, pendidikan dan hukum.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi konsultatif, sesuai bidang dan kewenangannya Badan Musyawarah Adat dapat lebih leluasa berperan dan mewarnai dinamika sosial dan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan, Adat istiadat, hukum adat, seni budaya, sastra, dan arsitektur.

Dalam perjalanannya kiprah Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong telah banyak memberikan kontribusinya kepada pemerintah daerah, dan telah banyak kebijakan dan Keputusan Bupati sebagai "Rajo" dalam bidang adat, antara lain

1. Surat Nomor : 430/678/Bag.5. tanggal 17 April 2002 perihal Pelestarian Adat Budaya;
2. Surat Nomor : 02/Rj.RL/2003 tanggal 2 Juni 2003 perihal Perintah Hakim Rajo;
3. Surat Nomor : 430/708/Bag.4 tanggal 6 Juni 2003, perihal Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan;
4. Surat Nomor : 423.5/887/Bag.5 tanggal 26 Juni 2003 perihal Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Nomor : 700/711/2003, tanggal 2 september 2003 perihal Pemberdayaan Adat Budaya Rejang Lebong; Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 77 Tahun 2006 tanggal 22 Februari tahun 2006, tentang Agenda Tetap kegiatan bidang Adat, Budaya, Kesenian Daerah, Keislaman dan Olah Raga di Kabupaten Rejang Lebong. Keputusan ini memberikan arah dan dasar kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait dalam melaksanakan aktifitas kebudayaan, adat dan kesenian sepanjang tahun, karena kreatifitas dan aktifitas seni budaya dan adat akan di ekspresikan pada agenda acara Pekan Seni dan Budaya yang digelar setiap tahun pada momentum hari ulang tahun Kota Curup pada setiap bulan Mei.

6. Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 tahun 2005 tentang pelaksanaan Hukum Adat Rejang.
7. Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat bagi masyarakat Adat Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 338 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Jenang Kutei.
9. Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2005 tentang Susunan Pengurus Sanggar Bumei Pat Petulai.
10. Diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Diterbitkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas Jenang Kutai (Hakim Desa), Pedoman Acara dan Atribut atau Perlaengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
12. Diterbitkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Olah Raga Permainan Tradisional Chip.
13. Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 318 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Olah Raga Permainan Tradisional Chip.
14. Diterbitkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 369 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.
15. Sejak tahun Anggaran 2006, Badan Musyawarah Adat Desa dan Kelurahan telah dibantu biaya operasionalnya melalui dana DPDK.
16. Pada tahun Anggaran 2007 dana operasional BMA Desa/Kelurahan, BMA Kecamatan serta honor untuk anggota BMA Desa/Kelurahan serta Jenang Kutei telah dianggarkan kedalam APBD Tahun 2007.
17. Pengadaan Peralatan Musik Gong Kulintang untuk Kecamatan dan sekolah-sekolah dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Berkaitan dengan peranan dan fungsi Badan Musyawarah Adat dalam transformasi nilai budaya melalui pembelajaran muatan lokal, dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dan bahan-bahan yang berkaitan dengan berbagai cabang kesenian, meliputi seni gerak, tari, seni musik, sastra dan bahasa daerah, adat istiadat serta hukum adat. Bahan-bahan dan materi pembelajaran muatan lokal disusun sesuai dengan teknis pembelajaran.

Secara umum, pengertian muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara khusus, muatan lokal adalah program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang isi dan media pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah.

Materi dan media pembelajaran muatan lokal di Rejang Lebong sangat memungkinkan dan tersedia untuk di susun sebagai kurikulum. Kekayaan akan seni gerak/tari termasuk didalamnya seni silat Rejang yang tersebar dalam wilayah kecamatan merupakan sumber yang perlu digali dan dikembangkan. Gong kulintang yang sebagian besar telah tersedia di seluruh kecamatan dan sekolah-sekolah, Seni sastra lisan yang masih tersisa dan Bahasa dan Aksara Rejang merupakan bahan pembelajaran yang dapat disusun dalam kurikulum sesuai dengan kaidah-kaidah belajar mengajar.

Kebutuhan akan pembakuan dan standarisasi terhadap bahan-bahan yang perlu diajarkan diperlukan untuk menghentikan perdebatan-perdebatan panjang yang tidak konstruktif karena berbagai varian yang sesungguhnya dapat memperkaya dan sebagai referensi pembelajaran. Badan Musyawarah Adat dapat mengambil peran dan kewenangan untuk me mediasi dan menentukan standarisasi melalui Keputusan Rajo.

Mungkin hambatan serius berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang akan berperan baik dalam rangka penyusunan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran, mengingat fenomena makin langkanya tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi secara tradisional terhadap budaya, adat-istiadat atau hukum adat Rejang. Kapasitas dan kecendikiaan tokoh-tokoh adat terkubur usia zaman dan sedikit sekali yang dapat terekam dalam dokumen tertulis yang dapat diselamatkan.

#### **IV. PENUTUP**

Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa muatan lokal merupakan pintu masuk yang efektif untuk mewariskan budaya daerah kepada generasi zuriat kita. Memang rentangan kendala, hambatan dan tantangan yang berat terbentang di hadapan, tetapi peluang pasti sangat terbuka lebar. Diperlukan integritas, komitmen dan dedikasi dari semua stake holders untuk mengangkat tugas mulia ini demi jati diri kita agar tidak tertelan sejarah.

**Lampiran Makalah [3] :**

**ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA REJANG DAN  
PENGALAMAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN  
LOKAL BAHASA REJANG DI SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

Disajikan pada Facus Group Discussion (FGD) Kajian Peestarian Nilai Budaya  
Kurikulum Muatan Lokal Di Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Dalam  
Perspektif Sejarah

**DISUSUN  
OLEH  
BERLIAN.R, S.Pd  
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 11 CURUP TIMUR  
DAN PENGALAMAN PENGAJARAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**2014**

**A. Latar Belakang**

Isi kurikulum muatan lokal bahasa rejang Dan pengalaman pengajaran pembelajaran Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang Di Sekolah Dasar Kabupaten rejang lebong.

Kurikulum mengacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut disebut “Kurikulum Muatan Lokal”. Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987, dan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tertanggal 12 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, membawa angin segar untuk pembelajaran bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Sebagaimana dinyatakan dalam latar belakang “Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal” dinyatakan bahwa:

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multi kultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, ketrampilan daerah, dll) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program muatan lokal dalam Standar Isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia terdapat keanekaragaman kebudayaan. Sekolah tempat program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal tersebut. Sehingga perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal (Depdiknas, 2006:1)

Penentuan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal akan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan sekolah itu sendiri. Untuk Kabupaten Rejang Lebong salah satu muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa Rejang. Setelah Bahasa Rejang di ajarkan di sekolah dari SD sampai dengan SMA, tantangan kita kedepan adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran bahasa Rejang sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal

lebih bermakna dan menarik. Harapan masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Rejang agar melalui pelajaran bahasa Rejang dapat lebih mengangkat nilai-nilai luhur yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Rejang seperti gotong royong, toleransi, kasih sayang, nilai hormat, sopan santun, dan lainnya. Melalui bahasa Rejang, diharapkan dapat mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini.

#### B. **Muatan Kurikulum Lokal Bahasa Rejang**

Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut.

Menurut sejarah, sebelum ada sekolah formal, pendidikan yang berprogram muatan lokal telah dilaksanakan oleh para orang tua peserta didik dengan metode drill dan dengan trial and error serta berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka hayati. Tujuan pendidikan mereka terutama agar anak-anak mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Bahan yang diajarkan ialah bahan yang diambil dari berbagai keadaan yang ada di alam sekitar. Sedangkan kriteria keberhasilannya ditandai mereka telah dapat hidup mandiri.

Menurut Dirjen Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat.

Menurut Kurikulum 1994 Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran yang diajarkan secara terpisah, menjadi kajian tersendiri.

Menurut Soewardi Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah legenda serta adat istiadat. Dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang berdasarkan usulan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 September 2009, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Kadirman, SH.M.Si.

#### C. **Tujuan Kurikulum Muatan Lokal**

Secara umum tujuan program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat. Tujuan penerapan muatan lokal pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan yang dapat segera dicapai. Sedangkan tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Tujuan tidak langsung pada dasarnya merupakan dampak dan tujuan langsung.

a. **Tujuan langsung**

1. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid.
2. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
3. Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya.
4. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya.

b. **Tujuan tak langsung**

1. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya.
2. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar maka besar kemungkinan murid dapat mengamati, melakukan percobaan atau kegiatan belajar sendiri. Belajar mencari, mengolah, menemukan informasi sendiri dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungannya merupakan pola dasar dari belajar. Belajar tentang lingkungan dan dalam lingkungan mempunyai daya tarik tersendiri bagi seorang anak. Jean Piaget (1958) telah mengatakan bahwa makin banyak seorang anak melihat dan mendengar, makin ingin ia melihat dan mendengar. Lingkungan secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap cara belajar seseorang. Benyamin S. Bloom menegaskan bahwa lingkungan sebagai kondisi, daya dan dorongan eksternal dapat memberikan suatu situasi “kerja” di sekitar murid. Karena itu, lingkungan secara keseluruhan dapat berfungsi sebagai daya untuk membentuk dan memberi kekuatan/dorongan eksternal untuk belajar pada seseorang. Landasan teoritik muatan lokal.

1. Tingkat kemampuan berpikir murid mengharuskan kita menyajikan bahan kajian yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dari tingkatan konkret sampai dengan tingkatan abstrak. Pengembangan kemampuan berpikir ini ditunjang antara lain oleh teori belajar dari Ausubel (1969) dan konsep asimilasi dari Jean Piaget (1972) yang pada intinya menyatakan bahwa sesuatu yang baru haruslah dipelajari berdasarkan apa yang telah dimiliki oleh murid. Penerimaan gagasan baru dengan bantuan gagasan/pengetahuan yang telah ada ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Johan Friedrich Herbart (1776-1841) yang dikenal dengan istilah *apersepsi*.
2. Pada dasarnya anak-anak usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena itu, mereka selalu akan gembira bila dilibatkan secara mental, fisik dan sosialnya dalam mempelajari sesuatu. Mereka akan gembira bila diberikan kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya yang penuh dengan sumber belajar. Dengan menciptakan situasi belajar, bahan kajian dan cara belajar mengajar

yang menantang dan menyenangkan maka aspek kejiwaan mereka yang berada dalam proses pertumbuhan akan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik.

**D. Fungsi Muatan Lokal dalam Kurikulum**

1. Fungsi Penyesuaian

Sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Karena itu program-program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan. Demikian pula pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah hidup dalam lingkungan, sehingga perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya.

2. Fungsi Integrasi

Murid merupakan bagian integral dari masyarakat, karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang akan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat.

3. Fungsi Perbedaan

Pengakuan atas perbedaan berarti pula memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang bersifat luwes, yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan minat dan kemampuan murid. Ini tidak berarti mendidik pribadi menjadi orang yang individualistik tetapi muatan lokal harus dapat berfungsi mendorong pribadi ke arah kemajuan sosialnya dalam masyarakat.

Terdapat 4 Landasan Demografik Keindahan bangsa dan negara Indonesia terletak pada keanekaragaman pola kehidupan dari beratus-ratus suku bangsa yang tersebar di berpuluh-puluh ribu pulau dari Sabang sampai dengan Merauke. Kekaguman terhadap bangsa dan negara Indonesia telah dinyatakan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, karena keanekaragaman tersebut dapat dipersatukan oleh falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Keanekaragaman tersebut bukan saja ada pada bidang budayanya saja, tetapi juga pada keadaan alam, fauna dan floranya serta kehidupan sosialnya. Semuanya itu merupakan dasar yang sangat penting dalam mengembangkan muatan lokal.

Selain landasan-landasan pemikiran tersebut di atas, pengembangan muatan lokal juga didorong oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa banyak murid Sekolah Dasar terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah yang antara lain disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi orang tua murid, kurang sesuainya kurikulum sekolah dengan kebutuhan murid.

**E. Pengembangan Muatan Lokal Bahasa Rejang**

Bahan muatan lokal dapat tercantum pada intra kurikuler, misalnya mata pelajaran kesenian dan ketrampilan, bahasa daerah dan Inggris. Sedangkan bahan muatan lokal yang dilaksanakan secara ekstra kurikuler bahan dikembangkan dari pola kehidupan dalam lingkungannya.

Karena bahan muatan lokal sifatnya mandiri dan tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam

muatan lokal ini sangat menentukan . Untuk pengembangannya, langkah-langkah yang dapat ditempuh :

### 1. **Menyusun Perencanaan Muatan Lokal Bahasa Rejang**

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran selalu menyangkut berbagai unsur atau komponen . Menyusun perencanaan muatan lokal juga akan menyangkut berbagai sumber, pengajar, metode, media, dana dan evaluasi.

Merencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan antara lain dengan :

- a. Mengidentifikasi segala sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan muatan lokal
- b. Menyeleksi bahan muatan lokal dengan kriteria sebagai berikut :
  - 9) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
  - 10) Tidak bertentangan dengan Pancasila dan aturan adat yang berlaku.
  - 11) Letaknya terjangkau dari sekolah.
  - 12) Ada nara sumber baik didalam maupun diluar sekolah.
  - 13) Bahan/ajaran tersebut merupakan ciri khas daerah tersebut.
- c. Menyusun GBPP/Kurikulum Muatan lokal yang bersangkutan
- d. Mencari sumber bahan yang tertulis maupun yang tidak tertulis
- e. Mengusahan sarana/prasarana yang relevan dan terjangkau.

### 2. **Menyusun Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang**

Bahasa dan Aksara Rejang adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang patut diupayakan penggalian, pengembangan, dan pemeliharaan. Dari 17 aksara dunia, diantaranya adalah aksara Rejang (Ka-Ga- Nga) yang merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya, dan terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Rejang. Maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong beserta Dinas Pendidikan Rejang Lebong dan Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong berupaya untuk menyusun Kurikulum Bahasa Rejang yang terprogram dan terstruktur yang berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Kurikulum ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengenal huruf Rejang dan Bahasa Rejang sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam mengajar Bahasa Rejang di sekolah baik dari tingkat dasar sampai dengan tingkat SMA/SMK yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penyusunan Kurikulum tersebut berbagai perdebatan, masukan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang di sampaikan kepada Tim yang berjumlah 21 orang selaku Tim Penyusun sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang tersebut sehingga Tim membuat kesepakatan sebagai berikut :

3. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah.

Adapun langkahlangkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:

- c) Pengembangan Standar Kompetensi.

Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.

- d) Pengembangan Kompetensi Dasar.

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai.

4. Pengembangan silabus

Dalam pengembangan silabus diberikan keleluasaan kepada guru yang mengajar Muatan Lokal Bahasa Rejang di sekolah masing-masing, mengingat dalam penerapannya disesuaikan dengan tempat dan kondisi sekolah. Misalnya Guru yang mengajar di wilayah Lembak maka mereka harus menyesuaikan dengan daerahnya. Pengembangan silabus mencakup

:

- a) Mengembangkan indikator
- b) Mengidentifikasi materi pembelajaran
- c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
- d) Pengalokasian waktu
- e) Pengembangan penilaian
- f) Menentukan Sumber Belajar

## F. Simpulan

Kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Salah satu muatan lokal di Propinsi Bengkulu.

Melalui muatan lokal mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat lebih mengangkat nilai *adi luhung* yang ada dalam tata kehidupan Rejang, seperti toleransi, kasih sayang, *gotong royong*, *andhap asor*, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya. Di samping itu, melalui mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat diangkat kembali nilai-nilai kearifan local. 12 Secara substansi kebahasaan, kesastraan, kebudayaan, dan muatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; bahasa, sastra, dan budaya Rejang tidak diragukan

lagi sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah, mata pelajaran bahasa Rejang setidaknya mengemban fungsi (1) alat komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Rejang secara baik dan benar untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif.

Komponen utama dalam kurikulum muatan lokal adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang sebagai rukun untuk menyusun indikator kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang terdiri atas kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Rejang. Kompetensi berbahasa dan bersastra diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Rejang didukung oleh kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Rejang sesuai dengan *unggah-ungguh basa*. Kompetensi berbahasa dan bersastra terbagi dalam empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (a) menyimak, (b) berbicara, (c) membaca, dan (d) menulis yang dalam pelaksanaan pembelajaran, empat aspek kompetensi berbahasa dan bersastra ini tidak terpisah satu dengan lainnya, melainkan dilaksanakan secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996. "Kualitas Pendidikan dalam Pengembangan Afektif untuk Kurikulum Muatan Lokal". Makalah Simposium Nasional Pergeseran Paradigma Pengembangan dan Inovasi Pendidikan, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Bahan Sosialisasi*. <http://www.depdiknas.id.org>.
- Hymes, Dell. 1972. "Models of the Interaction of Language and Social Life" dalam, J.J. Gumperz dan Hymes (ed.) *Direction in Sociolinguistic*. New York: Rinehart & Winston.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006. Jakarta.
- Moeliono, Anton. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sociolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, 2010. Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Rejang. Bengkulu: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
- Sutrisna Wibawa, 1999. Apresiasi Sastra Wayang di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Sutrisna Wibawa, 2006. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Rejang di SMA/SMK/MA. Bengkulu: Makalah Kongres Bahasa Rejang.

**Lampiran Makalah [4] :**

**SEJARAH PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
BAHASA REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DISUSUN  
OLEH**

**ZAKARIA EFENDI, M.Pd**

**Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong**

**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENDIDIKAN  
2014**

## SEJARAH PROSES PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG

### A. Latar Belakang

Kebudayaan nasional yang didukung oleh berbagai nilai kebudayaan daerah yang luhur dan beradab yang merupakan nilai jati diri yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan, baik dalam lapangan industri, kerajinan, industri rumah tangga, jasa pertanian (argo industri dan argo bisnis), perkebunan, perikanan perternakan, pertanian holtikultura, kepariwisataan, pemeliharaan lingkungan hidup sehingga terjadi kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan yang dinamis.

Kurikulum mengacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Penyusunan kurikulum atas dasar acuan keadaan masyarakat tersebut disebut “Kurikulum Muatan Lokal”. Kurikulum muatan lokal keberadaan di Indonesia telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987, dan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tertanggal 12 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan diberlakukanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi, membawa angin segar untuk pembelajaran bahasa daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan lokal. Sebagaimana dinyatakan dalam latar belakang “Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal” dinyatakan bahwa:

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multi kultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, ketrampilan daerah, dll) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui upaya pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program muatan lokal dalam Standar Isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia terdapat keanekaragaman kebudayaan. Sekolah tempat program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal tersebut. Sehingga perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal (Depdiknas, 2006:1)

Penentuan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal akan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan sekolah itu sendiri. Untuk Kabupaten Rejang Lebong salah satu muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa Rejang. Setelah Bahasa Rejang di ajarkan di sekolah dari SD sampai dengan SMA, tantangan kita kedepan adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran bahasa Rejang sebagai salah satu mata pelajaran mutan lokal lebih bermakna dan menarik. Harapan masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Rejang agar melalui pelajaran bahasa Rejang dapat lebih mengangkat nilai-nilai luhur yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Rejang seperti gotong royong, toleransi, kasih sayang, nilai hormat, sopan santun, dan lainnya. Melalui bahasa Rejang, diharapkan dapat mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa ini.

#### **B. Pengertian Muatan Lokal**

Menurut surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid didaerah tersebut.

Menurut sejarah, sebelum ada sekolah formal, pendidikan yang berprogram muatan lokal telah dilaksanakan oleh para orang tua peserta didik dengan metode drill dan dengan trial and error serta berdasarkan berbagai pengalaman yang mereka hayati. Tujuan pendidikan mereka terutama agar anak-anak mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Bahan yang diajarkan ialah bahan yang diambil dari berbagai keadaan yang ada dialam sekitar. Sedang kriteria keberhasilannya ditandai mereka telah dapat hidup mandiri.

Menurut Dirjen Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang di perkaya dengan materi pelajaran yang ada di lingkungan setempat.

Menurut Kurikulum 1994 Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran yang diajarkan secara terpisah, menjadi kajian tersendiri.

Menurut Soewardi Kurikulum Muatan Lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu, bukan saja yang terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah legenda serta adat istiadat. Dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang berdasarkan usulan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 September 2009, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Kadirman, SH.M.Si.

#### **C. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal**

Secara umum tujuan program pendidikan muatan lokal adalah mempersiapkan murid agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam ,kualitas sosial, dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat. Tujuan penerapan muatan lokal pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan dapat segera dicapai. Sedangkan tujuan tidak langsung

merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Tujuan tidak langsung pada dasarnya merupakan dampak dan tujuan langsung.

### **Tujuan langsung**

- 1) Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid.
- 2) Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
- 3) Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya.
- 4) Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya.

### **Tujuan tak langsung**

- 1) Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya.
- 2) Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.

Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar maka besar kemungkinan murid dapat mengamati, melakukan percobaan atau kegiatan belajar sendiri. Belajar mencari, mengolah, menemukan informasi sendiri dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungannya merupakan pola dasar dari belajar. Belajar tentang lingkungan dan dalam lingkungan mempunyai daya tarik tersendiri bagi seorang anak. Jean Piaget (1958) telah mengatakan bahwa makin banyak seorang anak melihat dan mendengar, makin ingin ia melihat dan mendengar. Lingkungan secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap cara belajar seseorang. Benyamin S. Bloom menegaskan bahwa lingkungan sebagai kondisi, daya dan dorongan eksternal dapat memberikan suatu situasi “kerja” di sekitar murid. Karena itu, lingkungan secara keseluruhan dapat berfungsi sebagai daya untuk membentuk dan memberi kekuatan/dorongan eksternal untuk belajar pada seseorang. Landasan teoritik muatan lokal.

- 1) Tingkat kemampuan berpikir murid mengharuskan kita menyajikan bahan kajian yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dari tingkatan konkret sampai dengan tingkatan abstrak. Pengembangan kemampuan berpikir ini ditunjang antara lain oleh teori belajar dari Ausubel (1969) dan konsep asimilasi dari Jean Piaget (1972) yang pada intinya menyatakan bahwa sesuatu yang baru haruslah dipelajari berdasarkan apa yang telah dimiliki oleh murid. Penerimaan gagasan baru dengan bantuan gagasan/pengetahuan yang telah ada ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Johan Friedrich Herbart (1776-1841) yang dikenal dengan istilah apersepsi.

- 2) Pada dasarnya anak-anak usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena itu, mereka selalu akan gembira bila dilibatkan secara mental, fisik dan sosialnya dalam mempelajari sesuatu. Mereka akan gembira bila diberikan kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya yang penuh dengan sumber belajar. Dengan menciptakan situasi belajar, bahan kajian dan cara belajar mengajar yang menantang dan menyenangkan maka aspek kejiwaan mereka yang berada dalam proses pertumbuhan akan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik.

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan muatan lokal tentu saja tidak dapat terlepas dari tujuan umum yang tertera dalam GBHN. Adapun yang langsung dapat dipaparkan dalam muatan lokal atas dasar tujuan tersebut diantaranya adalah :

1. Berbudi pekerti luhur, sopan santun daerah disamping sopan santun nasional.
2. Berkepribadian; Punya jati diri dan punya kepribadian daerah disamping kepribadian nasional
3. Mandiri : dapat mencukupi diri sendiri tanpa bantuan orang lain
4. Terampil, menguasai 10 segi PKK didaerahnya
5. Beretos kerja , cinta akan kerja, makanya dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya.
6. Profesional, mengerjakan kerajinan daerah seperti membatik, membuat anyaman, patung dan sebagainya
7. Produktif, dapat berbuat sebagai produsen dan bukan hanya sebagai konsumen
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Cinta lingkungan, dapat menumbuhkan cinta kepada tanah air.
10. Kesetiakawanan sosial, dalam hal bekerja manusia selalu membutuhkan teman kerja, oleh karenanya akan terjadilah situasi kerja sama dan gotong royong.
11. Kreatif –inovatif untuk hidup, karena tidak pernah menyia-nyiakan waktu luang, dan yang bersangkutan menjadi orang ulet, tekun, rajin dan sebagainya
12. Mementingkan pekerjaan yang praktis ; Menghilangkan gaps antara lapangan teori dan praktik
13. Rasa cinta budaya daerah dan budaya nasional.

Untuk penentuan muatan lokal dari pihak Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dengan pemerintah daerah, instansi lain yang terkait, badan swasta dan masyarakat agar muatan lokal dapat diterima sebagaimana mestinya.

#### **D. Fungsi Muatan Lokal dalam Kurikulum**

##### **4. Fungsi Penyesuaian**

Sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Karena itu program-program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan. Demikian pula pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah hidup dalam lingkungan, sehingga perlu diupayakan agar pribadi dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya.

##### **5. Fungsi Integrasi**

Murid merupakan bagian integral dari masyarakat, karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang akan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi kepada masyarakat.

#### 6. Fungsi Perbedaan

Pengakuan atas perbedaan berarti pula memberi kesempatan bagi pribadi untuk memilih apa yang diinginkannya. Karena itu muatan lokal harus merupakan program pendidikan yang bersifat luwes, yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan minat dan kemampuan murid. Ini tidak berarti mendidik pribadi menjadi orang yang individualistik tetapi muatan lokal harus dapat berfungsi mendorong pribadi ke arah kemajuan sosialnya dalam masyarakat.

Terdapat 4 Landasan Demografik Keindahan bangsa dan negara Indonesia terletak pada keanekaragaman pola kehidupan dari beratus-ratus suku bangsa yang tersebar di berpuluh-puluh ribu pulau dari Sabang sampai dengan Merauke. Kekaguman terhadap bangsa dan negara Indonesia telah dinyatakan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, karena keanekaragaman tersebut dapat dipersatukan oleh falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Keanekaragaman tersebut bukan saja ada pada bidang budayanya saja, tetapi juga pada keadaan alam, fauna dan floranya serta kehidupan sosialnya. Semuanya itu merupakan dasar yang sangat penting dalam mengembangkan muatan lokal.

Selain landasan-landasan pemikiran tersebut di atas, pengembangan muatan lokal juga didorong oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa banyak murid Sekolah Dasar terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah yang antara lain disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi orang tua murid, kurang sesuainya kurikulum sekolah dengan kebutuhan murid.

#### E. Pengembangan Muatan Lokal Bahasa Rejang

Bahan muatan lokal dapat tercantum pada intra kurikuler, misalnya mata pelajaran kesenian dan ketrampilan, bahasa daerah dan Inggris. Sedangkan bahan muatan lokal yang dilaksanakan secara ekstra kurikuler bahan dikembangkan dari pola kehidupan dalam lingkungannya.

Karena bahan muatan lokal sifatnya mandiri dan tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam muatan lokal ini sangat menentukan. Untuk pengembangannya, langkah-langkah yang dapat ditempuh :

#### Menyusun Perencanaan Muatan Lokal Bahasa Rejang

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran selalu menyangkut berbagai unsur atau komponen. Menyusun perencanaan muatan lokal juga akan menyangkut berbagai sumber, pengajar, metode, media, dana dan evaluasi.

Merencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan antara lain dengan :

- 1) Mengidentifikasi segala sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan muatan lokal
- 2) Menyeleksi bahan muatan lokal dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- b) Tidak bertentangan dengan Pancasila dan aturan adat yang berlaku.
- c) Letaknya terjangkau dari sekolah.
- d) Ada nara sumber baik didalam maupun diluar sekolah.
- e) Bahan/ajaran tersebut merupakan ciri khas daerah tersebut.
- f) Menyusun GBPP/Kurikulum Muatan lokal yang bersangkutan
- g) Mencari sumber bahan yang tertulis maupun yang tidak tertulis
- h) Mengusahan sarana/prasarana yang relevan dan terjangkau.

### **Menyusun Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang**

Bahasa dan Aksara Rejang adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang patut diupayakan penggalian, pengembangan, dan pemeliharaan. Dari 17 aksara dunia, diantaranya adalah aksara Rejang (Ka-Ga- Nga) yang merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia pada umumnya, dan terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Rejang. Maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong beserta Dinas Pendidikan Rejang Lebong dan Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong berupaya untuk menyusun Kurikulum Bahasa Rejang yang terprogram dan terstruktur yang berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Kurikulum ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengenal huruf Rejang dan Bahasa Rejang sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam mengajar Bahasa Rejang di sekolah baik dari tingkat dasar sampai dengan tingkat SMA/SMK yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penyusunan Kurikulum tersebut berbagai perdebatan, masukan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang di sampaikan kepada Tim yang berjumlah 21 orang selaku Tim Penyusun sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan kurikulum Bahasa Rejang tersebut sehingga Tim membuat kesepakatan sebagai berikut :

- Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah langkah awal dalam membuat mata pelajaran muatan lokal agar dapat dilaksanakan di sekolah. Adapun langkahlangkah dalam mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah sebagai berikut:
  - a) Pengembangan Standar Kompetensi.  
Standar kompetensi adalah menentukan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan.
  - b) Pengembangan Kompetensi Dasar.  
Kompetensi Dasar merupakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Penentuan ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, ahli dari instansi lain yang sesuai.

- Pengembangan silabus

Dalam pengembangan silabus diberikan keleluasaan kepada guru yang mengajar Muatan Lokal Bahasa Rejang di sekolah masing-masing, mengingat dalam penerapannya disesuaikan dengan tempat dan kondisi sekolah. Misalnya Guru yang mengajar di wilayah Lembak maka mereka harus menyesuaikan dengan daerahnya. Pengembangan silabus mencakup :

- a) Mengembangkan indikator
- b) Mengidentifikasi materi pembelajaran
- c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
- d) Pengalokasian waktu
- e) Pengembangan penilaian
- f) Menentukan Sumber Belajar

### **Potensi Bahasa Rejang sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal di Sekolah**

Berdasarkan catatan pusat Bahasajuta jiwa sensus tahun 1981 penutur Bahasa Rejang adalah satu juta orang, bagaimana sekarang tahun 2014, yang jumlah penduduk sudah mencapai 200, menjadi penentu penutur bahasa Rejang telah jauh meningkat maka layaklah bahwa Bahasa rejang untuk dapat dipelajari sebagai mata pelajaran di sekolah.

Secara substansi nilai-nilai local, seperti dikemukakan Sayuti ( 2003:3-4) budaya etnik local mengandung tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Rejang. Melalui sejumlah pelajaran, peserta didik secara bertahap memasuki proses penyiapan diri untuk hidup, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pencerahan nilai-nilai dalam diri berlangsung. Di samping itu, juga berlangsungnya proses beradaptasi dengan lingkungan. Implikasinya “dekatkan anak didik dengan lingkungann, dan jangan mengasingkannya” menjadi penting, dan pemilihan serta penentuan porsi bahan pelajaran yang bersifat lokal menjadi imperatif yang sudah selayaknya diupayakan. Materi pembelajaran muatan lokal di sini diderivasikan dari kebudayaan etnik lokal dalam keseluruhannya, tidak hanya eksklusif berupa seni dan bahasa lokal.

Selain potensi nilai-nilai lokal, bahasa dan sastra Rejang termasuk bahasa yang telah mapan dan baku (*standard*). Seperti dikemukakan oleh William A. Stewart (dalam Adisumarto, 1991:9-11), bahasa baku (*standard*) harus memiliki empat atribut pokok, yaitu (1) kebakuan (*standardization*), (2) keswatantraan (*outonomy*), kesejarahan (*historicity*), dan ketahanan hidup (*vitality*), bahasa Rejang telah memenuhi kriteria ini. Dilihat dari kebakuan (*standardization*).

Bahasa Rejang telah memiliki kaidah yang mantap, bahasa Rejang telah memiliki tata bahasa baku, dan kamus bahasa Rejang (eka bahasa, dwibahasa, dan multibahasa). Dilihat dari keswatantraan (*outonomy*), bahasa Rejang merupakan bahasa mandiri, bukan dialek atau bukan menjadi bagian dari bahasa lain. Dilihat dari indikator kesejarahan (*historicity*), bahasa Rejang telah terbukti perkembangannya, dimulai dari bahasa Rejang Kuna, bahasa Rejang Tengahan, sampai bahasa Rejang Baru; hasil-hasil karya sastra sebagai cermin sejarah perkembangan bahasa Rejang dan adat-istiadat maupun budayanya tak terhitung jumlahnya.

Dalam Politik Bahasa Nasional tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah

dinyatakan bahwa di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Rejang, Madura, Makasar, dan Sunda, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Rejang, Madura, Makasar, dan Sunda berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:13). 6

Nababan (1984) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan, kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga hal, pelestarian kebudayaan, pengembangan kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Fungsi kemasyarakatan meliputi ruang lingkup dan bidang pemakaian. Fungsi perorangan meliputi fungsi instrumental, kepribadian, pemecahan masalah, khayalan, dan informatif. Fungsi pendidikan meliputi fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran.

Dalam Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Rejang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan bahwa fungsi mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah adalah sebagai (1) sarana pembina rasa bangga terhadap bahasa Rejang, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Rejang, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Rejang yang baik dan benar untuk berbagai keperluan, dan (5) sarana pemahaman budatya Rejang melalui kesusasteraan Rejang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mata pelajaran bahasa Rejang sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah setidaknya mengemban fungsi (1) alat komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Rejang secara baik dan benar untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif.

## G. Simpulan

Kurikulum muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Salah satu muatan lokal di Propinsi Bengkulu.

Melalui muatan lokal mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat lebih mengangkat nilai *adi luhung* yang ada dalam tata kehidupan Rejang, seperti toleransi, kasih sayang, *gotong royong*, *andhap asor*, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya. Di samping itu, melalui mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang diharapkan dapat diangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal. Secara substansi kebahasaan, kesastraan, kebudayaan, dan muatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; bahasa, sastra, dan budaya Rejang tidak diragukan lagi sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah, mata pelajaran bahasa Rejang setidaknya mengemban fungsi (1) alat komunikasi, (2) kebudayaan, dan (3) perorangan. Fungsi komunikasi terkait dengan upaya agar siswa dapat menggunakan bahasa Rejang secara baik dan benar untuk kepentingan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat. Fungsi kebudayaan terkait dengan pemerolehan nilai-nilai budaya (muatan lokal) untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi perorangan terkait fungsi instrumental, khayalan, dan informatif.

Komponen utama dalam kurikulum muatan lokal adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang sebagai rukun untuk menyusun indikator kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang terdiri atas kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kerangka budaya Rejang. Kompetensi berbahasa dan bersastra diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Rejang didukung oleh kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Rejang sesuai dengan *unggah-ungguh basa*. Kompetensi berbahasa dan bersastra terbagi dalam empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu (a) menyimak, (b) berbicara, (c) membaca, dan (d) menulis yang dalam pelaksanaan pembelajaran, empat aspek kompetensi berbahasa dan bersastra ini tidak terpisah satu dengan lainnya, melainkan dilaksanakan secara terpadu.

Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya Rejang hendaknya

## KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA REJANG

## TINGKAT PENDIDIKAN DASAR

| NO | KELAS | SMT | STANDAR KOMPETENSI                                                                    | KOMPETENSI DASAR                                                                                           |
|----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | I     | I   | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata benda Bahasa Rejang                             | 1. Siswa dapat menyebutkan kata- kata benda Bahasa Rejang.                                                 |
|    |       |     | 2. Siswa mampu mengucapkan kata- kata benda Bahasa Rejang                             | 2. Siswa dapat melafalkan kata- kata benda Bahasa Rejang dengan tepat                                      |
|    |       |     | 3. Siswa mampu membaca bueak tuwei tulisan Rejang                                     | 3. Siswa dapat membaca bueak tuwei tulisan Rejang dengan tepat                                             |
|    |       |     | 4. Siswa mampu menulis bueak tuwei tulisan Rejang                                     | 4. Siswa dapat menulis bueak tuwei tulisan Rejang dengan tepat                                             |
| 2  | I     | II  | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata benda dalam bahasa Rejang                       | 1. Siswa dapat menemukan gambar yang sesuai dengan kata-kata benda yang diperdengarkan dalam bahasa Rejang |
|    |       |     | 2. Siswa mampu mengucapkan kalimat sederhana dalam Bahasa Rejang                      | 2. Siswa dapat mengucapkan satu kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal dan intonasi yang tepat       |
|    |       |     | 3. Siswa mampu membaca kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                          | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat dalam bahasa Rejang  |
|    |       |     | 4. Siswa mampu menulis kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menyusun kata benda dengan kartu huruf dalam tulisan Rejang menggunakan tanda bunyi         |

|   |     |    |                                                                                                              |                                                                                                        |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | II  | I  | 1. Siswa mampu mendengar kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                                               | 1. siswa mampu mengartikan kalimat sederhana bahasa Rejang ke dalam bahasa Indonesia                   |
|   |     |    | 2. Siswa mampu mengucapkan nama-nama benda yang digambarkan dalam bahasa Rejang                              | 2. Siswa dapat mengucapkan nama-nama benda yang digambarkan dalam bahasa Rejang                        |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring dengan lafal yang baik kalimat sederhana dalam bahasa Rejang                  | 3. Siswa dapat membaca nyaring dengan lafal yang baik kalimat sederhana dalam bahasa Rejang            |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang                        | 4. Siswa dapat menuliskan kata benda dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan.                     |
| 4 | II  | II | 1. Siswa mampu mendengarkan pengalaman sehari-hari dalam bahasa Rejang                                       | 1. Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang diperdengarkan. |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Rejang tentang identitas diri di depan kelas                      | 2. Siswa dapat melakukan percakapan dalam bahasa Rejang tentang identitas diri di depan kelas.         |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal yang baik                        | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat sederhana bahasa Rejang dengan lafal yang baik                  |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan tanda bunyi dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menuliskan bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang   |
| 5 | III | I  | 1. Siswa mendengarkan kalimat tanya dalam bahasa Rejang                                                      | 1. Siswa dapat menjawab kalimat tanya dalam bahasa Rejang yang diperdengarkan                          |

|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari               | 2. Siswa dapat bercakap-cakap dengan bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan irintonasi yang benar            | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan intonasi yang benar              |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      | 4. Siswa dapat menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      |
|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5 | III | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan bait lagu dalam bahasa Rejang                                          | 1. Siswa dapat memahami arti bait lagu yang diperdengarkan                                         |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membuat kalimat tanya bahasa Rejang                                                 | 3. Siswa dapat membuat kalimat tanya dalam bahasa Rejang                                           |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    | 4. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    |
| 6 | III | II | 1. Siswa mampu mendengarkan dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                  | 1. Siswa memahami isi dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                        |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar | 3. Siswa dapat membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar |

|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap dalam bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari               | 2. Siswa dapat bercakap-cakap dengan bahasa Rejang tentang kegiatan siswa sehari-hari              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan irintonasi yang benar            | 3. Siswa dapat membaca nyaring kalimat tanya bahasa Rejang dengan intonasi yang benar              |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      | 4. Siswa dapat menulis nama anggota tubuh dengan menggunakan tanda bunyi dalam tulisan Rejang      |
|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
| 5 | III | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan bait lagu dalam bahasa Rejang                                          | 1. Siswa dapat memahami arti bait lagu yang diperdengarkan                                         |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pekerjaan rumah                                              |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membuat kalimat tanya bahasa Rejang                                                 | 3. Siswa dapat membuat kalimat tanya dalam bahasa Rejang                                           |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    | 4. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai anggota tubuh                                    |
| 6 | III | II | 1. Siswa mampu mendengarkan dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                  | 1. Siswa memahami isi dongeng anak-anak dalam bahasa Rejang                                        |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang identitas keluarga dalam bahasa Rejang                       |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar | 3. Siswa dapat membaca kalimat pernyataan sederhana dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar |

|   |     |    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | III | II | 4. Siswa mampu menulis kata-kata dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kata-kata dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang |
|   |     |    | 1. Siswa mampu mendengarkan teka-teki dalam bahasa Rejang                                          | 1. Siswa dapat membuat teka-teki dalam bahasa Rejang                                               |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pengalaman di hari libur                                     | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pengalaman di hari libur dengan menggunakan bahasa Rejang    |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca cerita dalam bahasa Rejang                                                  | 3. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan cerita dalam bahasa Rejang                   |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah dalam bahasa Rejang            | 4. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah dalam bahasa Rejang            |
| 7 | IV  | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan cerita rakyat dalam bahasa Rejang                                      | 1. Siswa memahami isi cerita rakyat dalam bahasa Rejang                                            |
|   |     |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari di luar jam sekolah dalam bahasa Rejang | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari di luar jam sekolah dalam bahasa Rejang |
|   |     |    | 3. Siswa mampu membaca kalimat "permohonan maaf" dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar    | 3. Siswa dapat membaca kalimat "permohonan maaf" dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar    |
|   |     |    | 4. Siswa mampu menulis kegunaan peralatan rumah tangga dalam bahasa Rejang dengan                  | 4. Siswa dapat menulis kegunaan peralatan rumah tangga dalam bahasa dan tulisan Rejang             |

|   |    |    |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    | intonasi yang benar                                                                                                       |                                                                                                                           |
|   |    |    | 5. Siswa mampu mendengarkan satu bait puisi dalam bahasa Rejang                                                           | 5. Siswa dapat memahami isi satu bait puisi dalam bahasa Rejang                                                           |
|   |    |    | 6. Siswa mampu menceritakan pengalaman berkunjung ke rumah keluarga                                                       | 6. 6. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkunjung ke rumah keluarga                                                    |
|   |    |    | 7. Siswa mampu membaca peribahasa dalam bahasa Rejang                                                                     | 7. Siswa dapat membuat pertanyaan dalam bahasa Rejang                                                                     |
|   |    |    | 8. Siswa mampu menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah yang ada di dalam kelas dalam bahasa Rejang           | 8. Siswa dapat menulis kalimat sederhana mengenai peralatan sekolah yang ada di dalam kelas dalam bahasa Rejang           |
| 8 | IV | II | 1. Siswa mampu mendengarkan sejarah asal-usul suku bangsa Rejang dalam bahasa Rejang                                      | 1. Siswa memahami sejarah asal-usul suku bangsa Rejang dalam bahasa Rejang                                                |
|   |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan hari-hari besar dalam bahasa Rejang                                        | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan hari-hari besar dalam bahasa Rejang                                        |
|   |    |    | 3. Siswa mampu membaca surat izin dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                                          | 3. Siswa dapat membaca surat izin dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                                          |
|   |    |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat dengan menggunakan kata benda yang ada di sekitar sekolah dengan bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kalimat dengan menggunakan kata benda yang ada di sekitar sekolah dengan bahasa dan tulisan Rejang |
|   |    |    | 5. Siswa mampu membaca beberapa bait lagu dalam bahasa Rejang                                                             | 5. Siswa dapat menemukan kosakata sulit dari bait lagu dalam bahasa Rejang                                                |
|   |    |    | 6. 6. Siswa mampu menulis kalimat yang belum                                                                              | 6. Siswa dapat menyempurnakan kalimat dalam bahasa                                                                        |

|   |   |    | sempurna dalam bahasa Rejang                                                                     | Rejang                                                                                                 |
|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | V | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan pidato singkat dalam bahasa Rejang                                   | 1. Siswa dapat menemukan pesan pidato singkat dalam bahasa Rejang                                      |
|   |   |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang kegiatan gotong-royong di sekolah dalam bahasa Rejang      | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang kegiatan gotong-royong di sekolah dalam bahasa Rejang            |
|   |   |    | 3. Siswa mampu membaca puisi dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                      | 3. Siswa dapat membaca puisi dalam bahasa Rejang dengan intonasi yang benar                            |
|   |   |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang | 4. Siswa dapat menulis kalimat dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang       |
|   |   |    | 5. Siswa mampu mendengarkan lagu daerah Rejang                                                   | 5. Siswa dapat menyanyikan lagu daerah Rejang                                                          |
|   |   |    | 6. Siswa mampu menyusun cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                     | 6. Siswa dapat menyusun cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                           |
| 9 | V | II | 1. Siswa mampu mendengarkan kata sambutan perpisahan dalam bahasa Rejang                         | 1. Siswa dapat menemukan isi kata sambutan perpisahan dalam bahasa Rejang                              |
|   |   |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang peraturan tata tertib sekolah dalam bahasa Rejang          | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang peraturan tata tertib sekolah dalam bahasa Rejang                |
|   |   |    | 3. Siswa mampu membaca teks pidato dengan menggunakan bahasa Rejang                              | 3. Siswa dapat membacakan teks pidato dengan menggunakan bahasa Rejang secara nyaring                  |
|   |   |    | 4. Siswa mampu menulis kalimat tanya dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa              | 4. Siswa dapat menulis kalimat tanya dengan menggunakan huruf ngimbang dalam bahasa dan tulisan Rejang |

|        |    |    |                                                                                                            |                                                                                                            |
|--------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |    | dan tulisan Rejang                                                                                         |                                                                                                            |
|        |    |    | 5. Siswa mampu membaca nyaring pribahasa Rejang                                                            | 5. Siswa dapat membaca nyaring peribahasa Rejang                                                           |
|        |    |    | 6. Siswa mampu menulis cerita sederhana dalam bahasa Rejang                                                | 6. Siswa dapat menulis cerita sederhana dalam bahasa Rejang dengan sistematis                              |
| 1<br>0 | VI | I  | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata ucapan terimakasih dalam bahasa Rejang                               | 1. Siswa dapat mengucapkan kembali kata-kata ucapan terimakasih dalam bahasa Rejang                        |
|        |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah dalam bahasa Rejang | 2. Siswa dapat bercakap-cakap tentang pengalaman selama menempuh pendidikan di sekolah dalam bahasa Rejang |
|        |    |    | 3. Siswa mampu membaca kata-kata nasehat dengan menggunakan bahasa Rejang                                  | 3. Siswa dapat membacakan kata-kata nasehat dengan menggunakan bahasa Rejang                               |
|        |    |    | 4. Siswa mampu memahami teknik menulis huruf Rejang                                                        | 4. Siswa dapat menjelaskan teknik menulis huruf Rejang                                                     |
| 1<br>0 | VI | II | 1. Siswa mampu mendengarkan kata-kata ucapan selamat dalam bahasa Rejang                                   | 5. Siswa dapat melafalkan kembali ucapan selamat dalam bahasa Rejang                                       |
|        |    |    | 2. Siswa mampu bercakap-cakap tentang hobi dalam bahasa Rejang                                             | 6. Siswa dapat bercakap-cakap tentang hobi dalam bahasa Rejang                                             |
|        |    |    | 3. Siswa mampu membaca kata-kata iklan dalam bahasa Rejang                                                 | 7. Siswa dapat memahami pesan iklan dalam bahasa Rejang                                                    |
|        |    |    | 4. Siswa mampu menulis angka bejagung                                                                      | 8. Siswa dapat menulis angka bejagung                                                                      |

**KOMPETENSI DASAR**  
**KELAS VII-IX SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)**

| NO | KELAS | SMT | ASPEK STANDAR KOMPETENSI                                                                     | KOMPETENSI DASAR                                                                                  |
|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VII   |     | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                      | 1. Siswa dapat menggunakan kosakata dalam teks percakapan dengan tepat.                           |
|    |       |     | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan.                      | 2. Siswa dapat mengidentifikasi tokoh dalam dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan             |
|    |       |     | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                           | 3. Siswa dapat memperkenalkan diri sendiri dengan pelafalan yang tepat                            |
|    |       |     | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.                | 4. Siswa dapat menceritakan sebuah gambar dengan pelafalan yang tepat                             |
|    |       |     | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                               | 5. Siswa dapat mengartikan kosakata dalam teks percakapan yang tepat                              |
|    |       |     | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                              | 6. Siswa dapat membaca secara tepat satu paragraf cerita rakyat Rejang sesuai dengan pelafalannya |
|    |       |     | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis pesan singkat dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga     |
|    |       |     | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.     | 8. Siswa dapat menulis cerita pengalaman pribadi dengan tepat                                     |

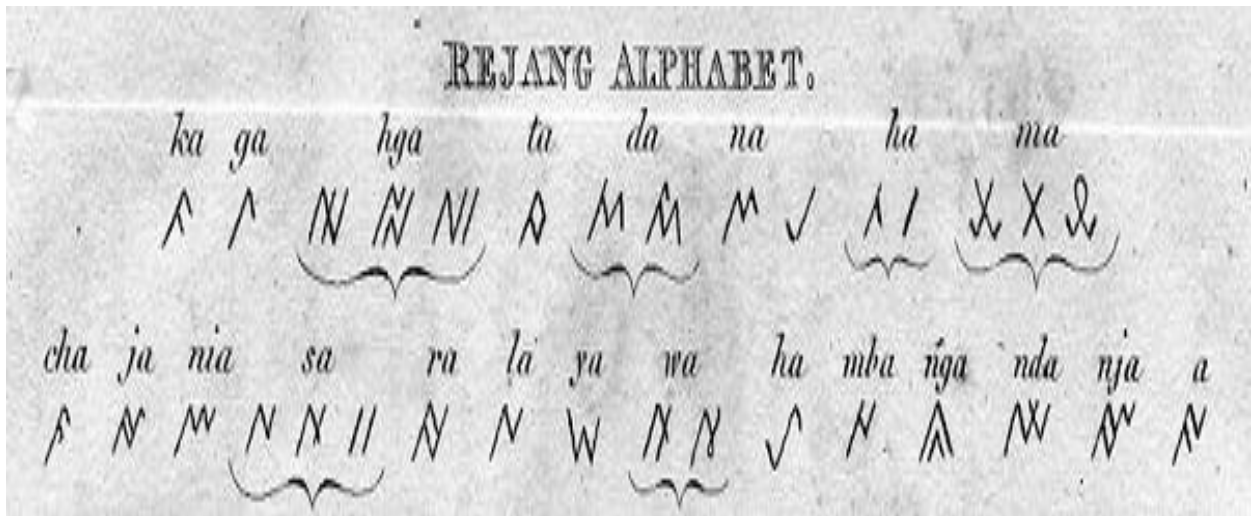
|   |      |  |                                                                                           |                                                                                                                |
|---|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | VIII |  | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                   | 1. Siswa dapat menuliskan kembali teks percakapan dengan kosakata yang tepat                                   |
|   |      |  | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan.                   | 2. Siswa dapat mengidentifikasi tema dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                                 |
|   |      |  | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                        | 3. Siswa dapat menceritakan kegiatan sehari-hari dengan pelafalan yang tepat                                   |
|   |      |  | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.             | 4. Siswa dapat menceritakan sebuah gambar dengan pelafalan yang tepat.                                         |
|   |      |  | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                            | 5. 1. Siswa dapat menggunakan kata sapaan yang tepat dalam teks percakapan                                     |
|   |      |  | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                           | 6. Siswa dapat membaca satu paragraf cerita rakyat Rejang dengan tepat sesuai dengan intonasi dan pelafalannya |
|   |      |  | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis beberapa kalimat dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga               |
|   |      |  | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.  | 8. Siswa dapat menulis cerita pendek dalam bahasa Rejang dengan tepat                                          |
| 3 | IX   |  | 1. Siswa dapat memahami kosakata dalam teks percakapan.                                   | 1. Siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat untuk melengkapi teks dialog percakapan yang diperdengarkan     |
|   |      |  | 2. Siswa dapat mengapresiasi dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                    | 2. Siswa dapat menyimpulkan amanat dalam dongeng rakyat Rejang yang diperdengarkan                             |

|  |  |                                                                                              |                                                                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. siswa dapat menyampaikan informasi dengan pelafalan yang tepat.                           | 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi dengan pelafalan yang tepat                                            |
|  |  | 4. siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita.                | 4. Siswa dapat menyampaikan informasi cerita bergambar dengan urutan yang tepat dan pelafalan yang jelas              |
|  |  | 5. Siswa dapat memahami ragam teks percakapan.                                               | 5. Siswa dapat menyimpulkan teks percakapan sesuai dengan konteks                                                     |
|  |  | 6. Siswa dapat membaca teks bacaan sastra dengan membaca indah.                              | 6. Siswa dapat membaca satu paragraf cerita rakyat Rejang dengan tepat sesuai dengan pelafalan, intonasi, dan gesture |
|  |  | 7. Siswa dapat mengungkapkan pikiran, pengalaman, dan informasi melalui tulisan Ka Ka Ga Nga | 7. Siswa dapat menulis dialog antar teman dalam bahasa Rejang dengan menggunakan tulisan Ka Ga Nga                    |
|  |  | 8. Siswa dapat mengapresiasi pikiran, perasaan dan pengalaman melalui pantun dan cerita.     | 8. Siswa dapat menulis pantun dalam bahasa Rejang dengan tepat                                                        |

**KOMPETENSI DASAR**  
**KELAS X-XII SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)**

| NO | ASPEK        | STANDAR KOMPETENSI                                                                                                           | KOMPETENSI DASAR                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MENDENGARKAN | 1. Siswa mampu memahami perubahan bunyi dalam kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Rejang yang diperdengarkan                | 1. Siswa mampu membedakan kalimat aktif dan pasif dalam percakapan yang diperdengarkan.                                                                                                                                                   |
|    |              | 2. Siswa mampu memahami pesan moral dalam peribahasa Rejang                                                                  | 2. Siswa mampu mengemukakan pesan moral dalam peribahasa Rejang yang diperdengarkan.                                                                                                                                                      |
|    |              | 3. Siswa mampu memahami pesan yang terkandung dalam syair lagu Rejang                                                        | 3. Siswa mampu menemukan pesan yang terkandung dalam syair lagu Rejang.                                                                                                                                                                   |
| 2  | BERBICARA    | 1. Siswa mampu mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi dengan menggunakan kalimat tanya dalam percakapan bahasa Rejang | 1. Siswa mampu menanyakan informasi dengan menggunakan kalimat tanya (jano, api, bene, tengen, nak-ipe/dik-ipe, awei-ipe)<br>2. Siswa mampu menyampaikan informasi dengan menggunakan kata depan (nak, mai, dik) dalam percakapan Rejang. |
|    |              | 2. Siswa dapat mengapresiasi pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita                                                 | 3. Siswa mampu menceritakan sebuah cerita pendek dalam bahasa Rejang.                                                                                                                                                                     |

|   |         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | MEMBACA | 1. Siswa mampu memahami wacana tulis dalam tulisan Rejang                            | <p>1. Siswa mampu menemukan ketibeak baso (anok, indok, bapok, ninik, sebei, puyang, muning, buluak, pelmong, teak bibik, tamang, minen, mamak, wok, kuyung, upik, asuak, kakok, adik, dayang, gindo, senenami, sepasuak) dalam wacana tulis aksara Rejang.</p> <p>2. Siswa mampu menemukan penggunaan kata ganti orang (kumu, miko, si, ko, udi, tobo o, kaben, keme, uku) dalam wacana tulis aksara Rejang.</p> <p>3. Siswa mampu membacakan kalimat pengandaian (amen-kirone, kaleu) dalam wacana tulis aksara Rejang.</p> |
|   |         | 2. Siswa mampu memahami isi berbagai teks bacaan sastra dalam tulisan Rejang         | 4. Siswa mampu membacakan pantun dalam wacana tulis aksara Rejang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | MENULIS | 1. Siswa mampu mengapresiasi pikiran, perasaan, dan informasi melalui tulisan Rejang | <p>1. Siswa mampu menyusun beberapa kalimat dalam tulisan Rejang dengan menggunakan kata penghubung (ngen, dik/de)</p> <p>2. Siswa mampu menulis kalimat ajakan (aro, maro, mi-ndai) dalam tulisan Rejang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |         | 2. Siswa mampu mengapresiasi peribahasa Rejang                                       | 3. Siswa mampu menulis peribahasa Rejang dalam tulisan Rejang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### **Petueak**

Uleak lilit dawen iben, bece'ei bakeak ngen tapuk ne. Uleak kelsip neak nangei, kotok bioa neak muaro. Saie kecek bareak iben mlilit junjung, anak kan nemuk kan, lei lem kulam nemuk wen.. Mas iso pirak iso, budei baik tun jibeak coa mego. Supayo pacak, rajin ba begueu, supayo lekat nebaik ba budei. Tenem coa ceakmengapung coa monot, adat kutai samo ite makei, lembago samo ite temuan, de baik samo ite makei de kidek samo ite muang..

### **Pegong Pakei**

Amen panuo lak kricas, amen tidoa jibeak tidoa bukei, amen miling lak su'uk, amen semapei pesen tun jibeak temameak kecek, amen tetanggo meak galak segungut...janjei menepat, lawen jibeak mesoa amen temeu jibeak mlilei, kebaik tun jibeak mabis, amen mai umeak tun..jibeak kemlicik bilik. Amen miling sletak ne, teguh pendirian...jibeak tempak bioa neak dulang, jibeak kmidek sukeu dewek. Ibadat jibeak lupu, tep ninget pesen ninik puyang, amen senang neak negerei tun, meak lupu taneak kelaheran...!!



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996. "Kualitas Pendidikan dalam Pengembangan Afektif untuk Kurikulum Muatan Lokal". Makalah Simposium Nasional Pergeseran Paradigma Pengembangan dan Inovasi Pendidikan, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*: Bahan Sosialisasi. <http://www.depdiknas.id.org>.
- Hymes, Dell. 1972. "Models of the Interaction of Language and Social Life" dalam, J.J. Gumperz dan Hymes (ed.) *Direction in Sociolinguistic*. New York: Rinehart & Winston.
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006. Jakarta.
- Moeliono, Anton. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Jambatan.
- Nababan, P.W.J. 1991. *Sosiolinguistik suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, 2010. Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Rejang. Bengkulu: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977. *Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Seri Penyuluhan 3.
- Rosidi, Ajip (editor). 1999. *Bahasa Nusantara suatu Pemetaan Awal*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Sayuti, Suminto A. 2003. "Muatan Lokal dalam Penyelenggaraan Pendidikan". Bukittinggi: Makalah Kongres Kebudayaan
- Sutrisna Wibawa, 1999. Apresiasi Sastra Wayang di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Sutrisna Wibawa, 2006. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Rejang di SMA/SMK/MA. Bengkulu: Makalah Kongres Bahasa Rejang.

**Lampiran Makalah [5] :**

**ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN  
PENGALAMAN PENGAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
DI SMA NEGERI 1 CURUP SELATAN**

**Oleh**

**Berlian.R, S.Pd**

**Kepala Sekolah SD Negeri 11 Curup Timur**

Disajikan pada Facus Group Discussion (FGD) Kajian Peestarian Nilai Budaya  
Kurikulum Muatan Lokal Di Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Dalam  
Perspektif Sejarah

### **1. Latar Belakang**

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Di era globalisasi persaingan kerja semakin ketat, oleh karena itu kita harus mengarahkan peserta didik bukan hanya bisa bekerja sebagai pegawai negeri (PNS) atau pegawai kantoran, tetapi mereka harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah.

Rejang lebong merupakan kabupaten yang terletak dilingkungan perbukitan, sehingga pertanian dan perkebunan merupakan kegiatan yang cocok untuk dikembangkan. Hasil pertanian dan perkebunan melimpah tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pada saat musim panen banyak jenis sayuran yang harganya merosot tajam, dan petani tidak dapat berbuat banyak selain membiarkan tanaman tersebut membusuk dikebun atau membuangnya ke sungai-sungai. Petani belum bisa memanfaatkan hasil pertanian perkebunan mereka dengan cara mengelolanya menjadi makanan atau oleh-oleh yang mempunyai nilai jual.

Hal ini lah yang mendorong SMA Negeri 1 Curup Selatan mengembangkan Muatan Lokal Kewirausahaan agar peserta didik dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dengan jiwa, semangat, dan keterampilan berwirausaha. Mata Pelajaran kewirausahaan merupakan pilihan tepat untuk dikembangkan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan berwirausaha, bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup, yang diwujudkan melalui

pencapaian kompetensi untuk bertahan hidup, serta mampu menyesuaikan diri agar berhasil dalam kehidupan bermasyarakat.

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) muatan lokal Kewirausahaan dikembangkan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berfungsi sebagai acuan pengembangan silabus yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik sekolah. SKL, SK, dan KD muatan lokal kewirausahaan untuk SMA Negeri 1 Curup Selatan dikembangkan mengacu pada kewirausahaan SMK disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan kemampuan guru yang mengajar.

Muatan lokal Kewirausahaan dimaksudkan agar peserta didik dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku wirausaha. Isi muatan lokal Kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang terjadi di lingkungan peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut, peserta didik dituntut untuk lebih aktif mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran muatan lokal kewirausahaan dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan, yang sangat terkait dengan cara mengelola usaha untuk membekali peserta didik agar dapat berusaha secara mandiri.

## 2. Tujuan

Muatan lokal Kewirausahaan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitarnya
- b. Berwirausaha dalam bidangnya
- c. Menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya
- d. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran muatan lokal Kewirausahaan di SMA Negeri 1 Curup Selatan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Sikap dan perilaku wirausaha
- b. Kepemimpinan dan perilaku prestatif
- c. Solusi masalah
- d. Pembuatan keputusan

## 4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

| Standar Kompetensi                                 | Kompetensi Dasar                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha | 1.1 Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan<br>1.2 Menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif<br>1.3 Merumuskan solusi masalah<br>1.4 Mengembangkan semangat wirausaha |

|                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 1.5 Membangun komitmen bagi dirinya dan bagi orang lain<br>1.6 Mengambil resiko usaha<br>1.7 Membuat keputusan                              |
| 2. Menerapkan jiwa kepemimpinan   | 2.1 Menunjukkan sikap pantang menyerah dan ulet<br>2.2 Mengelola konflik<br>2.3 Membangun visi dan misi usaha                               |
| 3. Merencanakan usaha kecil/mikro | 3.1 Menganalisis peluang usaha<br>3.2 Menganalisis aspek-aspek pengelolaan usaha<br>3.3 Menyusun proposal usaha                             |
| 4. Mengelola usaha kecil/mikro    | 4.1 Mempersiapkan pendirian usaha<br>4.2 Menghitung resiko menjalankan usaha<br>4.3 Menjalankan usaha kecil<br>4.4 Mengevaluasi hasil usaha |

### 5. Arah Pengembangan

Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

### 6. Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

**Lampiran Makalah [6] :**

## **ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN PENGALAMAN PENGAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI SMA NEGERI 1 CURUP SELATAN**

**Oleh  
Jalilah, S.Pd**

Disajikan pada Facus Group Discussion (FGD) Kajian Peestarian Nilai Budaya  
Kurikulum Muatan Lokal Di Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Dalam  
Perspektif Sejarah

Saya mengajar mata pelajaran muatan lokal mulai tahun 2006 saat kurikulum KTSP dikeluarkan. Saya sangat kebingungan ketika di beri tugas mata pelajaran ini karena tidak ada petunjuk dari pihak sekolah dan dinas bagaimana cara melaksanakannya. Semua kegiatan pembelajaran diserahkan ke guru yang mengajar, saya harus mencari sendiri materi yang ingin diajarkan. Tahun pertama mengajar muatan lokal, kegiatan pembelajaran dilakukan di sore hari karena belum bisa terjadwal di pagi hari, di tahun berikutnya baru diberikan jam di pagi hari tapi hanya 1 jam pelajaran kemudian berkembang menjadi 2 jam pelajaran. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan untuk dikembangkan, yaitu

- a. Tata boga; sarana dan prasarana pendukung tidak ada
- b. Tata busana; saya tidak mempunyai ke ahlian dalam hal menjahit pakaian dan mesin jahit disekolah belum punya
- c. Pertanian; lahan sekolah tidak mencukupi untuk kegiatan pertanian
- d. Membatik; saya belum mengerti tentang cara membatik
- e. Kaganga; saya tidak bisa bahasa dan tulisan rejang “kaganga” walaupun sudah lama tinggal di curup, jadi tidak mungkin mengajarkan anak bahasa rejang sedangkan saya sendiri sebagai guru tidak mengerti tulisan rejang.
- f. Kewirausahaan; buku pendukung ada di perpustakaan, saya menginginkan siswa memiliki keterampilan life skill yang bisa menjadi pertimbangan bagi mereka nanti setelah lulus sekolah.

Dengan berbagai pertimbangan akhirnya kewirausahaan adalah yang paling cocok untuk kembangkan, karena saya memang mempunyai latar pendidikan ekonomi akuntansi. Tapi proses pembelajarannya saya modifikasi sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya menerima materi saja tapi memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan yang disesuaikan dengan kondisi kabupaten Rejang Lebong. Pembelajaran materi wirausaha saya gabung dengan keterampilan seperti :

- a. Menjahit, menggunakan peralatan yang ada tanpa mesin jahit sehingga tidak membutuhkan modal besar
- b. Memanfaatkan barang bekas atau plastic untuk dijadikan hiasan atau peralatan
- c. Memanfaatkan hasil bumi yang ada di kabupaten Rejang Lebong untuk di olah menjadi makanan atau oleh-oleh. Seperti membuat kue dari ubi ungu, manisan terong, manisan pepaya.
- d. Membuat masakan khas Rejang Lebong
- e. Mengadakan bazaar; siswa diminta untuk membuat makanan kemudian menghitung biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungan yang diinginkan, berapa harga jual, dan setelah selesai apakah keuntungan tersebut bisa di capai.
- f. Pembuatan batik tulis sederhana untuk jilbab dan kaos

Selain memberikan keterampilan, mereka juga saya ajak mengadakan pengamatan langsung kelapangan tentang cara-cara berwirausaha untuk usaha kecil menengah. Baik itu saya terjun langsung ke lapangan bersama siswa maupun pemberian tugas kelompok kepada anak untuk mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pelaku usaha yang ada di kota curup dan sekitarnya.

Beberapa contoh yang pernah dilakukan adalah:

- a. Berkunjung ketempat usaha pembuatan tahu dan tempe
- b. Berkunjung ke usaha pembuatan jagung marning
- c. Belajar langsung cara pembuatan pupuk alami untuk bunga antorium
- d. Berkunjung ke tempat usaha pembuatan keripik ubi ungu, dan lain-lain.

Sampai sekarang kegiatan tersebut masih dilakukan dalam proses pembelajaran muatan lokal di SMA Negeri 1 Curup Selatan dengan harapan siswa tidak hanya mendapatkan materi tentang kewirausahaan di kelas, tetapi juga mempunyai pengetahuan dan pengalaman secara langsung penerapan kewirausahaan di lapangan. Sehingga setelah tamat sekolah mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa mencoba untuk berwirausaha.

## **Lampiran Makalah [7] :**

### **Model Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa Rejang sebagai Muatan Lokal di Sekolah Kabupaten Rejang Lebong**

Maria Botifar, M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Curup

(Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion Penelitian Kurikulum Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang pada tanggal 25 Februari 2014)

#### **Abstrak**

Perubahan teknologi dan perkembangan jaman memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa. Bahasa yang hidup dan mengalami perkembangan ditandai dengan masih bertahannya bahasa tersebut dalam masyarakat. Bahasa yang mulai terpinggirkan dalam lingkungan perkembangan masyarakat adalah bahasa lokal atau bahasa daerah. Kurang minatnya pemakai bahasa terhadap bahasa tersebut salah satunya dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak sejalan lagi dengan perkembangan bahasa. Masyarakat bahasa sudah memilih bahasa yang sesuai dengan kepentingan hidupnya. Tentu saja kecenderungan ini memberikan pengaruh negatif terhadap pemertahanan sebuah bahasa. Saat ini keluarga dan masyarakat tidak lagi menjadi sekolah bagi keberlangsungan bahasa lokal. Untuk itu peran tersebut harus digantikan oleh sekolah formal. Melalui pengembangan kurikulum akan diperoleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Analisis kebutuhan pembelajar ini penting mengingat kebutuhan bahasa itu bukan hanya milik sekolah tetapi juga milik pemakai bahasa tersebut.

#### **Pendahuluan**

Pada awalnya kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah (Ahmad.1997:9), pengertian ini sangat tradisional. Seiring perkembangan tuntutan dan kebutuhan terhadap sekolah, definisi kurikulum mengalami perluasan. Masyarakat tidak lagi menuntut tentang ilmu apa yang harus diperoleh siswa di sekolah, tetapi juga segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tidak hanya berhubungan dengan sekolah namun juga di luar sekolah.

Upaya untuk memberikan pemahaman mengenai definisi kurikulum ini tidak dapat lepas dari arti kurikulum berdasarkan asal kata. Kurikulum berasal dari kata "curere" dari bahasa Yunani yang berarti "jarak tempuh lari". Asal kata ini

memberikan batasan bahwa kurikulum menunjukkan adanya "suatu jarak yang harus ditempuh dari awal sampai akhir. (S. Nasution, 2008:1)

Adanya pengembangan definisi kurikulum yang semakin luas memberikan refleksi kebutuhan masyarakat terhadap sekolah semakin kompleks. Masyarakat tidak lagi menganggap sekolah sebagai "pusat belajar" tetapi bagaimana sekolah dapat mengembangkan "belajar" itu sendiri. Perubahan definisi kurikulum ini sendiri menyiratkan adanya perubahan tentang hakikat belajar.

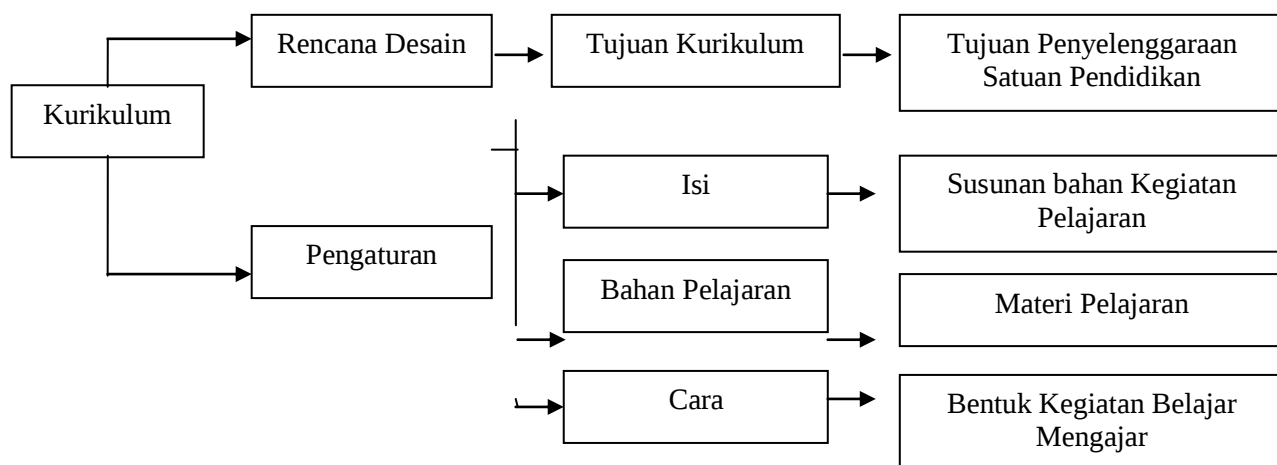
Pada dasarnya, menurut Hamalik (2001:16), pengertian kurikulum akan mencerminkan beberapa hal yaitu

- a) kurikulum memuat isi dan materi pelajaran
- b) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran
- c) Kurikulum sebagai pengalaman belajar.

Beberapa tafsiran kurikulum ini juga digambarkan oleh Nasution (2008:9) yang menggolongkan kurikulum ke dalam:

- 1) Kurikulum sebagai produk, hasil pengembangan kurikulum yang dituangkan dalam pedoman kurikulum
- 2) Kurikulum sebagai program, yaitu alat pencapaian tujuan sekolah
- 3) Kurikulum sebagai hal yang harus dipelajari siswa yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu.
- 4) Kurikulum sebagai pengalaman siswa

Namun, pengertian kurikulum yang dijadikan pedoman dalam menjalankan roda pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelas mengenai gambaran kurikulum yang dikembangkan oleh suatu sistem pendidikan nasional, berikut ini akan disampaikan mengenai bagan tersebut.



Pengertian kurikulum di atas jelas bersifat sentralistik, karena kebutuhan sekolah ditentukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Indonesia. Sementara di sisi lain kebutuhan setiap sekolah tersebut tidak sama. Untuk itu perlunya merekonstruksi kembali pengertian kurikulum yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Pengembangan kurikulum atau curriculum development sebagai upaya mensinergikan antara kurikulum dengan kebutuhan pembelajar menjadi alternatif dalam sebuah pengajaran bahasa, khususnya bahasa lokal. Untuk itu dalam tulisan ini akan memaparkan bagaimana pengembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa lokal (bahasa Rejang) sebagai muatan lokal di sekolah.

### **Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa**

Sejarah pengembangan kurikulum dalam pengajaran bahasa diawali dengan pengembangan silabus berdasarkan metode pengajaran bahasa (Richards, 2002:2). Pengembangan kurikulum saat ini sangat dibutuhkan mengingat persoalan pendidikan bukan lagi persoalan "dunia pendidikan" semata, tetapi juga persoalan semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pendidikan tersebut.

Untuk itu berbicara mengenai pengembangan kurikulum akan berfokus pada penentuan apakah itu pendidikan, skill dan nilai apa yang akan dipelajari siswa di sekolah, pelajaran apa yang harus didapat dalam hasil pembelajaran, dan bagaimana pembelajaran dan pengajaran di sekolah atau sistem pendidikan direncanakan, diukur dan dievaluasi (Richards, 2002:2). Intinya, dalam pengembangan kurikulum menggambarkan hubungan suatu proses yang terfokus pada perencanaan, revisi, pelaksanaan dan pengevaluasian program bahasa.

Untuk itu Richards (2002) dalam bukunya *Curriculum Development in Language Teaching* mengatakan:

"Curriculum development is a more comprehensive process than syllabus design. It includes the processes that are used to determine the needs of a group of learners, to develop aims or objectives for a program to address those needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, teaching methods, and materials, and to carry out an evaluation of the language program that results from these processes."

Pengembangan kurikulum jauh lebih kompleks dibandingkan dengan rancangan silabus. Pengembangan kurikulum berkenaan dengan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pembelajaran, mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, menentukan silabus yang tepat, jadwal belajar, metode mengajar, bahan serta evaluasi.

Harold Palmer (1992, 38-39) mengenalkan prinsip-prinsip metodologi pengajaran bahasa yang menjadi pondasi metode struktural pada tahun 1920an adalah:

1. Persiapan awal (penyesuaian dari siswa terhadap pembelajaran bahasa)

2. Pembentukan kebiasaan (penyediaan kebiasaan yang tepat)
3. Ketepatan (menghindari ketidaktepatan bahasa)
4. Gradasi (setiap tahap mempersiapkan siswa untuk masa berikutnya)
5. Perbandingan (tiap aspek bahasa terdapat penekanan)
6. Nyata (pergeseran dari konkrit ke abstrak)
7. Minat (meningkatkan terus minat siswa)
8. Perintah dalam peningkatan (mendengar sebelum berbicara dan melakukan keduanya sebelum menulis)
9. Berbagai macam pendekatan (penggunaan bermacam cara dalam mengajar bahasa)

Prinsip-prinsip dalam metodologi pengajaran bahasa inilah yang menjadi pondasi dalam pengembangan kurikulum, khususnya perencanaan silabus dalam pengajaran bahasa untuk periode selanjutnya. Namun pada intinya menurut Tyler (1950:1) dalam pengembangan kurikulum hanya menjawab empat pertanyaan fundamental yang menjadi dasar dalam menjabarkan apa yang menjadi bahan yang perlu digali, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan apa yang harus dicapai sekolah?
- b. Pengalaman belajar apa yang dapat ditunjukkan untuk mencapainya?
- c. Bagaimana pengalaman-pengalaman belajar ini diatur secara efektif?
- d. Bagaimana kita menentukan apakah tujuan ini sudah dicapai?

Pernyataan Tyler ini penting dan menjadi kebangkitan dalam penelitian kurikulum. Inti dalam pengembangan kurikulum terdapat dalam empat hal, yaitu struktur-isinya-susunan/aturan-evaluasi.

Persoalan pengembangan kurikulum merupakan persoalan kebutuhan siswa. Siswa sebagai *stakeholders* yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Untuk itu tujuan pendidikan harus menggambarkan sikap siswa, bukan sikap gurunya dan mengetahui perubahan apa yang dalam pelajaran sebagai hasil dari pengajaran (Tyler, 1950:1)

Model yang memenuhi kriteria pengembangan kurikulum tersebut dikembangkan oleh Tyler, dengan model sebagai berikut:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kebutuhan<br>Tujuan dan sasaran | 2. Rencana<br>Strategi/taktik     |
| 3. Implementasi<br>Metode/teknik   | 4. Ulasan<br>evaluasi konsolidasi |

Model Tyler ini menggambarkan proses yang harus dilewati dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Awal pengembangan adalah penjarangan kebutuhan dalam rangka memenuhi apa yang ingin diperoleh atau paling tidak mampu menjawab pertanyaan fundamental. Kebutuhan ini tidak terlepas dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Penjarangan kebutuhan ini akan menentukan rencana, yang didalamnya memuat strategi atau taktik yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya pengembangan kurikulum.

Selanjutnya, tahap implementasi merupakan tahap pembuktian produk yang dilakukan dengan menerapkan metode atau teknik yang cocok dengan kurikulum yang akan dikembangkan. Terakhir berupa ulasan yang memberikan umpan balik terhadap produk dengan melakukan evaluasi dan konsolidasi.

Dalam tahapan pengembangan kurikulum di atas perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang penting, yaitu:

- a. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan.
- b. Sosial budaya dan agama yang berlaku di masyarakat kita.
- c. Perkembangan peserta didik yang merujuk pada karakteristik perkembangan peserta didik.
- d. Keadaan lingkungan, yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi (interpersonal), lingkungan kebudayaan termasuk IPTEK (kultural) dan lingkungan hidup (bioekologi) serta lingkungan alam (geoekologis)
- e. Kebutuhan pembangunan, yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, Hankam, dan sebagainya.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.

Prinsip-prinsip kurikulum tersebut diejawantahkan dalam aspek-aspek berikut ini :

- 1) Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat, sistematis tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala.
- 2) Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala.
- 3) Generalisasi adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian.
- 4) Prinsip adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
- 5) Prosedur adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa.
- 6) Fakta adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi orang dan tempat serta kejadian.
- 7) Istilah adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi.
- 8) Contoh atau ilustrasi adalah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat.
- 9) Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal/suatu kata dalam garis besarnya.
- 10) Preposisi adalah suatu pernyataan atau theoremata atau pendapat yang tak perlu diberi argumentasi. Preposisi hampir sama dengan asumsi dan paradigma.

### **Pendekatan Komunikatif sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum Pembelajaran Bahasa Lokal (Bahasa Rejang)**

Salah satu prinsip pembelajaran bahasa menurut pandangan para ahli pendekatan komunikatif dikemukakan oleh Canale dan Swain (1980), yang secara tegas mengatakan bahwa kemampuan berbahasa seorang anak ditentukan oleh tingkat penguasaan kompetensi komunikatif yang terdiri atas empat kompetensi yang meliputi : (1) kompetensi gramatikal, (2) kompetensi sociolinguistik, (3) kompetensi kewacanaan, dan (4) kompetensi strategik.

Kompetensi gramatikal yaitu pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tata bunyi, kosakata, serta tata bahasa. Kompetensi sociolinguistik menyangkut penguasaan memilih bentuk komunikasi yang sesuai dengan lawan bicara, tempat, suasana, saluran komunikasi, serta aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi.

Selanjutnya, kompetensi kewacanaan meliputi kemampuan memilih bentuk wacana yang sesuai dengan konteks komunikasi. Terakhir, kompetensi strategik mencakup keberanian, rasa percaya diri, kemampuan berbagi peran dengan lawan bicara, dan sebagainya.

Brumfit dan Finocchiaro mengungkapkan ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah (1) makna merupakan yang terpenting, (2) percakapan harus berpusat disekitar fungsi komunikatif dan tidak dihapalkan secara normal, (3) kontekstualisasi merupakan premis pertama, (4) belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi, (5) komunikasi efektif dianjurkan, (6) latihan atau drill diperbolehkan tetapi tidak memberatkan, (7) ucapan yang dapat dipahami, diutamakan, (8) setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik, (9) segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal, (10) penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak, (11) terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik, (12) membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal, (13) sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi, (14) komunikasi komunikatif merupakan tujuan, (15) variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi, (16) urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk memperkuat minat belajar, (17) guru mendorong peserta didik agar dapat bekerjasama dengan menggunakan bahasa itu, (18) bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba, (19) kefasihan dan bahasa yang berterima merupakan tujuan utama, ketepatannya dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan, (20) peserta didik diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan, lisan dan tulis, (21) guru tidak bisa meramal bahasa apa yang akan digunakan peserta didik, dan (22) motivasi intrinsik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang dikomunikasikan.

Berdasarkan teori pendekatan komunikatif di atas, maka kompetensi komunikatif yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum bahasa lokal (bahasa Rejang) menyangkut kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan memperhatikan aspek wacana, sosiokultural, strategik, dan linguistik.

### **Analisis Kebutuhan Pengembangan Kurikulum dalam Pengajaran Bahasa Rejang**

Salah satu fase yang paling penting dalam pengembangan kurikulum adalah mengetahui kebutuhan pembelajar dalam proses pendidikan. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pembelajaran disebut dengan analisis kebutuhan (Richards, 2002: 51). Analisis kebutuhan ini hadir dalam rancangan program pendidikan sejak tahun 1960 sebagai bagian dari sistem dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum dan menjadi filosofi dari akuntabilitas pendidikan (Stuff Lebeam, Mc Cormick, Brinker hoff, dan Welson (1985) dalam Richards: 51).

Sejak tahun 1980, pengajaran bahasa berbasis kebutuhan muncul, khususnya dalam program rancangan yang berorientasi kejuruan (Bindley (1984) dalam Richards: 51). Pendekatan dalam analisis kebutuhan ini hendaklah mempertimbangkan hal berikut: (1) tujuan dari analisis kebutuhan, (2) asal kebutuhan, (3) untuk siapa analisis kebutuhan, (4) siapa target populasinya, (5) siapa yang mengumpulkan informasi, (6) prosedur yang digunakan, (7) bagaimana informasi yang telah digunakan.

#### **(1) Tujuan Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan dalam pengajaran bahasa dapat digunakan untuk sejumlah tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menemukan keterampilan bahasa yang mana dibutuhkan untuk pembelajar dalam memainkan peran khusus, seperti manajer perusahaan, pemandu wisata atau mahasiswa.
- 2) Untuk membantu menentukan secara jelas kebutuhan siswa-siswa yang berpotensi.
- 3) Untuk menentukan siswa dari sebuah kelompok yang paling perlu pelatihan dalam keterampilan bahasa tertentu.
- 4) Untuk mengetahui perubahan petunjuk bahwa apa yang dirasakan orang-orang dari grup yang bersangkutan itu penting,
- 5) Untuk menentukan batas antara apa yang dapat dilakukan dan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan hal tersebut,
- 6) Untuk mengumpulkan informasi mengenai problem pembelajar (Richards, 2002 : 52).

Menentukan secara jelas tujuan adalah langkah awal dalam analisis kebutuhan.

#### **(2) Batasan Kebutuhan**

Kebutuhan pada dasarnya mengacu pada keinginan, hasrat, permintaan, penghargaan, motivasi, ketiadaan, desakan dan syarat-syarat (Brindley 1984 : 28 dalam Richards, 54). Namun kebutuhan sering digambarkan sebagai gambaran perbedaan antara apa yang pembelajar dapat lakukan dengan bahasa dan apa yang harus dapat dia lakukan. (Porchen (1977), dalam Brindley (1984) dalam Richards, 54) menawarkan pandangan yang berbeda, bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang dapat dibangun, pusat jaringan konseptual dan hasil dari sejumlah pilihan epistemologi. Dalam istilah

kebutuhan bahwa lebih spesifik lagi sebagai keterampilan berbahasa yang dibutuhkan agar dapat bertahan di lingkungan yang kompleks.

(3) Pengguna Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dapat diatur sesuai dengan pengguna analisis yang berbeda. Pengguna analisis akan menentukan analisis kebutuhan sesuai dengan siapa pengguna akhirnya. Beberapa pengguna dalam analisis kebutuhan adalah:

- 1) Bagian kurikulum di kementerian pendidikan yang ingin menggunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kecukupan silabus yang ada, kurikulum dan bahannya
- 2) Guru yang akan mengajar dari kurikulum baru
- 3) Pelajar yang akan diajar
- 4) Penulis/penyusun, siapa yang mempersiapkan buku pelajaran yang baru
- 5) Personil pengujian atau siapa yang dilibatkan dalam pengembangan akhir dari penilaian sekolah
- 6) Staf lembaga pendidikan, atau siapa yang berminat akan pengetahuan tingkat apa yang diharapkan dari siswa yang abaru tamat sekolah dan masalah yang dihadapinya.

(3) Populasi Target

Populasi target dalam sebuah analisis kebutuhan mengacu pada masyarakat di mana informasi itu bisa didapatkan. Dalam proses bahasa, populasi target ini bisa menjadi pembelajar bahasa atau pembelajar bahasa yang potensial, tetapi yang lain juga dapat dilibatkan tergantung pada apakah mereka bisa menyediakan informasi yang berguna dalam mencapai sasaran analisis kebutuhan. Populasi target dapat meliputi: a) pembuat kebijakan, b) kementerian pendidikan, c) guru, d) siswa, e) akademisi, f) pekerja, g) spesialis pelatih kejuruan, h) orang tua, i) orang-orang yang berpengaruh dan kelompok yang berkuasa, j) spesialis akademis, k) perwakilan masyarakat.

(5) Perancang Analisis Kebutuhan

Perencanaan sebuah analisis kebutuhan melibatkan siapa yang akan memantau analisis kebutuhan, mengumpulkan dan menganalisis hasilnya. Dalam pengembangan kurikulum, perancang yang tepat dalam analisis kebutuhan adalah guru itu sendiri sebagai upaya untuk penyediaan ketepatan kebutuhan belajar.

(6) Prosedur Analisis Kebutuhan

Berbagai prosedur dapat digunakan dalam penyaluran analisis kebutuhan dan jenis informasi yang akan didapat. Hal ini tergantung pada pemilihan prosedur. Penggunaan prosedur pada satu sumber saja tentu tidak akan lengkap dan parsial. Untuk itu pendekatan triangulasi dapat dipertimbangkan untuk dipakai. Prosedur mengumpulkan informasi dalam analisis kebutuhan yang dapat dipilih adalah: a) kuesioner, b) penilaian pribadi, c) interview/wawancara, d) pertemuan, e) observasi/pengamatan, f) pengumpulan sampel, g) analisis tugas, h) studi kasus, i) analisis ketersediaan informasi.

(7) Perancangan Analisis Kebutuhan

Perancangan analisis kebutuhan melibatkan pilihan yang telah dibahas di atas yang memberikan pandangan yang komprehensif akan kebutuhan siswa. Pemilihan ini meliputi pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan pelaporan informasi yang terkumpul.

### **Kondisi Obyektif Pembelajaran bahasa Rejang**

Bahasa Rejang merupakan bahasa ibu yang lahir dan berkembang di tanah kelahirannya. Sebagai bahasa ibu, bahasa Rejang pun menjadi bahasa kolokial yang hidup di tengah masyarakat. Ia menjadi bahasa pergaulan, bahasa adat, bahasa budaya dan bahasa keluarga dalam masyarakat setempat.

Proses pendidikan di keluarga, disaranai oleh bahasa Rejang sebagai upaya pewarisan budaya dan pola pikir masyarakat setempat. Perkembangan zaman hari ini, menyebabkan pola pewarisan ini menjadi tersumbat. Bahasa Rejang bersentuhan secara langsung dengan bahasa lain yang juga mengalami tumbuh kembang dalam masyarakat. Bahasa Indonesia, misalnya, sebagai bahasa resmi Negara, bahasa Indonesia selalu bersinggungan dengan bahasa daerah yang ada dalam masyarakat. Begitu juga dengan bahasa lokal yang secara langsung bergesekan dengan bahasa Indonesia. Pilihan masyarakat terhadap kedua bahasa ini akan menggiring kepunahan bahasa yang lain.

Ketertinggalan bahasa Rejang terhadap bahasa Indonesia tidak lagi menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Prestise yang menggiring sikap berbahasa mengakibatkan bahasa lokal menjadi bahasa yang tertinggal. Orang tidak lagi menganggap bahasa lokal menjadi bahasa “kebutuhan” untuk memenuhi kehidupannya, karena ia tidak dapat beradaptasi dengan pola kehidupan masyarakat yang berkembang.

Saat ini di keluarga inti suku Rejang telah terjadi perubahan penggunaan bahasa Rejang. Bahasa Rejang telah bergeser hanya menjadi bahasa budaya yang muncul saat terjadinya even-even budaya, misal upacara perkawinan. Komunikasi dalam keluarga inti dengan menggunakan bahasa Rejang hanya berhenti pada orang tua, tidak terjadi dalam komunikasi dengan anak. Anak memilih bahasa pergaulan sebagai bahasa kolokialnya, misal bahasa Melayu Bengkulu.

Pewarisan bahasa Rejang tidak lagi berjalan secara alamiah di rumah. Keluarga inti tidak lagi berperan sebagai sekolah bagi anak dalam mewariskan bahasa Rejang. Lingkungan pergaulan, baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan lainnya juga tidak lagi menjadi sarana dalam pembelajaran bahasa Rejang.

Sekolah sebagai sarana pendidikan dapat mengambil alih peran keluarga tersebut dengan menjadikan bahasa Rejang sebagai bahasa yang harus dipelajari di sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal.

### **Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang**

Bahasa Rejang sebagai pelajaran muatan lokal selama ini telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi tanggal 26 Juli 2003 prihal: kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah agar menyusun kurikulum pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah untuk memprogramkan

mata pelajaran (a) bahasa Rejang atau bahasa Rejang Lembak, (b) aksara Ka Ga Nga atau aksara Rikung, (c) kesenian Rejang Lebong, (d) pengenalan alat musik Rejang, dan (e) adat istiadat, kurikulum, adat, serta petatah-petitih yang hidup di masyarakat.

Adanya instruksi Bupati tersebut memberikan kekuatan hukum bagi sekolah untuk terkonsentrasi mengembangkan muatan lokal lebih baik. Namun kenyataannya, pelajaran muatan lokal di sekolah hanya menjadi pelengkap mata pelajaran saja. Tidak diprogramkan menjadi program unggulan sekolah, sehingga proses pembelajarannya lebih diperhatikan. Selama ini, pembelajaran muatan lokal tingkat SMP yang berhubungan dengan bahasa Rejang belum ada. Muatan lokal baru terbatas pada pengenalan aksara Ka Ga Nga, yang telah siswa pelajari terlebih dahulu di SD.

Muatan lokal bahasa Rejang dengan materi yang diajarkan aksara Ka Ga Nga berpedoman pada buku aksara Ka Ga Nga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, dengan materi ajar yang sangat minim. Pembelajaran ini belum mencakup pada pembelajaran bahasa secara umum. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif, bukan hanya pada aspek pengetahuan bahasa saja.

Selayaknya pembelajaran bahasa Rejang harus mengacu pada pendekatan komunikatif yang menjadi paradigma pembelajaran di sekolah saat ini. David Nunan (1991, dalam Mulyati 2008, 2) memberikan rambu-rambu bagi pembelajaran bahasa yang komunikatif melalui karakteristik berikut: (1) penekanan terhadap belajar berkomunikasi melalui interaksi komunikatif; (2) pengenalan teks otentik dalam situasi belajar; (3) memberikan kesempatan untuk belajar bahasa dan manajemen belajar; (4) pemberian pengalaman personal dalam belajar; (5) menunjukkan hubungan antara pembelajaran bahasa di kelas dengan aktivitas berbahasa di luar kelas.

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang disusun mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Materi tingkat SD menjadi pondasi dalam memahami materi tingkat SMP dan SMA. Materi disusun secara hirarki dengan tingkat kemudahan, konkrit, dekat, sampai menuju sulit, abstrak dan jauh. Secara konteks berbahasa lebih difokuskan pada konteks sekolah dan rumah, misal memahami peralatan rumah dalam bahasa Rejang. Inti materi kurikulum berkaitan dengan huruf, kata, kalimat, paragraf, wacana, tanda bunyi, huruf ngimbang, dongeng, sejarah suku Rejang, lagu daerah, pribahasa, cerita rakyat, nasehat, angka bejagung. Aspek berbahasa difokuskan pada empat keterampilan berbahasa yaitu, aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Semua materi berbahasa ditulis dengan menggunakan huruf Ka, ga, Nga.

Isi kurikulum muatan lokal bahasa Rejang di atas didasarkan oleh analisis kebutuhan yang dijangkau dari siswa. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari data berikut ini:

TABEL  
PENDAPAT SISWA TENTANG KEBUTUHAN BELAJAR  
BAHASA REJANG  
SMP NEGERI KABUPATEN REJANG LEBONG

| NO | KEBUTUHAN BELAJAR                                            | JUMLAH RESPONDEN | %     |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1  | Cara mengucapkannya                                          | 22               | 24.72 |
| 2  | Cara menuliskannya/menulis bahasa Rejang dengan baik         | 54               | 60.67 |
| 3  | Bisa mengerti apa yang diucapkan orang yang berbahasa Rejang | 19               | 21.35 |
| 4  | Mendongeng/mendengarkan orang mendongeng legenda             | 15               | 16.85 |
| 5  | Menulis cerita                                               | 3                | 3.37  |
| 6  | Mempelajari bahasa Rejang                                    | 7                | 7.87  |
| 7  | Membaca tulisan Rejang dengan baik                           | 28               | 31.46 |
| 8  | Berbicara bahasa Rejang dengan baik dan lancar               | 61               | 68.54 |
| 9  | Mengenal bahasa Rejang                                       | 5                | 5.62  |
| 10 | Menciptakan cerita/sejarah/buku tentang Rejang               | 8                | 8.99  |
| 11 | Mengetahui adat budaya Rejang                                | 32               | 35.96 |
| 12 | Menyanyi lagu Rejang                                         | 5                | 5.62  |
| 13 | Sejarah bahasa Rejang                                        | 21               | 23.60 |
| 14 | Rumah adat, peninggalan, makanan, pakaian                    | 4                | 4.49  |
| 15 | Tatacara berbahasa Rejang                                    | 7                | 7.87  |

Keterangan jumlah siswa kelas:

VII : 28 orang

VII

I : 31 orang

IX : 30 orang

$\Sigma$  : 89 orang

setiap siswa mengungkapkan lebih dari 1 pendapat/kebutuhan

### Beberapa Hambatan dalam Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Rejang

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang mulai disusun pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim pengembang Kurikulum Bahasa Rejang. Tim terdiri dari unsur BMA, akademisi, guru SD-SMP-SMA, dan dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang ini akan dipayungi secara hukum melalui Peraturan Daerah tentang muatan lokal bahasa Rejang. Melalui PERDA ini diharapkan seluruh sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA baik dibawah naungan Pendidikan Nasional ataupun Kementerian Agama dapat menjadikan bahasa Rejang sebagai muatan lokal di sekolah.

Melalui usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tentang muatan lokal bahasa Rejang disampaikan ke DPRD kabupaten Rejang Lebong. Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang dan Dinas Pendidikan diundang Komisi DPRD untuk melakukan kegiatan dengar pendapat yang akan diputuskan melalui rapat paripurna. Rapat paripurna pada tahun 2011 memutuskan menunda Perda tentang muatan lokal bahasa Rejang.

### Penutup

Kurikulum muatan lokal bahasa Rejang menjadi sarana pendidikan yang efektif dalam melestarikan budaya dan bahasa Rejang. Apalagi dalam kurikulum 2013 telah mendudukan bahasa daerah setara dengan bahasa Indonesia. Dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 menyebutkan penggunaan bahasa di kelas dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sungguh sebuah ironi jika pemilik bahasa Rejang yang oleh Guru Besar Ilmu bahasa Universitas Indonesia, Multamia Lauder dalam kongres bahasa-bahasa daerah Wilayah Barat mengemukakan bahasa Rejang sebagai salah satu dari 13 bahasa daerah yang masih *survive* di wilayah barat harus kehilangan bahasanya mungkin dalam 30 tahun atau lebih kedepannya.

Hal ini didukung oleh hipotesis sosiolinguistik yang menyebutkan Bahwa semakin muda usia penutur setiap bahasa tidak lagi cakap menggunakan bahasa ibu dalam pergaulan sehari-hari maka semakin cepat bahasa tersebut mengalami kepunahan. Gerak ke arah kepunahan akan lebih cepat lagi, bila disertai dengan semakin berkurangnya cakupan dan jumlah ranah penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari, atau semakin meluasnya ketiadaan penggunaan bahasa dalam sejumlah ranah, terutama ranah keluarga (Ibrahim, 2008: 6).

Untuk itu, menjadi penting bagi Pemerintah daerah Rejang lebong segera mewujudkan PERDA yang mengatur bahasa Rejang sebagai bahasa yang wajib dipelajari oleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran muatan lokal.

### Rujukan Pustaka

- Ayatrohaedi. 1990. *Kubur pun Sudah Digali: Bilingualisme dan Variasi Bahasa*. Depok: Fakultas Sasra UI.
- Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. 2007. *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Rejang Lebong.
- Borg R. And Gall, D. 1989. *Educational Research*. New York: Longman Inc.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Dardjowidjojo, Soenjono. 2003. *Psikolinguistik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Davidoff, Linda L. Tanpa Tahun. *Psikologi Statu pengantar*. Terjemahan oleh Mari Juniati. 1988. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu Nomor: 73/120/H/94 tanggal 17 Mei 1994 tentang Kurikulum Muatan Lokal.
- Departemen pendidikan Nasional. Model Mata Pelajaran Muatan Lokal. 2006. Jakarta.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.M. Ahmad, dkk. 1997. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Ibrahim, Gufran Ali. *Bahasa Terancam Punah: Fakta Sebab-Musabab, Gejala dan Strategi Perawatannya*. Makalah disampaikan dalam Kongres IX Bahasa Indonesia Jakarta. 28 Oktober – 1 November 2008.
- Jakaria, Yaya. 2009. *Uji Coba Model* (online) ([http://www.infokursus.net/download/0604091357\\_Validasi\\_Model\\_R&D.pdf](http://www.infokursus.net/download/0604091357_Validasi_Model_R&D.pdf)).
- Kadirman. 2004. *Ireak Ca' o Kutei Jang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompas. 11 Agustus 2009. 169 *Bahasa Daerah Terancam Punah*. <http://www.kompas.com/> Senin, 18 Agustus 2008.10.30.
- Maryani, Yeyen. 2008. *Pengembangan Peran Lembaga Kebahasaan: Kendala dan Peluang*. Disampaikan dalam Kongres IX Bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober – 1 November 2008.
- Musen, Paul Henry, dkk. Tanpa Tahun. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. Diterjemahkan oleh Meitasari Tjandrasa. 1988. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasution, S. 2008. *Asas –Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara..
- Richards, Jack C. 2001. *Curriculum Development in Language Teaching*. USA: Cambridge University Press.
- Santoso. 2007. *Aksara Ka Ga Nga*. Rejang Lebong: Badan Musyawah Adat Kabupaten Rejang Lebong.
- Sugiyono, 2008. *Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suherman. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata*. Makalah disampaikan dalam seminar Lembaga-lembaga Masyarakat Rejang Sebelum Kemerdekaan. Pemda Kabupaten Rejang Lebong. 15 Mei 2007.
- Trianto, Agus. 2001. *Belajar Bahasa Kedua*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Tim Puslitjaknov. 2008. *Metode Penelitian Pengembangan* (online)..([http://www.infokursus.net/download/0604091354\\_Metode\\_Penel\\_Pengemb\\_Pembelajaran.pdf](http://www.infokursus.net/download/0604091354_Metode_Penel_Pengemb_Pembelajaran.pdf)).